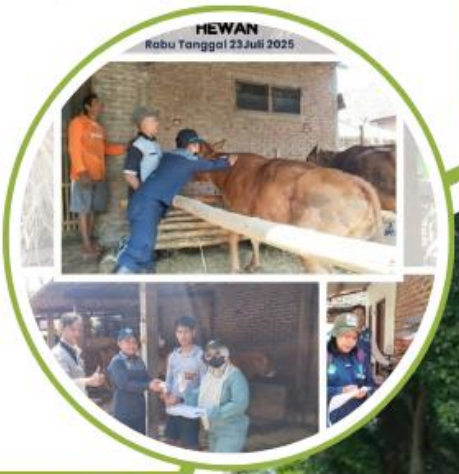
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

2025













DINAS PERTANIAN
KABUPATEN NGANJUK

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2025. LkjIP Dinas Pertanian Tahun 2025 ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pertanian dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birikrasi RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LkjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 tahun anggaran untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

Diharapkan penyajian LkjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Nganjuk, 5 Februari 2026
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Nganjuk

Ida Shobihatin, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750116 199412 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GRAFIK vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. LANDASAN HUKUM 2
C. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 3
D. ISU-ISU STRATEGIS YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI 18
E. SISTEMATIKA PENULISAN 19
BAB II PERENCANAAN KINERJA 20
A. IKHTISAR/RINGKASAN RENCANA STRATEGIS/ RENCANA KERJA 20
B. PERJANJIAN KINERJA 33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 36
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 36
A1. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 37
A.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 48
A.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH PADA DOKUMEN RENSTRA 53
A.4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN STANDART NASIONAL 56
A.5. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA 59
A.6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 65

A.7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA 67
B. REALISASI ANGGARAN 118
BAB IV PENUTUP 128
A. KESIMPULAN 128
B. SARAN 131
LAMPIRAN-LAMPIRAN 134
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan RPD 2024-2026 dan Renstra 2025-2029)
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (berdasarkan RPD 2024-2026 dan Renstra 2025-2029)
3. Dokumen Penganggaran (Ikhtisar DPA)
4. Bukti Dukung Kinerja Pencapaian IKU (berdasarkan RPD 2024-2026 dan Renstra 2025-2029)

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026	23
Tabel 2.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029	26
Tabel 2.3	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026	28
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026	28
Tabel 2.5	Tujuan, Sasaran, Perangkat Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029	30
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029	30
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026	34
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029	34
Tabel 2.9	Skala Nilai Peringkat Kinerja	36
Tabel 3.1	Realisasi Kinerja Tahun 2025	37
Tabel 3.2	Realisasi Nilai Tukar Petani	38
Tabel 3.3	Pencapaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Pertanian (Sampai Triwulan III Tahun 2025)	40
Tabel 3.4	Pencapaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Pertanian (Triwulan III Tahun 2025 dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2024)	41
Tabel 3.5	Pencapaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Peternakan (Sampai Triwulan III Tahun 2025)	42

Tabel 3.6	Pencapaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Peternakan (Triwulan III Tahun 2025 dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2024)	42
Tabel 3.7	Pencapaian Indikator Kinerja Rasio Pendapatan Petani Terhadap Biaya Investasi Sektor Pertanian	44
Tabel 3.8	Pencapaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Pertanian	44
Tabel 3.9	Pencapaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Peternakan	46
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Tahun Lalu	48
Tabel 3.11	Target Kinerja Renstra (berdasarkan RENSTRA 2024-2026 dan RENSTRA 2025-2029)	53
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra	53
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Nasional (berdasarkan Rentra 2024-2026)	56
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Nasional (berdasarkan RENSTRA 2025-2029)	58
Tabel 3.15	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2025	59
Tabel 3.16	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025	65
Tabel 3.17	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/ Kegagalan	67
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran Tahun 2025	118
Tabel 3.19	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk 5

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah pegawai berdasarkan Status Pegawai	16
Grafik 1.2	Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan	17

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian sebagai salah satu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka integrasi perwujudan Misi Kabupaten Nganjuk.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrument dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumberdaya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Terkait dengan hal tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk menggerakkan sektor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara akuntabel, dengan mengukur hasil-hasilnya baik secara fisik maupun finansial. Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

Sistem AKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Perpres 29 Tahun 2015). Perpres ini mewajibkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun

Rencana Strategis (Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi, Kebijakan/Program dan indikator kinerja), mengukur keberhasilan organisasinya melalui seperangkat indikator kinerja yang ditetapkannya sendiri, dan melaporkan akuntabilitas kinerjanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, bahwa sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan sumberdaya, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas perencanaan yang telah ditetapkan.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan PenetapanKinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18 Tahun 2O25 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

C. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

1. STRUKTUR ORGANISASI

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam organisasi tersendiri.

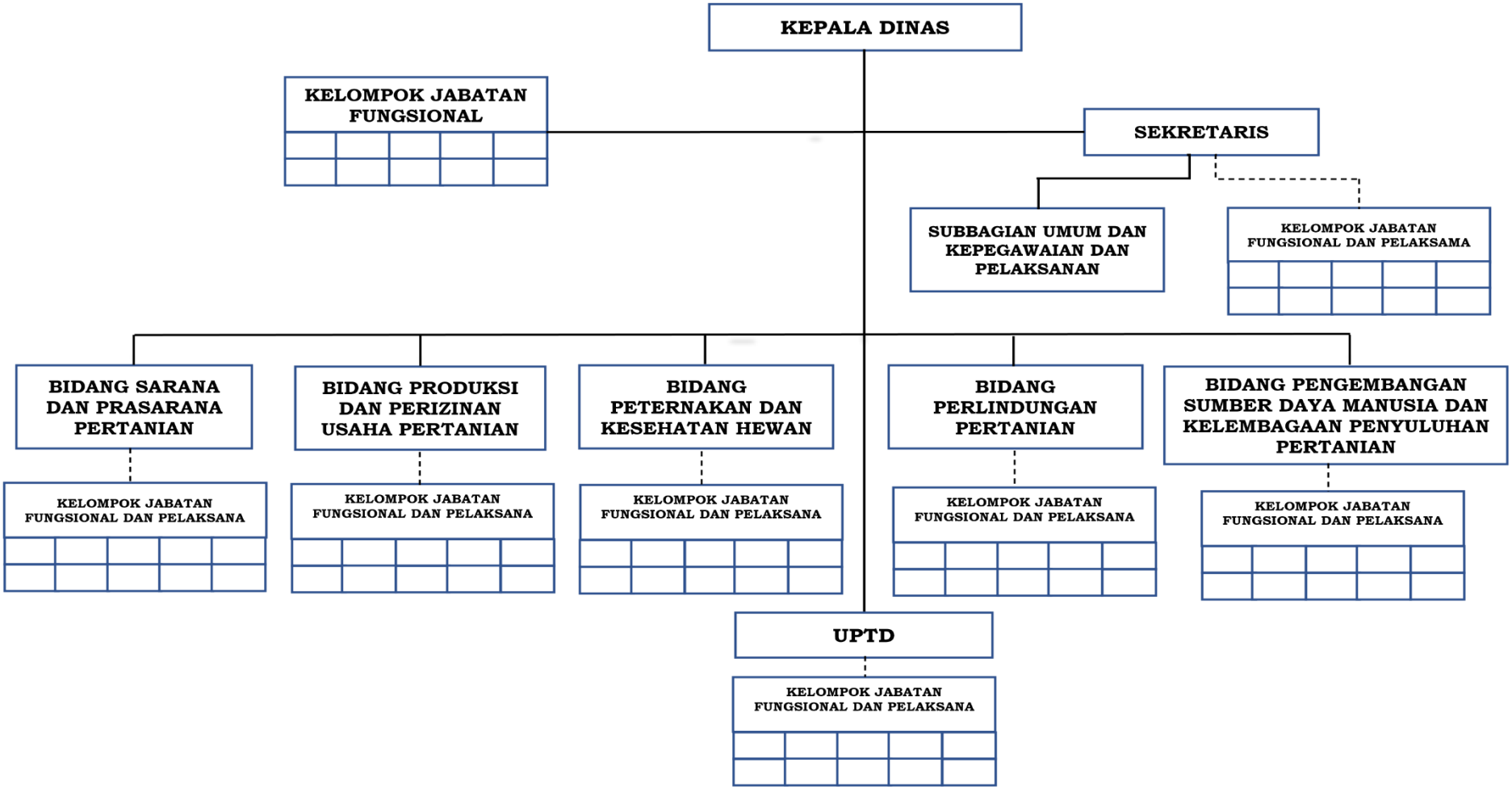
Keberadaan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Adapun dasar hukum pembentukan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 tahun 2010;
5. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Gambar 1.1
Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk



2. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan peternakan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :

1. Menetapkan perumusan kebijakan teknis urusan Pemerintahan di bidang pertanian dan bidang peternakan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang peternakan;
3. Pemberian rekomendasi ijin usaha pertanian dan peternakan;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan di bidang pertanian dan bidang peternakan;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan teknis, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas pelayanan umum lainnya di bidang pertanian dan bidang peternakan

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pertanian.

Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
d. Pembinaan aparatur;
e. Pengelolaan urusan kepegawaian;
f. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
g. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan daerah;
h. Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
i. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. melaksanakan urusan persuratan;
2. melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
3. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
4. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
5. melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
6. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

Bidang sarana dan prasarana Pertanian mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana pertanian.

Bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Pengembangan dan Pembangunan sarana dan prasarana pertanian;

b. Pelaksanaan koordinasi bidang Pengembangan dan Pembangunan sarana dan prasarana pertanian;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengembangan dan Pembangunan sarana dan prasarana pertanian;
d. Pelaksanaan pembinaan bidang Pengembangan dan Pembangunan sarana dan prasarana bidang pertanian;
e. Pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pengembangan dan Pembangunan sarana dan prasarana pertanian;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian

Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan di bidang produksi, dan rekomendasi perizinan pertanian. Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian Pertanian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Kebijakan Teknis Pengelolaan SDG Tanaman dan Hewan dan Mikro Organisme, Budidaya Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan serta Perizinan Usaha Pertanian;
b. Penyusunan Kebijakan Teknis Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman dan Tanaman Pakan ternak;
c. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Di Bidang Produksi Dan Perizinan Usaha Pertanian;
d. Pelaksanaan Koordinasi Teknis Di Bidang Produksi Dan Perizinan Usaha Pertanian;
e. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Di Bidang Produksi Dan Perizinan Usaha Pertanian;
f. Penetapan Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas Dan Produksi Pertanian;

g. Pelaksanaan Pembinaan Di Bidang Produksi Dan Perizinan Usaha Pertanian;
h. Perumusan Pertimbangan Teknis Pemberian Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Bidang Pertanian;
i. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Produksi Dan Perizinan Usaha Pertanian;
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan tugas Dinas Pertanian di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bidang Peternakan memiliki fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, produksi ternak dan agribisnis peternakan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, produksi ternak dan agribisnis peternakan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, produksi ternak dan agribisnis peternakan;
d. Penyiapan bahan penyebaran dan pengembangan ternak;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

5. Bidang Perlindungan Pertanian

Bidang Perlindungan Pertanian mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang Perlindungan Pertanian.

Bidang Perlindungan Pertanian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perlindungan pertanian;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintaan dan pelayanan umum di bidang perlindungan pertanian;
c. Pelaksanaan perencanaan teknis penanganan bencana pertanian yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan;
d. Persiapan teknologi penanganan bencana pertanian;
e. Pelaksanaan tugas dibidang perlindungan pertanian meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan;
f. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang perlindungan pertanian
g. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang perlindungan pertanian;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan bidang pengembangan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan penyuluhan pertanian.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan kegiatan pengembangan SDM dan penyuluhan pertanian;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintaan dan pelayanan umum di bidang kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan;
c. Penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan penyuluhan pertanian;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan Kelembagaan penyuluh pertanian;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan penyuluh pertanian;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian yang berkaitan dengan tugasnya

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk, Tugas dan fungsi UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:

1. UPTD Penerapan Teknologi dan Penyuluhan Pertanian

UPTD Penerapan Teknologi dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang penerapan teknologi dan penyuluhan pertanian. UPTD Penerapan Teknologi dan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:

a. Pemberian rekomendasi usulan kebijakan sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di bidang penerapan teknologi dan penyuluhan pertanian sesuai pengalaman daerah;
b. Pemberian rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang penerapan teknologi dan penyuluhan pertanian ;
c. Pelaksanaan koordinasi penyuluhan pertanian sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di kabupaten;
d. Pengusulan kebutuhan metodologi penyuluhan yang akan dirumuskan;
e. Pemberian rekomendasi aspek teknis, sosial ekonomi, dalam penyusunan sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan pertanian;
f. Pemberian fasilitas penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standardisasi sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di kabupaten;
g. Pemberian fasilitas pembinaan usaha kelembagaan tani sub sektor tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;

h. Pemberian fasilitas kerja sama standardisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
i. Pemberian fasilitas penyebaran dokumentasi dan informasi penerapan teknologi dan penyuluhan pertanian sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
j. Pemberian fasilitas penyelenggaraan program kaji terap sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai kebutuhan di kabupaten.

2. UPTD Pembenihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan UPTD Pembenihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang pembenihan padi dan palawija.

UPTD Pembenihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan pembenihan tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
b. Pengembangan sistem informasi perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
c. Penyiapan benih dasar dan penyaluran benih ;
d. Pelaksanaan pengkajian pada benih varietas baru;
e. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten;
f. Pelaksanaan perbanyakan benih/bibit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
g. Pemberian pertimbangan penerbitan rekomendasi ijin edar benih/bibit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikeluarkan oleh Bupati.

3. UPTD Laboratorium Pertanian

UPTD Laboratorium Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang laboratorium pertanian :

a. UPTD Laboratorium Pertanian mempunyai fungsi: Pelaksanaan sejumlah pemeriksaan diagnostik laboratoris sederhana kesehatan hewan;
b. Pelaksanaan pengambilan, penanganan dan pengiriman spesimen ke laboratorium kesehatan hewan pemerintah tipe b dan ke laboratorium kesehatan hewan tipe a;
c. Pelaksanaan sebagai sumber penyediaan botol pengumpul spesimen dan bahan pengawet spesimen bagi petugas lapangan, pemeriksaan postmortum terhadap bangkai hewan yang mati, pemeriksaan gross patologi terhadap jaringan dan organ dari hewan yang mati;
d. Pelaksanaan pengumpulan dan pengawetan jaringan dan organ untuk dikirimkan ke laboratorium kesehatan hewan pemerintah tipe a (Balai Penyidikan Penyakit Veteriner-BPPV) untuk pemeriksaan histopathologis;
e. Pelaksanaan pengamatan, pengawasan dan evaluasii penanggulangan penyakit dan diagnosis penyakit hewan, tanaman hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan;
f. Pelaksanaan pelayanan standarisasi dan mutu pakan ternak;
g. Pelaksanaan peminaan, pengembangan dan pengendalian terhadap stanarisasi produk pertanian (peternakan, hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan);
h. Pelaksanaan pelayanan pengujian mutu produk pangan dan non pangan, baik nabati maupun hewani;
i. Pelaksanaan pelayanan uji tanah/lahan pertanian (hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan) dan;
j. Pengembangan teknologi kultur jaringan.

4. UPTD Pusat Kesehatan Hewan

UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang layanan kesehatan hewan, konsultasi veteriner, dan penyuluhan kesehatan hewan.

UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyehatan hewan;
b. Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
c. Pelaksanaan epidemiologik;
d. Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
e. Pemberian pelayanan jasa veteriner;
f. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan, kegiatan Puskeswan;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

5. UPTD Rumah Potong Hewan

UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pertanian dalam kegiatan pemotongan ternak sesuai standar teknis, pemeriksaan *antermortem* dan *post mortem,* melakukan pengawasan penyakit ternak yang bersifat *foodborne disease dan foodborne zoonosis.*

UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan proses perubahan dari ternak/hewan hidup menjadi karkas/daging;
b. Penyediaan daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal);
c. Pengendalian pemotongan ternak betina reproduksi;
d. Monitoring penyakit ternak menular yang bersifat zoonosis;
e. Melaksanaan penarikan retribusi;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan dan tupoksinya sebagai penyuluh Penyuluh

Pertanian. Kelompok Jabatan Fungsional ini, dalam melaksanakan tugas pokok bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk memiliki sumberdaya organisasi yang berupa sumber daya manusia dan dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran kegiatan kantor. Berdasarkan data Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Tahun 2025 keadaan sumber daya manusia Dinas Pertanian sebanyak 230 orang, yang terdiri dari:

1. Pejabat Struktural
   a. JPT Pramana : 1 Orang
   b. Administrator : 5 Orang
   c. Pengawas : 3 Orang
2. Pejabat Fungsional PNS
   a. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) : 80 Orang
   b. Medik veteriner : 5 Orang
   c. Paramedik : 1 Orang
   d. Jabatan Fungsional yang Disetarakan : 10 Orang
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
   a. P3K : 75 Orang
   b. P3K Paruh Waktu : 19 Orang
4. Staf/Fungsional Umum
   a. Staf PNS : 25 Orang
   b. Tenaga Kebersihan : 2 Orang
5. Pegawa Non ASN (THL)
   a. Tenaga Administrasi : 4 Orang

Jumlah Pegawai tetap (PNS) :

1. Jumlah Pegawai di Dinas Pertanian (230 orang)
   a. Pegawai PNS (132 orang)
      - Laki-laki : 69 orang
      - Perempuan : 63 orang

b. Pegawai P3K di Dinas Pertanian (94 orang)

- Laki-laki	:	57	orang
- Perempuan	:	37	orang

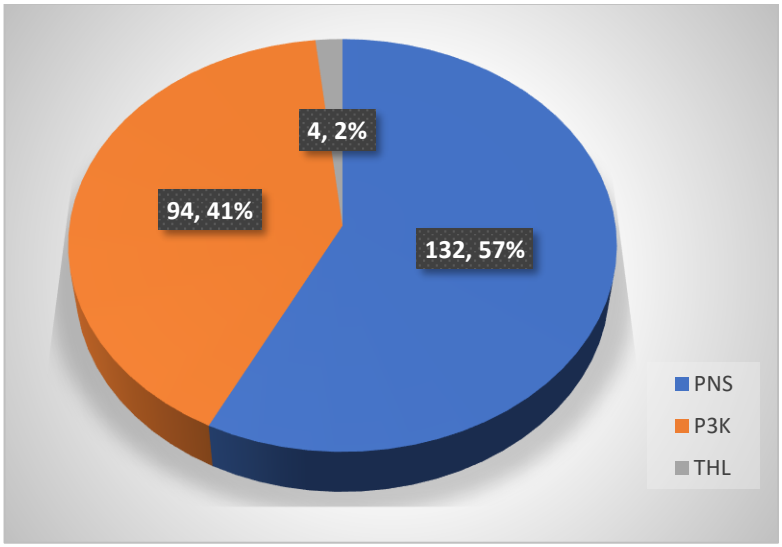
c. Pegawai non ASN (4 orang)

- Laki-laki	:	3	orang
- Perempuan	:	1	orang

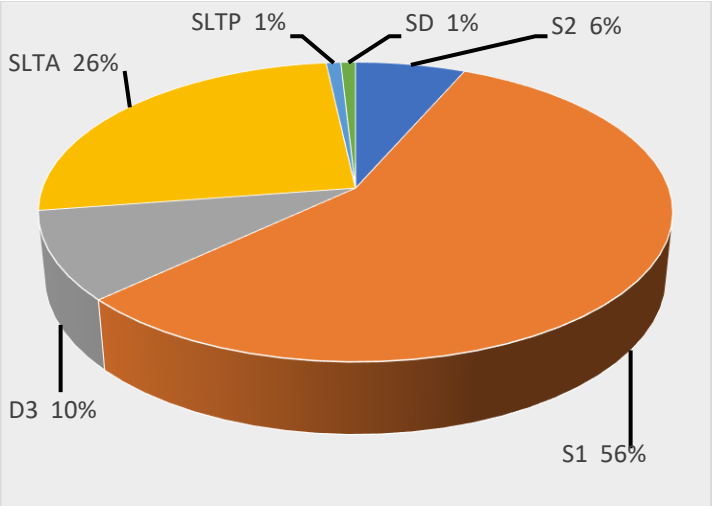
2. Tingkat Pendidikan Formal

- Pendidikan S2	:	15	orang
- Pendidikan S1	:	130	orang
- Pendidikan DIII	:	22	orang
- Pendidikan SLTA	:	59	orang
- Pendidikan SLTP	:	2	orang
- Pendidikan SD	:	2	orang
Jumlah		230	orang

Gambaran perbandingan jumlah pegawai Dinas Pertanian dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Grafik 1.1. Jumlah pegawai berdasarkan Status Pegawai



Grafik 1.2. Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan latar belakang pendidikannya, sebagian besar Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk mempunyai latar belakang pendidikan S1 bidang pertanian. Hal ini menunjukkan kompetensi yang cukup memadai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Dukungan Sarana Dan Prasarana

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor. Berdasarkan data aset tetap inventaris Dinas Pertanian Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1.	Tanah	:	17	bidang
2.	Peralatan dan mesin (1.182 unit)			
	a. Alat Besar	:	9	unit
	b. Alat Angkutan	:	92	unit
	c. Alat bengkel dan alat ukur	:	4	unit
	d. Alat pertanian	:	99	unit
	e. Alat kantor dan rumah tangga	:	566	unit
	f. Alat studio komunikasi dan pemancar	:	91	unit
	g. Alat kedokteran dan alat kesehatan	:	15	unit

h.	Alat laboratorium	:	106	unit
i.	Alat komputer	:	198	unit
j.	Peralatan proses produksi	:	2	unit
3.	Gedung dan bangunan (88 unit)			
a.	Bangunan gedung	:	82	unit
b.	Tugu/titik kontrol/pasti	:	6	unit
4.	Jalan, jaringan dan irigasi (24 unit)			
a.	Jalan dan jembatan	:	11	unit
b.	Bangunan air	:	1	unit
c.	Instalasi	:	7	unit
d.	Jaringan	:	5	unit
5.	Aset tetap lainnya (1 unit)			
a.	Barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olah raga	:	1	unit

D. ISU STRATEGIS (STRATEGIC ISSUED) YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Berdasarkan hasil analisis pelayanan serta mempertimbangkan sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Pertanian, maka penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian yang menjadi dasar penyelenggaraan tujuan, sasaran, program dan kegiatan strategis sebagaimana tertuang pada Renstra 2024-2026 maupun Renstra 2025-2029 adalah:

1. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pertanian untuk mendukung pencapaian produktivitas
2. Perlunya peningkatan pengendalian dan penanganan bencana pertanian
3. Perlunya peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani
4. Perlunya peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis yang bersifat zoonosis maupun tidak

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
- D. Isu-isu Strategis (*strategic issued*) yang Sedang Dihadapi Organisasi
- E. Sistematika Penulisan

Bab II Perencanaan Kinerja
- A. Ikhtisar/Ringkasan Renstra/Renja
- B. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja
- A. Capaian Kinerja Organisasi
  - A1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
  - A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya
  - A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra
  - A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standart Nasional
  - A.5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja
  - A.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
  - A.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup
- A. Kesimpulan
- B. Saran

Lampiran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. IKHTISAR/RINGKASAN RENCANA STRATEGIS/RENCANA KERJA

1. RENCANA STRATEGIS

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Nganjuk yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 adalah ”Nganjuk yang Maju, Adil dan Sejahtera”. Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan tahap ke IV RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 3 tahun. Tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

a. Nganjuk Tumbuh

Tujuan	:	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup
Indikator tujuan	:	1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah 2. Indeks Gini 3. Tingkat Kemiskinan Daerah 4. Tingkat Pengangguran Terbuka 5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Sasaran 1	:	Meningkatkan produktivitas ekonomi lokal
Indikator Sasaran	:	1. Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan 2. Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

		3. Nilai Investasi Daerah
Sasaran 2	:	Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan
Indikator sasaran	:	1. Nilai Tukar Petani
		2. Skor Pola Pangan Harapan
Sasaran 3	:	Meningkatnya daya saing produk unggulan Daerah
Indikator sasaran	:	1. Rata-rata lama tinggal wisatawan
		2. Pertumbuhan koperasi sehat
		3. Rata-rata peningkatan volume usaha mikro
Sasaran 4	:	Mengurangi penduduk miskin melalui pemberdayaan masyarakat dan desa
Indikator sasaran	:	1. Angka kemiskinan ekstrim
		2. Indeks desa membangun
Sasaran 5	:	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja
Indikator Sasaran	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Sasaran 6	:	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Indikator Sasaran	:	1. Indeks Kualitas Air
		2. Indeks Kualitas Udara
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Sasaran 7	:	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan akses hunian layak, serta keselamatan transportasi
Indikator Sasaran	:	1. Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
		2. Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan
		3. Persentase rumah layak huni

b. Nganjuk Sehat dan Cerdas

Tujuan	:	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing

Indikator Tujuan	:	Indeks Pembangunan Manusia
Sasaran 1	:	Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat
Indikator Sasaran	:	Indeks Kesehatan
Sasaran 2	:	Meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi kepemudaan
Indikator Sasaran	:	1. Indeks Pendidikan 2. Jumlah pemuda berprestasi
Sasaran 3	:	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender
Indikator Sasaran	:	Indeks Pembangunan Gender (IPG)

c. Nganjuk Akuntabel

Tujuan	:	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik
Indikator tujuan	:	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran 1	:	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima
Indikator Sasaran	:	1. Nilai SAKIP 2. Opini BPK terhadap LKPD 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Indeks Pelayanan Publik
Sasaran 2	:	Meningkatkan transformasi digital pemerintahan daerah
Indikator Sasaran	:	Indeks SPBE
Sasaran 3	:	Meningkatkan profesionalitas ASN
Indikator Sasaran	:	Indeks Profesionalitas ASN

d. Nganjuk Harmonis

Tujuan	:	Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya
Indikator Tujuan	:	Indeks Kesalehan Sosial
Sasaran 1	:	Meningkatkan penanganan konflik sosial,

		serta ketenteraman dan ketertiban umum
Indikator Sasaran	:	1. Persentase penanganan konflik sosial 2. Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat
Sasaran 2	:	Meningkatkan pelestarian warisan kebudayaan lokal
Indikator Sasaran	:	Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan
Sasaran 3	:	Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
Indikator Sasaran	:	Indeks Risiko Bencana

Dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah dimaksud, Dinas Pertanian memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan ke-1, yaitu **"Nganjuk Tumbuh"** dengan tujuan **"Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup".**

Rumusan pernyataan strategi Perangkat Daerah tahun 2024-2026, yaitu: meningkatnya kesejahteraan petani, baik jangka menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan kesejahteraan petani tersebut maka diharapkan pertumbuhan ekonomi masyarakat juga lebih baik atau lebih berkualitas. Adapun tujuan, sasaran dan strategi untuk melaksanakan sasaran dan tujuan diatas dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026

Tujuan	:	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup
Sasaran	:	Meningkatkan kesejahteraan petani dan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya kesejahteraan petani	Meningkatkan produksi pertanian dan peternakan	Tertibnya administrasi dan keuangan pencapaian sasaran kinerja
		Tersedianya sarana dan prasarana pertanian
		Penanggulangan dan Pengendalian Bencana Pertanian
		Penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian sesuai standart peraturan perundang-undangan
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani
		Terkendalinya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Telah ditetapkan Visi Bupati terpilih Kabupaten Nganjuk periode 2025-2029 yaitu, **Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat** dengan 7 misi yaitu :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban.
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
3. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
5. **Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal**.
6. Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna.
7. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal.

Adapun misi yang diamantkan pencapaiannya pada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk yaitu **Misi 5 "Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal".**

Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk yaitu :

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran
2. Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
3. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
5. Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren
6. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan pengadaan mobil siaga kelurahan
7. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata
8. Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional
9. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan
10. Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
11. Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal serta lingkungan hidup
12. Revitalisasi bidang peternakan dan pertanian serta subsidi pupuk
13. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif, UMKM
14. Pengembangan jejaring antar daerah kabupaten, kota, provinsi dan pusat serta warga Nganjuk di perantauan
15. Peningkatan ADD dan kesejahteraan kelembagan desa atau kelurahan (RT, RW, BPD/LPM dan kader)

Tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk yaitu **Meningkatnya Pendapatan Petani** dengan indikator rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sektor pertanian dihitung dengan menggunakan rata-rata analisa usaha petani komoditas padi, jagung, kedelai, bawang merah, tembakau, dan penggemukan sapi potong. Meningkatnya pendapatan petani dipengaruhi oleh naiknya produksi, meningkatnya produktivitas, turunnya biaya produksi, dan naiknya harga jual.

Sasaran Dinas Pertanian yaitu **1. Meningkatnya produksi pertanian komoditas unggulan** dengan indikator Persentase peningkatan Produksi Pertanian komoditas unggulan. Meningkatnya produksi pertanian komoditas unggulan dipengaruhi oleh teknologi dan inovasi pertanian, sumber daya manusia (petani dan penyuluh pertanian), ketersediaan sarana produksi, kondisi pasar dan rantai distribusi, kondisi iklim dan lingkungan, dan kelembagaan petani **2. Meningkatnya produksi hasil peternakan** dengan indikator Persentase peningkatan produksi hasil peternakan. Meningkatnya produksi hasil peternakan dipengaruhi oleh Bibit Ternak, pakan dan nutrisi, kesehatan ternak, manajemen pemeliharaan, kapasitas SDM peternak, kondisi lingkungan, dan kelembagaan.

Adapun tujuan, sasaran dan strategi untuk melaksanakan sasaran dan tujuan diatas dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

Visi : Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat		
Misi : Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Meningkatnya pendapatan petani	Meningkatnya produksi pertanian komoditas unggulan	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Sarana (Produksi Benih unggul, dukungan pupuk dan pestisida, dan alat pertanian)
		Terjaganya prasarana pertanian sesuai standar
		Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian
		Penanggulangan dan Pengendalian Bencana Pertanian
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan Petani
	Meningkatnya produksi hasil peternakan	Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Peternak
		Peningkatan Populasi dan Produktivitas Ternak
		Pengendalian Penyakit Hewan dan Kesehatan Ternak

2. RENCANA KERJA

Tahun 2025 sebagai irisan antara Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 artinya tahun 2025 merupakan tahun transisi dan kesinambungan (jembatan) perencanaan, di mana kebijakan, program, dan anggaran tahun tersebut harus menyelaraskan target akhir Renstra lama dengan target awal Renstra baru. Maksud dari hal tersebut adalah :

a. Tahun 2025 menjadi titik perpindahan dari fokus pembangunan Renstra 2024-2026 menuju arah baru Renstra 2025-2029.
b. Program yang berjalan di tahun 2025 tidak boleh terputus, melainkan menyambungkan capaian tahun-tahun sebelumnya (2024) ke arah target jangka menengah yang baru (2029).
c. Tahun 2025 menjadi waktu untuk menyesuaikan program operasional dengan Dokumen RPJMN/Renstra 2025-2029 yang baru.
d. Tahun ini menjadi masa verifikasi target kinerja akhir Renstra 2024-2026 untuk dirumuskan ke dalam Renstra 2025-2029 yang lebih komprehensif.

Hal ini bertujuan agar pembangunan tetap berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan tanpa kehilangan arah strategis, terutama dalam penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Tahun 2025 adalah jembatan untuk memastikan kesinambungan pembangunan agar tetap selaras dengan arah kebijakan nasional terbaru (RPJPN 2025-2045) meski dokumen perencanaan lima tahunan yang baru sedang dalam tahap finalisasi.

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah “Meningkatnya kesejahteraan petani”, sasaran yang akan dicapai adalah “Meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan produksi peternakan”, dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	103
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2025**
Meningkatkan produksi pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	0,176%
Meningkatkan produksi peternakan	Persentase Peningkatan Produksi peternakan	1,9%

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian berdasarkan Renstra 2024-2026 sebagaimana pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formula/Penjelasan
1.	Meningkatkan produksi pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	$\frac{Jml,\ produksi\ pertanian\ th\ n - Jml,\ produksi\ pertanian\ th\ (n-1)}{Jumlah\ Produksi\ pertanian\ tahun\ (n-1)}$ x 100%
2.	Meningkatkan produksi peternakan	Persentase Peningkatan Produksi peternakan	$\frac{Jml,\ Produksi\ peternakan\ th\ n - Jml,\ Produksi\ peternakan\ th\ (n-1)}{Jumlah\ Produksi\ peternakan\ Tahun\ (n-1)}$ x 100%

Definisi operasional persentase peningkatan produksi pertanian adalah persentase peningkatan produksi pertanian yang diperoleh dari rata-rata persentase peningkatan produksi masing-masing komoditas pertanian (padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabe, tembakau, cengkeh) yang dihitung berdasarkan perbandingan antara selisih produksi tahun n dan produksi tahun (n-1) terhadap produksi tahun (n-1). Dengan pengambilan data setiap triwulan. Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin besar peningkatan produksi pertanian.

Definisi operasional persentase peningkatan produksi peternakan adalah persentase peningkatan produksi peternakan yang diperoleh dari rata-rata persentase peningkatan produksi hasil peternakan (daging, telur) yang dihitung berdasarkan perbandingan antara selisih produksi tahun n dan produksi tahun (n-1) terhadap produksi tahun (n-1). Dengan pengambilan data setiap triwulan. Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin besar peningkatan produksi peternakan.

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka dilaksanakan melalui program prioritas yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta kegiatan-kegiatan pendukung program berikut dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan urusan yang terdapat dalam Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-58889 tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Aturan ini bertujuan memperbarui sistem klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya Pendapatan Petani”, sasaran yang akan dicapai adalah “Meningkatnya produksi pertanian komoditas unggulan dan Meningkatnya produksi hasil peternakan”, dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
Tujuan, Sasaran, Perangkat Daerah Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
Meningkatnya Pendapatan Petani	Rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sektor pertanian (Rasio)	1.155
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2025**
Meningkatnya produksi pertanian komoditas unggulan	Persentase peningkatan Produksi Pertanian komoditas unggulan	0.18%
Meningkatnya produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan	1.46%

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian berdasarkan Renstra 2025-2029 sebagaimana pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
1.	Meningkatnya pendapatan petani	Rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sektor pertanian	Rasio	**Konsep :** Mengukur rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sektor pertanian. Pendapatan petani merupakan hasil bersih yang diperoleh dari kegiatan usaha tani setelah dikurangi seluruh biaya produksi. Biaya investasi sektor pertanian mencakup seluruh pengeluaran yang digunakan untuk mendukung proses produksi pertanian, seperti sewa lahan dan alat, serta pembelian benih, pupuk, dan sarana lainnya **Definisi Operasional :** Rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sektor pertanian diperoleh dari rata-rata hasil rasio pendapatan petani masing-masing komoditas (pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) terhadap biaya investasi.

NO	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				Frekuensi pengambilan data : Tahunan **Formulasi Perhitungan :** $\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}\frac{Rk}{Ck}$ K = Jumlah komoditas (pangan, hortikultura, perkebunan,dan peternakan) Rk = Pendapatan petani masing-masing komoditas Ck = Biaya investasi/produksi masing-masing komoditas **Cara Pengambilan Data :** Kompromin
2.	Meningkatnya produksi pertanian komoditas unggulan	Persentase peningkatan Produksi Pertanian komoditas unggulan	Persentase	**Konsep :** Mengukur peningkatan produksi pertanian komoditas unggulan (padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai rawit, tembakau, cengkeh) **Definisi Operasional :** Persentase peningkatan produksi pertanian komoditas unggulan diperoleh dari rata-rata persentase peningkatan produksi masing-masing komoditas unggulan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara selisih produksi tahun n dan produksi tahun n-1 terhadap produksi tahun n-1. **Frekuensi pengambilan data :** Triwulan **Formulasi Perhitungan :** $\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}\frac{Pi;n - Pi;n\text{-}1}{Pi;n\text{-}1}\ x\ 100\%$ k = jumlah komoditas (padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai rawit, tembakau, cengkeh). $Pi;n$ = Produksi pertanian komoditas ke-i tahun ke-n. $Pi;n-1$ = Produksi pertanian komoditas ke-i tahun ke-n-1. **Cara Pengambilan Data :** Kompromin
3.	Meningkatnya produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase	**Konsep :** Mengukur peningkatan produksi hasil peternakan (daging dan telur). **Definisi Operasional :**

NO	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				Persentase peningkatan produksi hasil peternakan diperoleh dari rata-rata perbandingan produksi masing-masing hasil peternakan (daging dan telur) tahun n dikurangi tahun n-1 dengan produksi hasil peternakan tahun n-1. **Frekuensi pengambilan data :** Triwulan **Formulasi Perhitungan :** $\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}\frac{Ti;n-Ti;n\text{-}1}{Ti;n\text{-}1}\ x\ 100\%$ k = jumlah jenis hasil peternakan (daging dan telur). $Ti;n$ = Produksi hasil peternakan jenis ke-i tahun ke-n. $Ti;n-1$ = Produksi hasil peternakan jenis ke-i tahun ke-n-1 **Cara Pengambilan Data :** Kompromin

Indikator tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk adalah rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sektor pertanian. Sifat indicator adalah positif. Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin besar rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sector pertanian, artinya adalah semakin tinggi tingkat efisiensi dan keuntungan yang diperoleh petani dari modal yang ditanamkan dalam usahataninya.

Indikator sasaran Dinas Pertanian meningkatnya produksi pertanian komoditas unggulan adalah persentase peningkatan Produksi Pertanian komoditas unggulan. Komoditi unggulan di Kabupaten Nganjuk yang diukur adalah padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai rawit, tembakau, cengkeh. Persentase peningkatan produksi pertanian komoditas unggulan diperoleh dari rata-rata persentase peningkatan produksi masing-masing komoditas unggulan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara selisih produksi tahun n dan produksi tahun n-1 terhadap produksi tahun n-1. Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin besar peningkatan produksi pertanian komoditas unggulan.

Indikator sasaran Dinas Pertanian meningkatnya produksi hasil peternakan adalah persentase peningkatan produksi hasil peternakan utamanya daging dan telur. Persentase peningkatan produksi hasil peternakan diperoleh dari rata-rata persentase peningkatan produksi masing-masing hasil peternakan (daging dan telur) yang dihitung berdasarkan perbandingan antara selisih produksi tahun n dan produksi tahun n-1 terhadap produksi tahun n-1. Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin besar peningkatan produksi hasil peternakan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Kepala Dinas Pertanian telah melakukan perjanjian kinerja Tahun 2025 dengan Bupati Nganjuk. Perjanjian kinerja berisi tentang tanggung jawab Kepala Dinas Pertanian untuk mewujudkan target kinerja tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan Bupati melakukan supervisi serta evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Perjanjian Kinerja tersebut disusun selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pertanian. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabikitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Perjanjian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mandat Renstra 2024-2026 tersaji pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	0,176%
2.	Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase peningkatan produksi peternakan	1,9%

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	34.842.164.698	APBD
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	936.934.350	APBD
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	202.000.000	APBD
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	362.730.450	APBD
5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	436.407.100	APBD
6	Program Perizinan Pertanian	48.683.000	APBD
7	Program Penyuluhan Pertanian	675.722.100	APBD
		37.504.641.698	

Perjanjian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 yang merupakan target baru dari Renstra 2025-2029 tersaji pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pendapatan petani	Rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sektor pertanian	1,155
2.	Meningkatnya produksi pertanian komoditas unggulan	Persentase peningkatan produksi pertanian komoditas unggulan	0,18%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
3.	Meningkatnya produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan	1,46%

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	34.248.246.186	APBD
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.413.977.500	APBD, DBHCHT
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.226.400.000	APBD, DBHCHT
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	988.325.844	APBD, DAKNF
5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	420.843.650	APBD
6	Program Perizinan Pertanian	22.822.000	APBD
7	Program Penyuluhan Pertanian	5.669.500.350	APBD, DAKNF, DBHCHT
		45.118.793.742	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Insntansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan Progres Kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Proses pengukuran akuntabilitas kinerja didasarkan pada capaian pengukuran hasil Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati bersama. Pengukuran ini merupakan suatu hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja utama dan kegiatan berupa masukan, keluaran, dan hasil. Pengukuran keberhasilan capaian sasaran strategis dan target organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan strategis, menggunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 2.9

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 91%	Tercapai
2	80% ≤ 90%	Tercapai dengan capaian
3	< 80%	Tidak Tercapai

A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam upaya pencapaian kinerja indikator sasaran yang diampu. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang harus diwujudkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 yaitu tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1.	Tujuan	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Renstra 2024-2026	103	111,5	108.26%
2.	Sasaran	1. Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	Renstra 2024-2026	0,176%	-44,90%	-255,11%
		2. Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase peningkatan produksi peternakan	Renstra 2024-2026	1,9%	-20,99%	-1.104,74
3.	Tujuan	Meningkatnya Pendapatan Petani	Rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sektor pertanian	Renstra 2025-2029	1,155	1,39	120,35%
4	Sasaran	1. Meningkatnya produksi pertanian komoditas unggulan	Persentase peningkatan Produksi Pertanian komoditas unggulan	Renstra 2025-2029	0,18%	0,142%	78,89%
		2. Meningkatnya produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan	Renstra 2025-2029	1,46%	1,56%	106,64%

Keterangan : *Sumber Data Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
*Realisasi Kinerja berdasarkan Renstra 2024-2026 dihitung sampai Bulan September Tahun 2025

Renstra Perangkat Daerah 2024-2026.

Analisis terhadap pencapaian indikator kinerja tujuan dari Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Nilai Tukar Petani

NO.	URAIAN	NILAI
1.	Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	135,45
2.	Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	121,48
$NTP = \frac{indeks\ harga\ yang\ diterima\ petani\ (IT)}{\text{indeks harga yang dibayar petani (IB)}}\ x\ 100$		111,5

Keterangan : Data Diolah Dinas Pertanian Tahun 2024

Tujuan Dinas Pertanian adalah meningkatnya kesejahteraan petani dengan indikator kinerja Nilai Tukar Petani (NTP). Target kinerja pada Tahun 2025 adalah 103 terealisasi 111,5 dengan capaian kinerja 108,26%. Realisasi ini merupakan realisasi tahun 2024. Karena penghitungan realisasi berdasarkan Renstra 2024-2026 untuk tahun 2025 adalah sampai bulan September 2025 dan untuk Tahun 2025 Dinas Pertanian tidak melakukan perhitungan NTP karena perubahan penetapan indicator tujuan perangkat daerah, sedangkan BPS Kabupaten Nganjuk juga tidak melakukan perhitungan NTP karena umumnya dihitung oleh BPS propinsi karena kompleksitas data dan kebutuhan sampel yang besar yang sering kali lebih akurat diolah di tingkat pusat atau provinsi. Predikat pencapaian tahun 2024 NTP termasuk kategori Sangat Baik. Nilai Tukar Petani dihitung dengan membandingkan indeks harga yang diterima petani (harga hasil pertanian yang dijual) dengan indeks harga yang dibayar petani untuk barang dan jasa (seperti kebutuhan produksi pertanian, pangan, dan barang lainnya).

Rumus perhitungan NTP adalah:

$$NTP = \frac{indeks\ harga\ yang\ diterima\ petani\ (IT)}{\text{indeks harga yang dibayar petani (IB)}}\ x\ 100$$

Keterangan:

It = Indeks Harga yang Diterima Petani (harga yang diterima petani atas hasil pertanian mereka).

Ib = Indeks Harga yang Dibayar Petani (harga barang dan jasa yang dibeli oleh petani untuk proses

Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) lebih dari 100 menunjukkan bahwa daya beli petani terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan dalam proses produksi pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran yang mereka terima dari hasil penjualan produk pertanian mereka.

Analisis terhadap capaian NTP yang lebih dari 100 dapat melibatkan beberapa aspek, di antaranya: menandakan bahwa petani berada dalam posisi yang lebih baik secara ekonomi. Artinya, pendapatan yang diperoleh dari hasil pertanian mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi dan bahkan dapat memberikan surplus untuk kebutuhan lainnya. Ini bisa menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan di kalangan petani. Harga produk pertanian di pasaran lebih baik dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk memproduksi hasil pertanian tersebut. Harga jual produk pertanian yang tinggi akan berkontribusi pada capaian NTP yang lebih dari 100. Kebijakan pemerintah seperti subsidi pupuk, subsidi bahan bakar, atau bantuan langsung tunai bisa menurunkan biaya produksi atau meningkatkan pendapatan petani. Adanya peningkatan hasil produksi, petani bisa memperoleh lebih banyak hasil dari jumlah input yang sama atau lebih sedikit, yang berujung pada NTP yang lebih tinggi.

Analisis terhadap pencapaian sasaran kinerja Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi Pertanian dengan indikator kinerja Persentase peningkatan produksi pertanian

   Realisasi capaian peningkatan produksi pertanian Tahun 2025 sebagaimana pada tebel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Pencapaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Pertanian
(Sampai Triwulan III Tahun 2025)

NO.	KOMODITI	JUMLAH PRODUKSI (TON)		
		TAHUN 2024**)	TAHUN 2025*)	PENINGKATAN/ PENURUNAN PRODUKSI (%)
1	Padi	512.421,85	473.871,57	-7,5232
2	Jagung	23.6791,11	111.120,71	-53,0723
3	Kedelai	7.635,22	6.096,80	-20,1489
4	Bawang Merah	205.603,20	164.878,28	-19,8075
5	CB Rawit	4.486,50	2.300,70	-48,7195
6	Cengkeh	585,73	59,00	-89,9271
7	Tembakau	1.626,00	404,97	-75,0942
Persentase Peningkatan Produksi Pertanian total				-315,2926
Persentase Peningkatan Produksi Pertanian				-44,8989
Capaian Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (dari target 0,176%)				-255,11%

Keterangan : Sumber data Dinas Pertanian
*) Realisasi Kinerja Triwulan 1 sampai 3 (Bulan September) Tahun 2025
**) Realisasi Kinerja Triwulan 1 sampai 4 Tahun 2024

Persentase peningkatan Produksi Pertanian dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase peningkatan Produksi Pertanian} = \frac{(\text{Produksi n} - \text{ produksi (n} - 1))}{\text{Produksi (n} - 1)} \; x \; 100\%$$

Peningkatan produksi pertanian sampai dengan Bulan September 2025 sebesar – 44,9% atau dengan capaian -255,11%. Hal ini terjadi karena produksi dari triwulan 1 sampai triwulan 3 (Bulan September) tahun 2025 dibandingkan dengan produksi 1 tahun 2024. Apabila produksi pertanian sampai bulan September 2025 dibandingkan dengan produksi sampai bulan September 2024 peningkatannya menunjukkan tren yang positif sebagaimana dapat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Pencapaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Pertanian
(Triwulan III Tahun 2025 dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2024)

NO.	KOMODITI	JUMLAH PRODUKSI (TON)		
		TAHUN 2024**)	TAHUN 2025*)	PENINGKATAN/ PENURUNAN PRODUKSI (%)
1	Padi	457.268,66	473.871,57	3,631
2	Jagung	101.972,75	111.120,71	8,971
3	Kedelai	6.581,14	6.096,80	-7,359
4	Bawang Merah	155.540,40	164.878,28	6,004
5	CB Rawit	1.510,38	2.300,70	52,326
6	Cengkeh	59,02	59,00	-0,034
7	Tembakau	1.080,00	404,97	-62,503
Persentase Peningkatan Produksi Pertanian total				1,036
Persentase Peningkatan Produksi Pertanian				0,148
Capaian Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (dari target 0,176%)				84,09%

Keterangan : Sumber data Dinas Pertanian
*) Realisasi Kinerja Triwulan 1 sampai 3 (Bulan September) Tahun 2025
**) Realisasi Kinerja Triwulan 1 sampai 3Tahun 2024

Produksi pertanian sampai Bulan September 2025 jika dibandingkan dengan produksi pertanian sampai Bulan September 2024 sebesar 0,148% atau dengan capaian 84,09%. Meskipun capain belum bisa melampaui target (0,176%), produksi tahun 2025 (sampai bulan September) meningkat 0,148% karena sudah adanya perubahan pola cocok tanam yang lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2024.

2. Meningkatnya Produksi Peternakan dengan indicator kinerja Persentase peningkatan produksi peternakan

   Peningkatan produksi peternakan sampai triwulan III (Bulan September 2025) dibandingkan dengan produksi peternakan triwulan I-IV 2024 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Pencapaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Peternakan
(Sampai Triwulan III Tahun 2025)

NO.	HASIL PETERNAKAN	JUMLAH PRODUKSI (TON)		PENINGKATAN/ PENURUNAN PRODUKSI (%)
		2024**)	2025*)	
1.	Daging	10.219	8.705.412	- 14.81
2.	Telur	8.260	6.017.122	- 27.16
Persentase Peningkatan Produksi Total				- 41.97
Persentase Peningkatan Produksi Peternakan				- 20.99
Capaian Persentase Peningkatan Produksi (1,9)				- 1.104,74

Keterangan : Sumber data Dinas Pertanian
*) Realisasi Kinerja Triwulan 1 sampai 3 (Bulan September) Tahun 2025
**) Realisasi Kinerja Triwulan 1 sampai 4 Tahun 2024

Berdasarkan Renstra 2024-2026 peningkatan produksi hasil peternakan sampai bulan September Tahun 2025 mengalami penurunan - 20.99% jika dibandingkan Tahun 2024. Capaian ini berasal dari hasil produksi daging dan telur. Jumlah produksi mengalami penurunan karena pembandingnya adalah hasil produksi selama setahun di tahun 2024. Jika produksi sampai triwulan III tahun 2025 dibandingkan dengan produksi triwulan III 2024, menunjukkan peningkatan yang positif sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Pencapaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Peternakan
(Triwulan III Tahun 2025 dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2024)

NO.	HASIL PETERNAKAN	JUMLAH PRODUKSI (TON)		PENINGKATAN/ PENURUNAN PRODUKSI (%)
		2024 **)	2025*)	
1.	Daging	7.343.258	8.705.412	18,55
2.	Telur	6.243.549	6.017.123	- 3,63
Persentase Peningkatan Produksi Total				14,92
Persentase Peningkatan Produksi Peternakan				7,46
Capaian Persentase Peningkatan Produksi (1,9)				392,71

Keterangan : Sumber data Dinas Pertanian
*) Realisasi Kinerja Triwulan 1 sampai 3 (Bulan September) Tahun 2025
**) Realisasi Kinerja Triwulan 3 Tahun 2024

Jumlah produksi peternakan sampai triwulan III 2025 jika dibandingkan dengan produksi sampai triwulan III 2024 adalah 7,46% atau dengan capaian 392,71%. Peningkatan produksi menunjukkan tren yang positif. Capaian ini didukung oleh adanya peningkatan produksi daging karena adanya peningkatan permintaan kebutuhan daging sehingga terjadi peningkatan jumlah pemotongan daging karena banyak kegiatan hajatan dan juga peningkatan pemenuhan kebutuhan protein.

Renstra Perangkat Daerah 2025-2029.

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya Pendapatan Petani” dengan indicator kinerja rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sektor pertanian. Pada tahun 2025 indikator tersebut ditargetkan 1,155 terealisasi 1,39 dengan capaian 120,35%. Capaian ini diperoleh dari rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sector pertanian setiap kecamatan dengan komoditi unggulan masing-masing kecamatan sebagaimana perhitungan dalam lampiran. Nilai rasio 1,39 ini artinya di sektor pertanian setiap Rp 1,00 biaya investasi atau biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani, akan menghasilkan penerimaan (pendapatan kotor) sebesar Rp 1,39. Pencapaian angka ini menunjukan usaha pertanian di Kabupaten Nganjuk dinilai menguntungkan karena rasio (1,39) lebih besar dari 1 (satu), usahatani tersebut dinilai menguntungkan dan layak untuk dilaksanakan. Dari segi efisiensi usaha angka ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal. Dalam hal ini, usaha tersebut efisien dan memberikan keuntungan bersih sebesar Rp 0,39 (39% dari biaya investasi) dari setiap Rp 1,00 yang dikeluarkan. Secara analisis kelayakan nilai di atas 1,00 secara umum menunjukkan bahwa hasil penjualan produk pertanian lebih besar daripada biaya produksi, sehingga tidak terjadi kerugian. Investasi usaha sector pertanian di Kabupaten Nganjuk menghasilkan keuntungan yang positif. Realisasi indikator tujuan rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sektor pertanian Dinas Pertanian Tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Pencapaian Indikator Kinerja
Rasio Pendapatan Petani Terhadap Biaya Investasi Sektor Pertanian

NO.	KOMODITI	PENDAPATAN Rp.	BIAYA Rp.	RASIO
1.	Tanaman Pangan	29.316.366	19.680.592	1,490
2.	Tanaman Hortikultura	120.962.500	79.812.947	1,516
3.	Tanaman Perkebunan	26.871.429	18.746.440	1,433
4.	Hasil Peternakan	156.875.000	139.936.800	1,121
Rasio Pendapatan Petani Terhadap Biaya Investasi Sektor Pertanian (R/C)				1,390

Keterangan : Sumber data Dinas Pertanian Tahun 2025
Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai)
Tanaman Hortikultura (bawang merah, cabe)
Tanaman Perkebunan (tembakau, cengkeh)
Hasil Peternakan (Penggemukan sapi)

Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029, sasaran yang akan dicapai Dinas Pertanian adalah “meningkatnya produksi pertanian komoditas unggulan dan meningkatnya produksi hasil peternakan”, dengan analisis terhadap pencapaian sasaran kinerja Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi pertanian komoditas unggulan dengan indikator kinerja persentase peningkatan produksi pertanian komoditas unggulan

Tabel 3.8
Pencapaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Pertanian

No.	Komoditi	Jumlah Produksi (Ton)		Peningkatan/ Penurunan Produksi (%)
		Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Padi	512.421,85	556.923,41	8,685
2.	Jagung	236.791,11	225.284,20	- 4,860
3.	Kedelai	7.635,22	6.572,54	- 13,918
4.	Bawang Merah	205.603,20	223.092,37	8,506
5.	Cabe Rawit	4.486,50	3.768,50	- 16,004
6.	Tembakau	585.73	586,00	18,538
7.	Cengkeh	1.626,00	1.927,44	0,046
Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Komoditas Unggulan Total				0,995

Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Komoditas Unggulan	0,142
Capaian Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (target 0,18%)	78,89

Keterangan : Sumber data Dinas Pertanian

Persentase peningkatan Produksi Pertanian komoditas unggulan (%) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase peningkatan Produksi Pertanian} = \frac{(\text{Produksi n} - \text{produksi (n} - 1))}{\text{Produksi (n} - 1)}\ x\ 100\%$$

Peningkatan produksi pertanian komoditas unggulan sebesar 0,14% Tahun 2025 atau dengan capaian 78,89%. Beberapa komoditi pertanian yang meningkat adalah padi, bawang merah, tembakau dan cengkeh. Produksi padi meningkat 8,68% dari 512.421,85 ton menjadi 556.923,90 ton. Peningkatan ini didukung banyaknya bantuan pemerintah seperti oplah, alat mesin pertanian, benih, pembangunan irigasi perpompaan dan perpipaan serta pembangunan sumur dalam dapat meningkatkan indeks pertanaman padi, pembangunan jalan usaha tani, serta adanya kebijakan pengaturan harga pembelian gabah dari pemerintah (HPP) merangsang petani meningkatkan luas tambah tanam. Produksi bawang merah mengalami peningkatan karena agroklimat saat on season mendukung, artinya adalah musim tanam utama/sesuai mendukung artinya adalah kondisi unsur-unsur iklim seperti curah hujan, suhu, intensitas matahari, dan kelembaban berada pada level optimal dan serasi dengan kebutuhan fisiologis tanaman, sehingga meminimalkan risiko kegagalan dan memaksimalkan potensi hasil panen. Komoditi pertanian yang mengalami penurunan produksi adalah jagung, kedelai, dan cabe rawit. Jumlah produksi komoditi jagung sebesar 225.284,20 ton berasal dari 223.264,20 ton dari lahan sawah dan tegal serta 2.020 ton dari lahan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dalam pengelolaan lahan hutan bersama masyarakat seluas 505 hektar. Produksi kedelai menurun karena adanya musim kemarau basah, tanaman kacang-kacangan sulit tumbuh, serta menurunnya minat petani dalam menanam kedelai karena tidak adanya kepastian harga atau HPP. Produksi cabe dibandingkan tahun 2024 terjadi penurunan produksi, ini terjadi karena intensitas curah hujan yang tinggi di Tahun 2025 mengakibatkan peningkatan serangan organisme

pengganggu tanaman (OPT), pertumbuhan terhambat, daun keriting, buah rontok dan membusuk, serta serangan penyakit seperti Patek (Antraknosa) dan busuk batang pada tanaman cabe. Penurunan produksi jagung disebabkan oleh curah hujan tinggi sehingga pada masa generatif banyak mucul ulat sehingga pembentukan tongkol tidak sempurna. Penurunan produksi kedelai terjadi karena banyak petani beralih menanam komoditi kacang tanah dan kacang hijau. Untuk Komoditi Cengkeh dan Tembakau juga mengalami peningkatan produksi meskipun tidak banyak. Hal ini terjadi karena adanya kegiatan PHT tanaman cengkeh dan Tembakau. Hasil perhitungan produksi pertanian komoditi unggulan pertriwulan sebagaimana ada pada lampiran.

2. Meningkatnya produksi hasil peternakan dengan indikator kinerja persentase peningkatan produksi hasil peternakan

Tabel 3.9
Pencapaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Peternakan

No.	Hasil Peternakan	Jumlah Produksi (Ton)		Peningkatan/ Penurunan Produksi (%)
		2024	2025	
1.	Daging	10,219.36	10,899.01	6.65
2.	Telur	8,260.26	7,968.12	-3.54
	Persentase Peningkatan Produksi Total			3,11
	Persentase Peningkatan Produksi			1,56
	Capaian Persentase Peningkatan Produksi (1,46)			106,64

Keterangan : Sumber data Dinas Pertanian

Peningkatan produksi hasil peternakan pada tahun 2025 mengalami peningkatan 1,56% atau dengan capaian 106,64% jika dibandingkan tahun 2024. Capaian ini berasal dari hasil produksi daging dan telur. Produksi daging tahun 2025 meningkat 6,65% jika dibandingkan tahun 2024, karena adanya peningkatan permintaan kebutuhan daging kurban, dampak dari penurunan wabah PMK, masyarakat sudah tidak takut lagi mengkonsumsi daging, serta program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) meningkatkan permintaan kebutuhan daging ternak. Sedangkan produksi telur di Tahun 2025 mengalami

penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2024 karena kebanyakan peternak mengurangi jumlah populasi ternak unggasnya karena peningkatan harga pakan yang tinggi. Selain itu, fluktuasi harga jual telur menjadi masalah lain bagi peternak karena tidak diimbangi dengan biaya produksi yang justru terus meningkat. Realisasi jumlah produksi hasil peternakan adalah sebagaimana ada pada lampiran dokumen laporan ini.

Capaian kinerja tahun 2025 merupakan kelanjutan dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan merupakan pondasi awal Renstra 2025-2029. Capaian kinerja tahun 2025 sebagai kelanjutan Renstra 2024-2026. Tahun 2025 merupakan tahun kedua dalam periode Renstra Perangkat Daerah 2024-2026 (yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah/ Renstra 2024-2026). Capaian kinerja di tahun 2025 menjamin kesinambungan program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Karena berada pada masa transisi, perhitungan relisasi kinerja tahun 2025 berdasarkan Renstra 2024-2026 dihitung sampai bulan September 2025, sedangkan realisasi kinerja sampai bulan Desember 2025 berdasarkan indicator kinerja Renstra baru sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja OPD. Disamping itu capaian kinerja tahun 2025 merupakan pondasi awal Renstra 2025-2029. Capaian kinerja tahun 2025, terutama dalam aspek Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) menjadi basis data evaluasi untuk merumuskan target, strategi, dan arah kebijakan pada Renstra 2025-2029. Tahun 2025 fokus pada penuntasan target Renstra 2024-2026 dan sekaligus melakukan cascading (penjabaran) kinerja untuk mendukung prioritas pembangunan nasional/daerah yang akan datang. Secara ringkas, hasil kerja di tahun 2025 memberikan data dan arah evaluasi yang diperlukan untuk merencanakan sasaran pembangunan pada Renstra 2025-2029, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Tahun Lalu

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
					2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tujuan	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	RPD 2024-2026	107,5	102,5	103	116,05	111,5	111,5*
2.	Sasaran	1. Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	RPD 2024-2026	-	0,175%	0,176%	0,070%	0,163%	-0,45%*
		2. Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase peningkatan produksi peternakan	RPD 2024-2026	-	1,8%	1,9%	-1,50%	1,39%	-20,99%*
3.	Tujuan	Meningkatnya Pendapatan Petani	Rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sektor pertanian	Renstra 2025-2029	-	-	1,155		1,150	1,39
4	Sasaran	1. Meningkatnya produksi pertanian komoditas unggulan	Persentase peningkatan Produksi Pertanian komoditas unggulan	Renstra 2025-2029	-	-	0,18%	0,070%	0,163%	0,142%
		2. Meningkatnya produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan	Renstra 2025-2029	-	-	1,46%	-1,50%	1,39%	1,56%

Keterangan : Sumber Data Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
* Realisasi sampai Bulan September 2025

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Renstra Perangkat Daerah 2024-2026

1. Realisasi kinerja indikator tujuan

   Indikator kinerja tujuan meningkatnya kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dimana Tahun 2023 sampai 2025 dari target sebagaimana pada Tabel 3.8 diatas menunjukan realisasi kinerja dari Tahun 2023 hingga 2025 mengalami tren yang menurun. Realisasi kinerja tahun 2023 merupakan NTP Propinsi Jawa Timur karena Dinas Pertanian belum menghitung sendiri. Untuk tahun 2024, Kabupaten Nganjuk baru menghitung NTP dengan realisasi 111,5 lebih rendah jika dibandingkan dengan NTP Propinsi Jawa Timur di Tahun 2023 dan di tahun 2025 Dinas Pertanian tidak melakukan perhitungan NTP, sehingga NTP yang dipakai adalah NTP 2024. Meskipun capaiannya belum bisa melampaui NTP Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, namun terealisasi lebih dari 100, hal ini berarti bahwa petani Kabupaten Nganjuk sedang berada dalam kondisi yang menguntungkan, artinya, pendapatan yang diperoleh dari hasil pertanian mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi dan bahkan dapat memberikan surplus untuk kebutuhan lainnya. Ini bisa menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan di kalangan petani.

2. Realisasi kinerja indikator sasaran

   a. Meningkatnya Produksi Pertanian

      Realisasi kinerja indikator sasaran persentase peningkatan produksi pertanian Tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan Tahun 2023. Dari tahun 2023 ke 2024 terjadi peningkatan produksi pertanian karena perubahan sistem cara budidaya tanaman yang semakin canggih, kebutuhan irigasi yang relatif cukup meskipun belum merata karena adanya pembangunan pompanisasi, perbaikan/rehabilitasi jaringan irigasi tersier meskipun belum maksimal, hama dan penyakit tanaman yang masih bisa dikendalikan, meningkatnya kesadaran petani tentang penggunaan bibit unggul/bersertifikat. Realisasi Persentase peningkatan produksi pertanian tahun 2025 terjadi penurunan

jika dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini terjadi karena perhitungan realisasi adalah sampai bulan September 2025 dimana sampai bulan September panen belum maksimal dengan pembandingnya produksi tahun 2024 adalah produksi selama 1 tahun, disamping itu dikarenakan selama tahun 2025 terjadi musim kemarau basah yang berdampak pada meningkatkan risiko gagal panen karena kelembaban tinggi memicu hama (wereng, busuk batang), penyakit (blas, kresek), genangan air yang merusak akar padi/palawija, serta menyulitkan panen dan pasca-panen (gabon, jamur), menurunkan kualitas gabah, dan mengacaukan pola tanam akibat hujan tak menentu. Jagung dan palawija seperti kacang-kacangan sulit tumbuh normal, sementara panen padi saat hujan membuat gabah sulit kering, mudah berjamur (gabon), dan kualitasnya turun.

b. Meningkatnya Produksi Peternakan

Realisasi kinerja indikator sasaran persentase peningkatan produksi peternakan Tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan Tahun 2024. Hal ini terjadi karena pembanding realisasi adalah tahun 2024 yang merupakan hasil produksi selama setahun sedangkan realisasi tahun 2025 merupakan realisasi sampai bulan September 2025. Produksi daging dipengaruhi oleh adanya wabah penyakit hewan seperti PMK dan LSD yang pernah mewabah di Tahun 2023. PMK adalah penyakit hewan menular akut yang disebabkan oleh virus. PMK berdampak signifikan pada sektor peternakan dan ekonomi, khususnya dalam produksi dan perdagangan daging sapi. LSD (Lumpy Skin Disease) adalah penyakit kulit yang menyerang sapi dan kerbau. Penyakit ini disebabkan oleh virus Lumpy Skin Disease Virus (LSDV). Karena adanya wabah tersebut pada tahun 2023 masyarakat takut untuk mengkonsumsi daging. Seiring berjalannya waktu, Dinas Pertanian berhasil menurunkan penyebaran PMK dan LSD dengan pelayanan kesehatan hewan Produksi peternakan tahun 2025 juga dipengaruhi oleh adanya peningkatan konsumsi protein hewani dari

daging dan telur untuk mencukupi kebutuhan permintaan makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan program dari pemerintah.

Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

1. Realisasi kinerja indikator tujuan

   Rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sektor pertanian pada tahun 2025 terealisasi 1,39. Tahun 2024 realisasi indicator tersebut adalah 1,150. Ini menunjukkan bahwa tingkat keuntungan atau efisiensi usaha tani pada tahun 2025 meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024. Ini artinya:

   - Ada peningkatan efisiensi dan keuntungan (Tahun 2025). Dengan rasio 1,39 artinya setiap Rp 1.000 biaya yang dikeluarkan (investasi/produksi), petani memperoleh pendapatan/penerimaan kotor sebesar Rp 1.390. Ini menunjukkan keuntungan bersih yang lebih besar dibandingkan tahun 2024.
   - Pada tahun 2024, rasionya 1,150, artinya setiap Rp1.000,00 biaya, pendapatan hanya Rp1.150,00. Kenaikan ke 1,39 pada 2025 menunjukkan ada perbaikan efisiensi produksi, peningkatan harga jual, atau penurunan biaya input.
   - Usaha Tani di Kabupaten Nganjuk Sangat Layak dengan Rasio > 1 (baik 1,150 maupun 1,39) menunjukkan usaha tani tersebut menguntungkan dan layak diusahakan. Namun, nilai 1,39 di tahun 2025 menunjukkan tingkat kelayakan yang jauh lebih baik daripada 1,150 di tahun 2024.

2. Realisasi kinerja indikator sasaran

   a. Meningkatnya Produksi Pertanian Komoditas Unggulan

      Realisasi kinerja indikator sasaran persentase peningkatan produksi pertanian komoditas unggulan Tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan Tahun 2023. Dari tahun 2023 ke 2024 terjadi peningkatan produksi pertanian karena perubahan sistem cara budidaya tanaman yang semakin canggih, kebutuhan irigasi yang relatif cukup meskipun belum merata karena adanya pembangunan

pompanisasi, perbaikan/rehabilitasi jaringan irigasi tersier meskipun belum maksimal, hama dan penyakit tanaman yang masih bisa dikendalikan, meningkatnya kesadaran petani tentang penggunaan bibit unggul/bersertifikat. Realisasi Persentase peningkatan produksi pertanian tahun 2025 terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini dikarenakan selama tahun 2025 terjadi musim kemarau basah yang berdampak pada meningkatkan risiko gagal panen karena kelembaban tinggi memicu hama (wereng, busuk batang), penyakit (blas, kresek), genangan air yang merusak akar padi/palawija, serta menyulitkan panen dan pasca-panen (gabon, jamur), menurunkan kualitas gabah, dan mengacaukan pola tanam akibat hujan tak menentu. Jagung dan palawija seperti kacang-kacangan sulit tumbuh normal, sementara panen padi saat hujan membuat gabah sulit kering, mudah berjamur (gabon), dan kualitasnya turun.

b. Meningkatnya Produksi Peternakan

Realisasi kinerja indikator sasaran persentase peningkatan produksi hasil peternakan Tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan Tahun 2024. Hal ini terjadi karena adanya wabah penyakit hewan menular PMK dan LSD. Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terjadi di Indonesia pada tahun 2023. PMK adalah penyakit hewan menular akut yang disebabkan oleh virus. PMK berdampak signifikan pada sektor peternakan dan ekonomi, khususnya dalam produksi dan perdagangan daging sapi. LSD (Lumpy Skin Disease) adalah penyakit kulit yang menyerang sapi dan kerbau. Penyakit ini disebabkan oleh virus Lumpy Skin Disease Virus (LSDV). Karena adanya wabah tersebut pada tahun 2023 masyarakat takut untuk mengkonsumsi daging. Seiring berjalannya waktu, Dinas Pertanian berhasil menurunkan penyebaran PMK dan LSD dengan pelayanan kesehatan hewan, disamping itu tahun 2024 mengalami peningkatan konsumsi daging untuk mencukupi kebutuhan permintaan makan bergizi gratis (MBG).

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra

Tabel 3.11
Target Kinerja Renstra
(berdasarkan RENSTRA 2024-2026 dan RENSTRA 2025-2029)

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target Renstra						
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2		3	4	5						
1.	Tujuan	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Renstra 2024-2026	102,5	103	103,5	-	-	-	-
2.	Sasaran	1. Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	Renstra 2024-2026	0,175%	0,176%	0,177%	-	-	-	-
		2. Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase peningkatan produksi peternakan	Renstra 2024-2026	1,8%	1,9%	2,0%	-	-	-	-
3.	Tujuan	Meningkatnya Pendapatan Petani	Rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sektor pertanian	Renstra 2025-2029	-	1,155	1,16	1,165	1,17	1,175	1,180%
4	Sasaran	1. Meningkatnya produksi pertanian komoditas unggulan	Persentase peningkatan Produksi Pertanian komoditas unggulan	Renstra 2025-2029	-	0,18%	0,25%	0,28%	0,33%	0,35%	0.37%
		2. Meningkatnya produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan	Renstra 2025-2029	-	1,46%	1,47%	1,48%	1,49%	1,50%	1,51%

Keterangan : Sumber Data Renstra 2024-2026 Dinas Pertanian
Renstra 2025-2029 Dinas Pertanian

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Target Akhir Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan (%)
1	2		3	4	5	6	7
1.	Tujuan	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Renstra 2024-2026	103,5	111,5	107,73
2.	Sasaran	1. Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	Renstra 2024-2026	0,177%	-0,45%	-254,24
		2. Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase peningkatan produksi peternakan	Renstra 2024-2026	2,0%	-20,99%	-1.049,50

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Target Akhir Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan (%)
1	2		3	4	5	6	7
3.	Tujuan	Meningkatnya Pendapatan Petani	Rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sektor pertanian	Renstra 2025-2029	1,180%	1,39	11,78
4	Sasaran	1. Meningkatnya produksi pertanian komoditas unggulan	Persentase peningkatan Produksi Pertanian komoditas unggulan	Renstra 2025-2029	0,37%	0,14%	37,84
		2. Meningkatnya produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan	Renstra 2025-2029	1,51%	1,56%	103,31

Keterangan : Sumber Data Dinas Pertanian Kab. Nganjuk
Target akhir Renstra 2024-2026 adalah Tahun 2026
Target akhir Renstra 2025-2029 adalah Tahun 2030

Persentase tingkat kemajuan realisasi kinerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Tingkat\ Kemajuan = \frac{Realisasi\ Kinerja\ Tahun\ (n)}{Target\ pada\ Tahun\ Akhir\ Renstra}\ x\ 100\%$$

Analisis terhadap perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra adalah sebagai berikut :

Renstra Perangkat Daerah 2024-2026.

1. Realisasi indicator tujuan

   Target akhir Rentra Tahun 2025 adalah 103 terealisasi 111,5 dengan capaian kinerja 107,73%. Predikat pencapaian NTP termasuk kategori Sangat Baik. Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) lebih dari 100 menunjukkan bahwa daya beli petani terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan dalam proses produksi pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran yang mereka terima dari hasil jualan produk pertanian mereka. Artinya, pendapatan yang diperoleh dari hasil pertanian mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi dan bahkan dapat memberikan surplus untuk kebutuhan lainnya. Ini bisa menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan di kalangan petani.

2. Realisasi indicator sasaran

   a. Meningkatnya Produksi Pertanian

Meningkatnya Produksi Pertanian dengan indikator kinerja persentase peningkatan produksi pertanian. Peningkatan produksi pertanian sebesar -0,45% tahun 2025, lebih rendah jika dibandingkan target akhir Renstra 2024-2026 sebesar -254,24%. Capaian hasil produksi pertanian berada jauh di bawah target yang telah ditetapkan pada akhir periode rencana strategis (Renstra) atau perjanjian kinerja. Karena perhitungan relisasi adalah sampai bulan September 2025, sementara panen belum maksimal. Disamping itu produksi ini dipengaruhi intensitas curah hujan yang tinggi di Tahun 2025 mengakibatkan peningkatan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), pertumbuhan terhambat, dan terjadi gagal panen.

b. Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir renstra mengalami penurunan 1.049,50%. Capaian ini berasal dari hasil produksi daging dan telur. Capaian ini belum bisa melampaui terget akhir Renstra karena perhitungan realisasi tahun 2025 adalah hasil sampai bulan September 2025, disamping itu kebanyakan peternak mengurangi jumlah populasi ternak unggasnya karena peningkatan harga pakan yang tinggi. Selain itu, fluktuasi harga jual telur menjadi masalah lain bagi peternak karena tidak diimbangi dengan biaya produksi yang justru terus meningkat.

Renstra Perangkat Daerah 2025-2029.

1. Realisasi indicator tujuan

Rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sektor pertanian pada tahun 2025 terealisasi 1,39. Target akhir Renstra adalah 1,180. Capaian Ini menunjukkan bahwa tingkat keuntungan atau efisiensi usaha tani pada tahun 2025 dengan rasio 1,39 artinya setiap Rp 1.000,00 biaya yang dikeluarkan (investasi/produksi), petani memperoleh pendapatan/penerimaan kotor sebesar Rp 1.390,00. Rasio > 1 menunjukkan usaha tani tersebut menguntungkan dan layak diusahakan.

Nilai 1,39 di tahun 2025 menunjukkan tingkat kelayakan yang jauh lebih baik daripada target akhir Renstra 1,180.

2. Realisasi kinerja indikator sasaran

   a. Meningkatnya Produksi Pertanian Komoditas Unggulan

      Realisasi peningkatan produksi pertanian sebesar 37,84% tahun 2025 dengan tingkat lebih rendah jika dibandingkan target akhir Renstra. Capaian hasil produksi pertanian berada jauh di bawah target yang telah ditetapkan pada akhir periode rencana strategis (Renstra) atau perjanjian kinerja. Penurunan produksi ini terjadi karena intensitas curah hujan yang tinggi di Tahun 2025 mengakibatkan peningkatan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), pertumbuhan terhambat, dan terjadi gagal panen.

b. Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan

   Realisasi kinerja indikator sasaran persentase peningkatan produksi hasil peternakan Tahun 2025 sebesar 103,31% dapat melampaui target akhir Renstra. Dinas Pertanian berhasil menurunkan penyebaran PMK dan LSD dengan pelayanan kesehatan hewan, disamping itu tahun 2025 mengalami peningkatan konsumsi daging untuk mencukupi kebutuhan permintaan makan bergizi gratis (MBG).

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standart Nasional

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Nasional
(berdasarkan Rentra 2024-2026)

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Standar Nasional/ Provinsi	Realisasi 2025	Posisi Kinerja
1.	Tujuan	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	118,96*	111,5	Dibawah
2.	Sasaran	1. Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	-	-0,45%	-
		2. Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase peningkatan produksi peternakan	1,81%***	1,56%	Dibawah

Keterangan : * Sumber Data BPS Provinsi Jawa Timur
*** Sumber Data Dinas Pertanian Kab. Tulungagung

Berdasarkan tabel diatas, Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Nganjuk berada dibawah NTP Propinsi Jawa Timur. Tingkat kesejahteraan dan daya beli petani di Kabupaten Nganjuk tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata petani Propinsi Jawa Timur rata-rata. Hal ini mengindikasikan kenaikan harga produk yang dijual petani lebih kecil daripada kenaikan biaya produksi dan konsumsi rumah tangga mereka.

Indikator kinerja sasaran meningkatnya Produksi Pertanian adalah persentase peningkatan produksi pertanian di kabupaten tetangga data produksi pertanian belum rilis, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian Dinas Pertanian. Untuk komoditi pangan utamanya komoditi padi Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan produksi sebesar 8,685%, sedangkan Kabupaten Ngawi adalah 1,28%. Capaian peningkatan produksi pertanian utamanya komoditi padi di Kabupaten Nganjuk berada diatas Kabupaten Ngawi, peningkatan produksi padi Kabupaten Ngawi diperkirakan masih berada di atas Kabupaten Nganjuk. Meskipun peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk lebih tinggi dari Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ngawi tetap sebagai lumbung padi pada tahun 2025, produksi padi di Kabupaten Ngawi diproyeksikan mencapai sekitar 775,47 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG) sedangkan Kabupaten Nganjuk 556 ribu ton. Meskipun posisinya dilaporkan sempat turun ke peringkat 4 di Jawa Timur, volume produksinya tetap sangat tinggi. Persentase peningkatan produksi pertanian utamanya komoditi padi Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Ngawi menunjukkan kinerja pertanian yang positif

Persentase peningkatan produksi peternakan di Kabupaten Tulungagung lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk berfokus pada pengembangan agribisnis peternakan sapi potong, namun secara persentase peningkatan, Kabupaten Tulungagung lebih dominan. Populasi sapi potong dan sapi perah di Tulungagung cukup besar. Kabupaten Tulungagung dikenal sebagai salah satu daerah dengan populasi ternak yang signifikan di Jawa Timur, bahkan mendapatkan penghargaan sebagai salah satu penghasil telur dan susu terbanyak. Secara umum peningkatan produksi pertanian dan peternakan Kabupaten Nganjuk

untuk tahun 2025 berdasarkan Renstra 2024-2026 berada di bawah kabupaten tetangga karena tahun 2025 berada pada tahun transisi dengan Renstra 2025-2029, untuk tahun 2025 berdasarkan renstra lama, perhitungan realisasi adalah sampai bulan September 2025.

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Nasional
(berdasarkan RENSTRA 2025-2029)

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Standar Nasional/ Provinsi	Realisasi 2025	Posisi Kinerja
1.	Tujuan	Meningkatnya Pendapatan Petani	Rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sektor pertanian	-	1,39	-
2.	Sasaran	1. Meningkatnya produksi pertanian komoditas unggulan	Persentase peningkatan Produksi Pertanian komoditas unggulan	Data belum rilis	0,142%	-
		2. Meningkatnya produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan	1,81%***	1,56%	Dibawah

Keterangan : *** Sumber Data Dinas Pertanian Kab. Tulungagung

Berdasarkan tabel diatas, Rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sektor pertanian secara Nasional, propinsi ataupun Kabupaten yang ada di Jawa Timur tidak ada yang mengukur indikator tersebut.

Persentase peningkatan produksi pertanian komoditas unggulan di Kabupaten Nganjuk sebesar 0,142%, sedangkan propinsi Jawa Timur untuk data peningkatan produksi pertanian belum rilis di BPS Propinsi Jawa Timur.

Persentase peningkatan produksi hasil peternakan di Kabupaten Tulungagung lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk berfokus pada pengembangan agribisnis peternakan sapi potong, namun secara persentase peningkatan, Kabupaten Tulungagung lebih dominan. Populasi sapi potong dan sapi perah di Tulungagung cukup besar. Kabupaten Tulungagung dikenal sebagai salah satu daerah dengan populasi ternak yang signifikan di Jawa Timur, bahkan mendapatkan penghargaan sebagai salah satu penghasil telur dan susu terbanyak.

A.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi faktor penyebab tercapai atau tidaknya kinerja dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut ini.

Tabel 3.15
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Capaian (%)	Status	Faktor Penyebab	Upaya Tindak Lanjut
1.	Tujuan	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Renstra 2024-2026	108,26%	Tercapai	Struktural	• Meningkatan Produktivitas dan Mutu Hasil Pertanian • Efisiensi Biaya Produksi • Penguatan Kelembagaan Petani • Peningkatan Infrastruktur
2.	Sasara	1. Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	Renstra 2024-2026	-225,11%	Tidak Tercapai	Struktural	• Intensifikasi Pertanian • Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi • Penguatan SDM dan Kelembagaan • Kebijakan Khusus
		2. Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase peningkatan produksi peternakan	Renstra 2024-2026	-1.104,74%	Tidak Tercapai	Struktural	• Peningkatan Kualitas dan Populasi Ternak • Manajemen Pakan dan Nutrisi • Pelayanan Kesehatan Hewan
3.	Tujuan	Meningkatnya Pendapatan Petani	Rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sektor pertanian	Renstra 2025-2029	120,35%	Tercapai	Struktural	• Meningkatan Produktivitas dan Mutu Hasil Pertanian • Efisiensi Biaya Produksi • Penguatan Kelembagaan Petani • Peningkatan Infrastruktur

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Capaian (%)	Status	Faktor Penyebab	Upaya Tindak Lanjut
4	Sasaran	1. Meningkatnya produksi pertanian komoditas unggulan	Persentase peningkatan Produksi Pertanian komoditas unggulan	Renstra 2025-2029	78,89%	Tidak tercapai	Struktural	• Intensifikasi Pertanian • Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi • Penguatan SDM dan Kelembagaan • Kebijakan Khusus
		2. Meningkatnya produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan	Renstra 2025-2029	106,64%	Tercapai	Struktural	• Peningkatan Kualitas dan Populasi Ternak • Manajemen Pakan dan Nutrisi • Pelayanan Kesehatan Hewan

Upaya strategis tindak lanjut OPD untuk meningkatkan capaian NTP maupun rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sektor pertanian antara lain:

1. Peningkatan Produktivitas dan Mutu Hasil (Meningkatkan It):
    - Intensifikasi Pertanian dengan menerapkan teknologi mesin, penggunaan bibit unggul, pupuk yang tepat, dan Pengendalian Hama Penyakit Terpadu (PHPT).
    - Diversifikasi usaha dengan mendorong petani untuk melakukan diversifikasi agar tidak bergantung pada satu komoditas saja.
    - Pendampingan Kelompok Tani dengan pembinaan kelompok tani untuk meningkatkan mutu hasil produksi agar mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.
2. Efisiensi Biaya Produksi (Menurunkan Ib):
    - Memastikan distribusi pupuk subsidi tepat sasaran untuk mengurangi biaya budidaya.
    - Fasilitasi Saprodi dengan memberikan bantuan sarana produksi (saprodi) yang terjangkau bagi petani.
3. Pemasaran dan Kelembagaan:
    - Menjembatani antara petani dan Bulog dalam mengoptimalkan serapan gabah, terutama saat panen raya untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani agar tidak jatuh, sekaligus memastikan ketersediaan pangan nasional.
    - Penguatan Kelembagaan Petani dengan penyelenggaraan pelatihan, Gerakan PHT tanaman, pelaksanaan temuwicara, Pemberdayaan Kelembagaan dengan mengoptimalkan peran kelompok tani (Poktan) dan Gapoktan dan peningkatan kelas kelompok.
4. Kebijakan dan Perencanaan:
    - Menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD tahunan dengan memperhatikan hasil evaluasi NTP tahun sebelumnya.
    - Fokus pada komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks, seperti padi, jagung, bawang merah dan tembakau.
    - Meningkatkan intensitas penyuluhan untuk adopsi teknologi baru.

5. Peningkatan Infrastruktur:
    - Memperbaiki sarana pengairan untuk menjamin keberhasilan tanam.
    - Perbaikan Jalan Usaha Tani
    - Fasilitasi Optimalisasi Lahan (OPLAH)

Dinas Pertanian melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan persentase produksi pertanian (indicator sasaran berdasarkan Renstra 2024-2026) dan persentase produksi pertanian komoditas unggulan (indicator sasaran berdasarkan Renstra 2025-2029). Berikut adalah upaya-upaya utama yang dilakukan Dinas Pertanian:

1. Intensifikasi Pertanian (Peningkatan Produktivitas)
    - Memfasilitasi penggunaan benih bersertifikat dan varietas unggul yang tahan hama serta memiliki potensi hasil tinggi.
    - Memastikan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan data e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) agar tepat sasaran.
    - Penyuluhan dan pendampingan petani untuk menerapkan standar budidaya yang baik agar produktivitas optimal.
    - Gerakan pengendalian hama secara terpadu dan intensif untuk mencegah gagal panen.
2. Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi
    - Memfasilitasi pemberian bantuan alat mesin pertanian (alsintan) seperti traktor, transplanter, dan combine harvester, kendaraan angkut roda tiga untuk efisiensi waktu dan hasil.
    - Membangun atau memperbaiki jaringan irigasi, serta bantuan pompa air untuk mengoptimalkan lahan (OPLAH).
    - Mendorong penggunaan teknologi seperti drone untuk penyemprotan dan traktor untuk efisiensi.
3. Perluasan Lahan (Ekstensifikasi) dan Indeks Tanam
    - Mendorong pola tanam intensif (IP400) agar lahan yang dulunya hanya ditanami 1-2 kali setahun, bisa ditanami 3-4 kali setahun.

4. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan
    - Meningkatkan kapasitas penyuluh dan intensitas pendampingan petani di lapangan.
    - Memfasilitasi kelompok tani/gapoktan dengan pelaksanaan sekolah lapang, Gerakan PHT tanaman, pelaksanaan magang petani muda.
5. Kebijakan Khusus dan Perencanaan
    - Melakukan percepatan tanam terutama pada puncak musim hujan untuk memaksimalkan hasil.
    - Menyusun rencana kerja tahunan yang fokus pada komoditas unggulan daerah.

Berikut adalah beberapa upaya utama yang dilakukan Dinas Pertanian untuk meningkatkan produksi peternakan (indicator sasaran berdasarkan Renstra 2024-2026) dan hasil peternakan (indicator sasaran berdasarkan Renstra 2025-2029) :

1. Peningkatan Kualitas dan Populasi Bibit (Genetik)
    - Program intensif (seperti SIWAB/SIKOMANDAN) dilakukan untuk percepatan populasi sapi potong guna memenuhi kebutuhan daging.
    - Fasilitasi kelompok usaha peternakan dengan penyediaan bibit ternak berkualitas baik untuk meningkatkan produktivitas.
    - Penerapan kebijakan untuk mencegah pemotongan sapi/kerbau betina produktif guna menjaga populasi.
2. Manajemen Pakan dan Nutrisi
    - Fasilitasi pelatihan pembuatan pakan bagi peternak untuk membuat pakan alternative dan silase.
    - Fasilitasi penyaluran insentif pakan berupa pakan jadi untuk peternak ayam.
3. Kesehatan Hewan dan Pembinaan Kelompok
    - Optimalisasi Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia.

- Pelayanan kesehatan hewan untuk menekan angka kematian ternak.

Renstra Perangkat Daerah 2024-2026

Tujuan Perangkat Daerah

Capaian kinerja indikator tujuan Dinas Pertanian Tahun 2025 adalah 108,26% memiliki kategori **"Tercapai"**, Peningkatan Nilai Tukar Petani pada tahun 2025 didukung oleh adanya kebijakan dari pemerintah terkait serap gabah oleh Bulog dan penetapan HPP Harga Pembelian Pemerintah Gabah Kering Panen (GKP) tingkat petani sebesar untuk melindungi pendapatan petani dan menjaga stabilitas harga saat panen raya

Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja indicator sasaran Dinas Pertanian Tahun 2025 sebesar -255,11% untuk persentase peningkatan produksi pertanan dan -1.104,74% untuk persentase peningkatan produksi peternakan. Capaian kinerja kedua indicator sasaran tersebut masuk kategori **"Tidak Tercapai"**, karena perhitungan sampai bulan September 2025 dibandingkan dengan realisasi 1 tahun 2024.. Karena Tahun 2025 merupakan masa transisi Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029. Dimana cut off kinerja berdasarkan Renstra lama adalah Bulan September 2025. Dimana perbandingan kinerja sampai Bulan September 2025 dibandingkan realisasi kinerja selama 1 tahun 2024 adalah tidak tercapai.

Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Capaian Tujuan Dinas Pertanian (Rensta Perangkat Daerah 2025-2029) sebagaimana yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, Rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sektor pertanian terealisasi 120,35% dengan kategori **"Tercapai"**. disebabkan oleh pada tahun 2025 harga-harga hasil pertanian relative cukup baik dengan adanya penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) oleh pemerintah.

Capaian kinerja indicator sasaran adalah 78,89% untuk sasaran meningkatkan produksi pertanian komoditas unggulan (Renstra Perangkat Daerah 2025-2029), berdasarkan skala ordinal, predikat pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk dalam kategori **"Tidak Tercapai".** Hal ini disebabkan

karena tahun 2025 terjadi musim kemarau basah yang berdampak pada meningkatkan risiko gagal panen karena kelembaban tinggi memicu hama (wereng, busuk batang), penyakit (blas, kresek), genangan air yang merusak akar padi/palawija, serta menyulitkan panen dan pasca-panen (gabon, jamur), menurunkan kualitas gabah, dan mengacaukan pola tanam akibat hujan tak menentu.

Capaian realisasi kinerja indikator sasaran persentase peningkatan produksi hasil peternakan (Renstra 2025-2029) adalah 106,64%, berdasarkan skala ordinal, predikat pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk dalam kategori **"Tercapai"**. Kondisi ini menunjukkan bahwa Dinas Pertanian telah berhasil menurunkan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan ternak melalui kegiatan vaksinasi pada hewan ternak serta pemberian pelayanan kesehatan hewan ternak yang dilakukan di puskeswan. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pengobatan hewan ternak yang sakit, pemberian vitamin, obat cacing dan penyemprotan desinfektan pada kandang. Pelayanan kesehatan dilakukan secara berkala dengan pelaksanaan dari rumah ke rumah. Dan juga kenaikan permintaan pemenuhan daging dan telur untuk memenuhi kebutuhan protein hewani.

A.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.16
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2		3	4	5	6	7
1	Tujuan	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Renstra 2024-2026	108,26%	60,17%	48,09%
2	Sasaran	1. Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	Renstra 2024-2026	-255,11%	60,17%	-315,28%
		2. Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase peningkatan produksi peternakan	Renstra 2024-2026	-1.104,74%	60,17%	-1.164,91%

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2		3	4	5	6	7
3	Tujuan	Meningkatnya Pendapatan Petani	Rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sektor pertanian	Renstra 2025-2029	120,35%	91,43%	33,17%
4	Sasaran	1. Meningkatnya produksi pertanian komoditas unggulan	Persentase peningkatan Produksi Pertanian komoditas unggulan	Renstra 2025-2029	78,89%	91,43%	-12,54%
		2. Meningkatnya produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan	Renstra 2025-2029	106,64%	91,43%	15,21%

Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk

Persentase tingkat kemajuan realisasi kinerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi = Capaian Kinerja – Persentase Penyerapan Anggaran

Dari Tabel 3.16 diatas bisa diketahui bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber dana untuk pencapaian tujuan Dinas Pertanian berdasarkan Renstra 2024-2026 maupun Renstra 2025-2029 serta pencapaian sasaran meningkatnya produksi peternakan (Renstra 2024-2026) dan meningkatnya produksi hasil peternakan (Renstra 2025-2029) menghasilkan nilai posifit, hal menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tersebut efisien. Artinya adalah capaian kinerja lebih tinggi dari pengeluaran. Terjadi efisiensi di mana target pekerjaan tercapai dengan biaya yang lebih rendah dari yang dianggarkan.

Sedangkan pada pencapaian sasaran meningkatnya produksi pertanian (Renstra 2024-2026) dan meningkatnya produksi hasil pertanian (Renstra 2024-2026) memiliki tingkat efiensi penggunaan sumber dana negative. Hal ini mengindikasikan kondisi persentase penyerapan anggaran lebih besar daripada capaian kinerja, dan ketidakefisienan atau pemborosan anggaran.

A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.17
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PERENCANAAN Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6	7		
1	**Tujuan :** Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Renstra 2024-2026					
2	**Sasaran :** 1. Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	Renstra 2024-2026	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas Pertanian**	**82 Nilai**	**80,65 Nilai**	**98,35%**
				1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	41 Dokumen	32 Dokumen	78,04%
				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun	81 Dokumen	75 Dokumen	92,59%
				3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	4 Dokumen	57,15%
				4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	201 Unit	100Unit	49,75%
				5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemeliharaan daerah yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	100%
				6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	171 Unit	125 Unit	73,10%
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Persentase sarana pertanian yang digunakan**	**100%**	**73,99%**	**73,99%**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PERENCANAAN Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN %
1	2	3	4	5		6	7		
				1.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang diawasi dan didampingi terkait penggunaan sarana pendukung pertanian	1.490 Kelp. Tani	1.490 Kelp. Tani	100%
				2.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman Berkualitas	3 Kegiatan	2 Kegiatan	66,6%
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		**Persentase Prasarana Pertanian yang digunakan**	**100%**	**0**	**0%**
				1.	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian	8 Unit	0 Unit	0%
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		**Persentase Pengendalian dan Penanganan bencana Pertanian**	**100%**	**68,46%**	**68,46%**
				1.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan pertanian yang dilakukan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1.475 Ha	1.013,5 Ha	68,71%
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		**Persentase perizinan usaha pertanian yang direkomendasikan**	**100%**	**100%**	**100%**
				1.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendai usulan izin usaha yang diterbitkan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		**Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya**	**1.54%**	**1.21%**	**78,57%**
				1.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pelatihan	25 Kelp. Tani	23 Kelp. Tani	92%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PERENCANAAN Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN %
1	2	3	4	5		6	7		
	2. Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase peningkatan produksi peternakan	Renstra 2024-2026	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		**Persentase sarana pertanian yang digunakan**	**100%**	**73,99%**	**73,99%**
				1.	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		**Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**10%**	**-42,8%**	**-428%**
				1.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ternak yang ditangani	80.000 Ekor	64.323 Ekor	80,40%
				2.	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan dalam daerah	4 Laporan	3 Laporan	75%
				3.	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	1 Laporan	100%
				4.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah laporan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	2 Laporan	2 Laporan	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PERENCANAAN Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN %
1	2	3	4	5		6	7		
3	**Tujuan:** Meningkatnya Pendapatan Petani	Rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sector pertanian	Renstra 2025-2029						
4	**Sasaran :** 1. Meningkatnya produksi pertanian komoditas unggulan	Persentase peningkatan Produksi Pertanian komoditas unggulan	Renstra 2025-2029	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**81 Nilai**	**80,65 Nilai**	**99.57%**
				1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	100%
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	9 Laporan	100%
				2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	217 Orang/ bulan	216 Orang/ bulan	100%
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
				3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PERENCANAAN Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN %
1	2	3	4	5		6	7		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	100%
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	100%
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	11 Laporan	91.67%
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan	78 Laporan	97.50%
				4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	201 Unit	201 Unit	100%
				5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
				6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	98 Unit	78 Unit	79.59%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PERENCANAAN Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN %
1	2	3	4	5		6	7		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 Unit	63 Unit	75.90%
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	14 Unit	13 Unit	100%
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		**Persentase ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan pupuk**	**100%**	**85.48%**	**100%**
						Persentase alsintan dalam kondisi baik	**90%**	**98%**	**108.89%**
						Persentase Petani yang menggunakan bibit unggul	**62%**	**62.70%**	**101.13%**
				1.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	1 Laporan	94.12%
						Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	100%
			.	2.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
						Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	3 VUB	3 VUB	100%
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		**Persentase Prasarana Pertanian dalam kondisi baik**	**100%**	**100%**	**100%**
				1.	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	8 Unit	7 Unit	87.50%
						Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 unit	1 Unit	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PERENCANAAN Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN %
1	2	3	4	5		6	7		
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		**Persentase Serangan Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) yang tertangani**	**100%**	**100%**	**100%**
				1.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1.325 ha	1.325 ha	100%
						Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	100 ha	100 Ha	100%
						Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50 ha	50 Ha	100%
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		**Persentase izin usaha pertanian yang terfasilitasi penerbitan NIB**	**100%**	**100%**	**100%**
				1.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Standart Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						jumlah penilaian kelayakan dan pemberian teknis isin usaha pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	1 Laporan	100%
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		**Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya**	**1.54%**	**1.54%**	**94.81%**
				1.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Unit	20 Unit	100%
						Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	27 Unit	27 Unit	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PERENCANAAN Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN %
1	2	3	4	5		6	7		
						Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	54 Unit	54 Unit	100%
						Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi	20 Unit	20 Unit	100%
						Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	151 Orang	149 Orang	98.68%
						Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan ka0pasitasnya	3 Unit	3 Unit	100%
	2. Meningkatnya produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan	RENSTRA 2025-2029	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		**Persentase Peningkatan Pupulasi ternak Ruminansia**	**1%**	**0.81%**	**81.82%**
						Persentase Peningkatan Populasi Unggas	**2.02%**	**1.89%**	**93.56%**
				1.	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan	1%	-1.68%	100%
						Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	2.02%	1.89%	100%
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		**Persentase terbitnya rekomendasi usaha peternakan**	**100%**	**100%**	**100%**
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		**Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan**	**10%**	**12.79%**	**127.70%**
				1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	4 Laporan	4 Laporan	100%
						Jumlah Wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PERENCANAAN Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN %
1	2	3	4	5		6	7		
				2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	4 Laporan	4 Laporan	100%
				3.	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten.Kota	jumlah pelayanan jasa laboratorium	1 Laporan	1 Laporan	100%
						Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan	100%
				4.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	100%

Analisis terhadap pencapaian sasaran Dinas Pertanian didukung oleh program-program sebagai berikut:

Renstra Perangkat Daerah 2024-2026.

a. Sasaran Meningkatkan Produksi Pertanian diukur dengan indikator kinerja persentase peningkatan produksi pertanian didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Target	Realisasi	Capaian		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Sakip Dinas Pertanian	82	80,65	98,35%	Dilaksanakannya koordinasi rutin dengan bidang-bidang	1. Perencanaan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan 2. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaanya

Dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Nilai SAKIP Dinas Pertanian” yang ditargetkan pada Tahun 2025 sebesar 82 Nilai realisasinya adalah 80,65 Nilai dengan kategori A (Memuaskan), penilaian dilakukan pada komponen evaluasi AKIP berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatannya dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30%	24,60
2.	Pengukuran Kinerja	30%	23,70
3.	Pelaporan Kinerja	15%	11,85
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,50
	Jumlah	100%	80,65

Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain:

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sebanyak 41 dokumen, terealisasi 41 dokumen antara lain
   a. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 20 dokumen , terdiri dari:
      1. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025
      2. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026
      3. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027
      4. Dokumen Renstra Tahun 2025-2029
      5. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025
      6. Dokumen Indikator Kinerja Utama
      7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2025
      8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2025
      9. Dokumen Anggaran Kas Tahun 2025
      10. Dokumen Anggaran Kas Perubahan Tahun 2025
      11. Rencana Aksi Tahun 2025
      12. Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025
      13. Dokumen RKA Perubahan Tahun 2025
      14. Dokumen RKA Tahun 2026
      15. Dokumen RKA Efisiensi Tahun 2026
      16. Dokumen Register Risiko Tahun 2025
      17. Dokumen SOP Perencanaan

18. Dokumen Gender Tahun 2026

b. Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 12 laporan, terdiri dari:
    1. Laporan Capaian Kinerja Triwulan I TA 2025
    2. Laporan Capaian Kinerja Triwulan II TA 2025
    3. Laporan Capaian Kinerja Triwulan III TA 2025
    4. Evaluasi Renja Triwulan I TA 2025
    5. Evaluasi Renja Triwulan II TA 2025
    6. Evaluasi Renja Triwulan III TA 2025
    7. Laporan Triwulan I Pengelola Risiko
    8. Laporan Triwulan II Pengelola Risiko
    9. Laporan Triwulan III Pengelola Risiko

c. Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ada 9 Laporan, terdiri dari :
    1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024
    2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2024
    3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2024
    4. Laporan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim 2025
    5. Laporan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2025

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan realisasi jumlah dokumen keuangan keuangan yang disusun dengan target sebanyak 81 dokumen, terealisasi 81 dokumen, yaitu:
    a. Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (25 Dokumen)
    b. Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (40 Dokumen)
    c. Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 Dokumen)
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan keluaran jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah dengan target 7 dokumen dan terealisasi 7 dokumen yang meliputi :
    a. Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
c. Penyediaan bahan logistic kantor
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
e. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
f. Fasilitasi kunjungan tamu
g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan keluaran jumlah barang milik perangkat daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan sejumlah 100 unit dari sub kegiatan pengadaan mebel.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan keluaran jumlah jasa penunjang urusan pemeliharaan daerah yang tersedia sebanyak 3 jenis yang sudah terealisasi semua yang didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan keluaran jumlah barang milik perangkat daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara sebanyak 171 unit, dan terealisasi sebanyak 125 unit yang meliputi sub kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 1 unit
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan target 94 unit dan terealisasi sebanyak 74 unit
   c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya sebanyak 67 unit terealisasi 59 unit
   d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 4 unit

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Target	Realisasi	Capaian		
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Sarana yang digunakan	100%	73,99%	73,99%	Harga pupuk bersubsidi lebih murah sehingga mendorong petani untuk membeli pupuk bersubsidi	1. Keterbatasan kuota pupuk bersubsidi 2. Kesalahan dalam input data pada E-RDKK 3. Adanya perubahan kebijakan terkait penyaluran pupuk bersubsidi

Dalam pelaksanaan program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan indikator persentase sarana yang digunakan terealisasi 73,99% dengan realisasi pupuk sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JENIS PUPUK					JUMLAH
		UREA	NPK	ZA	NPK FORMULA	ORGANIK	
1.	Alokasi Pupuk	31.131	25.864		3,15	1.262	58572
2.	Realisasi Pupuk	23.512	19.824		0	1.035,59	43336
	Persentase sarana yang digunakan = $\frac{\text{Realisasi pupuk}}{\text{Alokasi Pupuk}}$ x 100% = $\frac{43336}{58572}$ x 100%						73,99%

Keterangan :Data sampai dengan Bulan Agustus 2025

Capaian kinerja ini berdasarkan perbandingan realisasi dan alokasi pupuk bersubsidi dari laporan realisasi pupuk bersubsidi yang sudah diverifikasi tim verval kecamatan dan tim verval pusat. Realisasinya berdasarkan SK Alokasi Tahun 2025. Dari target 100% terealisasi sejumlah 73,99%. Dasar penentuan alokasi pupuk bersubsidi di Indonesia tahun 2025 adalah Keputusan Menteri Pertanian Nomor 644/KPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025. Alokasi pupuk subsidi tahun 2025 menyesuaikan dengan anggaran yang tetap. Capaian Program ini didukung oleh kegiatan antara lain:

1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan indikator jumlah kelompok tani yang diawasi dan didampingi terkait penggunaan sarana pendukung pertanian sebanyak 1.490 kelompok tani. Jumlah petani yang terfasilitasi penyusunan e-RDKK sebanyak 1.490 kelompok tani. Kegiatan ini didukung sub kegiatan :
    a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi dengan indikator jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik Lokasi sebanyak 17 laporan dan terealisasi 0 laporan.
    a. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian dengan keluaran jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian sebanyak 9 laporan pupuk dari distributor dan laporan verval.
2. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan keluaran jumlah kegiatan pengelolaan sumber genetik tanaman berkualitas dengan target 3 Kegiatan. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
    a. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman dengan indikator Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman sebanyak 2 dokumen,
    b. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman dengan indikator jumlah pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman sudah dilaksanakan 3 kegiatan sosialisasi manajemen budidaya tanaman sehat bawang merah di Poktan Desa Mojorembun, desa mojorembun Rejoso dengan output pengenalan manajemen budidaya tanaman sehat bawang merah,
    c. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman dengan indikator jumlah SDG Tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian sebanyak 2 VUB. Sub kegiatan ini tercapai dengan melaksanakan proses pendaftaran varietas unggul durian, dan

diterbitkannya sertifikat, pelaksanaan bimtek sambung pucuk varietas unggul baru buah local, pengembangan benih di UPT Pembenihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Target	Realisasi	Capaian		
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang digunakan	100%	0	0	Pemeliharaan prasarana pertanian secara rutin agar dapat dimanfaatkan secara optimal	Anggaran untuk pembangunan prasarana pertanian terbatas

Dalam pelaksanaan program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dengan indikator persentase prasarana pertanian yang digunakan belum terealisasi. Capaian Program ini didukung oleh kegiatan antara lain:

a. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan indikator jumlah pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian sejumlah 9 unit dan belum terealisasi sampai bulan September 2025.

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Target	Realisasi	Capaian		
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanganan bencana Pertanian	100%	68,46%	68,46%	Adanya koordinasi yang baik dengan kelompok sasaran kegiatan	1. Kurangnya SDM Penanggulangan Hama 2. Antusiasme petani mengikuti kegiatan asuransi usaha tani masih kurang 3. Adanya perubahan mapping kegiatan yang

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Target	Realisasi	Capaian		dananya bersumber dari DAK pusat 4. Motivasi petani untuk melakukan gerdal mulai berkurang

Dalam pelaksanaan Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan indikator persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana dari target 100%, sampai bulan September 2025 teralisasi 68,46%. Luas area yang dapat ditanggulangi adalah sebagaimana lampiran

Capaian program ini didukung oleh kegiatan:

a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja luas lahan pertanian yang dilakukan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dengan target 1.475 ha terealisasi 1.013,5 ha. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan:
   1. Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan indikator jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan dengan target 913,5 ha.
   2. Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan indikator jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang ditangani dengan target 100 ha dan sudah terealisasi.
   3. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan

indikator kinerja jumlah luasan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dengan target 50 ha dan belum terealisasi.

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Target	Realisasi	Capaian		
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase perizinan usaha pertanian yang direkomendasikan	100%	100%	100%	Adanya koordinasi yang baik dengan kelompok sasaran kegiatan	Bermunculan pelaku usaha perikanan baru di wilayah yang belum terjangkau dikarenakan keterbatasan SDM

Dalam pelaksanaan Program Perizinan Usaha Pertanian dengan indikator persentase perizinan usaha pertanian yang direkomendasikan dari target 100% sudah terealisasi 100%. Usaha pertanian yang mendapat rekomendasi adalah sebagaimana pada lampiran.

Capaian program ini didukung oleh kegiatan :

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah rekomendai usulan izin usaha yang diterbitkan sejumlah 6 dokumen dari sub kegiatan :
   1. Penyusunan Standart Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian dengan indikator kinerja Standart Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian sejumlah 3 dokumen.
   2. Penilaian Kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian dengan indikator jumlah penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian sejumlah 2 dokumen.

3. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian dengan indikator kinerja Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi 1 laporan.

6. Program Penyuluhan Pertanian

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Target	Realisasi	Capaian		
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	1,54 %	1,21%	78,57%	Adanya koordinasi yang baik dengan kelompok sasaran kegiatan	Petani cenderung kurang antusias untuk berkelompok dalam berusaha tani

Dalam pelaksanaan Program Penyuluhan Pertanian dengan indikator Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya yang ditargetkan sebesar 1,54 % terealisasi 1,21%. Dari 1302 kelompok tani ada 19 kelompok tani yang naik kelas kelompoknya. Sebagian besar kelompok tani naik skornya tapi masih di range kelas kelompok yg sama dg tahun sebelumnya. Penyebab utama kelas kelompok tani tidak naik adalah:

- Lemahnya administrasi dan organisasi
- Minimnya Kemandirian Modal: Kelompok tidak memiliki kas mandiri (tidak ada iuran) sehingga sulit mengembangkan usaha tani atau membiayai kegiatan kelompok.
- Tingkat kehadiran anggota dalam pertemuan rutin sangat kurang.
- Ketergantungan pada pupuk kimia, kurangnya inovasi, modal usaha terbatas, dan belum adanya kemitraan usaha.

Hasil perhitungan capaian indicator program pada lampiran. Program ini didukung oleh kegiatan:

a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan keluaran jumlah Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pelatihan dengan target 25 kelompok tani dan terealisasi 23 kelompok sebagaimana pada lampiran. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa dengan indikator jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya 18 unit yang meliputi :
   - Pertemuan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian di 20 BPP dengan tema dan materi sesuai dengan kebutuhan di masing-masing BPP.
   - Pertemuan sinkronisasi program Dinas Pertanian dengan BPP
   - Penyelenggaraan Gelar Potensi Produk Pertanian
   - Pertemuan peningkatan kelas kelompok tani di 20 BPP
2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dengan indikator Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 27 unit, yang terdiri dari :
   a. Pelatihan budidaya tembakau sebanyak 2 kelompok, yaitu :
      1. Poktan Sumber Makmur Desa Ngepung Kec. Lengkong,
      2. Poktan Marsudi Tani Desa Sumbergung Kec. Gondang
   b. Gerakan penerapan PHT Tanaman Tembakau di 5 kelompok tani, yaitu :
      1. Poktan Tani Makmur Desa Pinggir Kec. Lengkong
      2. Poktan Sehati Desa Ngringin Kec.Lengkong
      3. Poktan Gemah Ripah Desa Pulowetan Kec. Jatikalen
      4. Poktan Tani Makmur Desa Gampeng Kec. Ngluyu
      5. Poktan Sido Makmur Desa Lengkong Lor Kec. Ngluyu
   c. Temu Wicara 20 Kecamatan se-Kabupaten Nganjuk
      1. Poktan Rukun Tani I Desa Balongrejo Kec. Bagor
      2. Poktan Jabon Tani Desa Talun Kec. Rejoso
      3. Poktan Tani Maju Desa Mancon Kec. Wilangan
      4. Poktan Mulyo Agung Desa Patihan Kec. Loceret
      5. Poktan Tani Makmur Desa Kweden Kec. Ngetos

6. Poktan Karang Tani Mulyo Desa Plosoharjo Kec. Pace
7. Poktan Bangkit Karya Tani Desa Salamrojo Kec. Berbek
8. Poktan Tani Makmur Desa Kebonagung Kec. Sawahan
9. Poktan Marganing Rahayu Desa Bukur Kec. Patianrowo
10. Poktan Manunggal Tani Desa Mabung Kecamatan Baron
11. Poktan Bogo Mulyo Desa Nglawak Kec Kertosono
12. Poktan Ngudi Makmur Kel. Begadung Kec Nganjuk
13. Poktan Tani Jaya Desa Jatikalen Kec Jatikalen
14. Poktan Mentari Desa Banjardowo Kec Lengkong
15. Poktan Sri Rejeki Ds Balonggebang Kec Gondang
16. Poktan Rukun Karya Desa Ngluyu Kec. Ngluyu
17. Poktan Tani Barokah Ds Demangan Kec Tanjunganom
18. Poktan Tani Makmur II Desa Watudandang Kec. Prambon
19. Poktan Karya Bersama Desa Kelutan Kec. Ngronggot
20. Poktan Arum Desa Bagor Wetan Kec. Sukomoro

3. Penyediaan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian dengan indikator jumlah sarana dan prasarana penyuluhan sejumlah 54 unit yang meliputi pemenuhan sarana BPP seperti kertas, tinta printer, dan prasarana penyuluhan seperti :
   - 20 unit soil tester,
   - 20 unit PUTS,
   - 10 unit Printer
   - 4 Dekstop PC.
4. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi 20 unit di 20 BPP yang dengan tahapan sosialisasi, rembug tani, kursus tani, dan temu lapang budidaya padi sehat.
5. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dengan indikator kinerja jumlah penyuluh pertanian yang

tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya dengan target 150 orang terealisasi 149 orang penyuluh, karena 1 orang penyuluh pensiun.

6. Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian ditingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya sejumlah 3 unit yakni pelaksanaan magang agribisnis di 3 P4S yaitu :
   - Magang agribisnis bawang merah bagi petani muda Kecamatan Rejoso di P4S Pangrukti Tani,
   - Magang agribisnis bawang merah bagi petani muda Kecamatan Gondang di P4S Santosa Jaya Desa Pandean Kecamatan Gondang,
   - Magang Agribisnis Melon bagi petani Muda Kecamatan Baron di P4S Sedulur Tani Desa Jaan Kecamatan Gondang

b. Sasaran Meningkatkan Produksi Peternakan diukur dengan indikator kinerja persentase peningkatan produksi peternakan, didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

   Dimana kegiatan dari program ini yang mendukung sasaran meningkatnya produksi peternakan adalah :

   a. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota target 2 kegiatan yang berasal dari sub kegiatan sebagai berikut:

      1. Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan Ternak dengan indikator kinerja jumlah pengawasan

produksi benih/bibit ternak dan HPT bahan pakan/pakan sejumlah 3 laporan

2. Penjaminan peredaran benih/bibit ternak dengan indikator kinerja jumlah benih/bibit ternak yang beredar sejumlah 9 laporan.

2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Target	Realisasi	Capaian		
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	10%	-42,8%	-428%	1. Koordinasi yang baik antar kelompok sasaran 2. Ada pendekatan proaktif terhadap masyarakat dan komunitas 3. Kooordinasi antar OPD terkait dalam penanganan kasus dugaan zoonosis. 4. Masyarakat kooperatif bersama-sama menangani penyakit hewan menular dan zoonosis.	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk vaksinasi dan memeriksakan hewanya (karena ini lebih pada tindakan preventif/ pencegahan

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. dengan indikator kinerja Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular yang ditargetkan 10% terealisasi -42,8%. Pada tahun 2025 sampai bula September terjadi peningkatan wabah penyakit menular jika dibandingkan dengan

tahun 2024. Peningkatan ini terjadi karena Tahun 2025 musim kemarau basah yang menyebabkan mudah berkembangnya virus yang menyebabkan wabah penyakit hewan menular. Dinas Pertanian berupaya mengendalikan penyebaran dan menurunkan kejadian dengan meningkatkan pelayanan kesehatan hewan. Capaian kinerja ini sangat mendukung dalam menurunkan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan yang terjadi di Kabupaten Nganjuk. Program ini didukung oleh kegiatan:

a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah ternak yang ditangani yang ditargetkan 80.000 ekor terealisasi 64.323 ekor, yang didukung oleh sub kegiatan:
    1. Sub kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah penyakit Hewan Menular dengan indicator kinerja Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali sebanyak 4 laporan
    2. Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja Jumlah Wilayah atau /Kawasan yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 4 laporan.
b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja jumlah laporan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan dalam daerah sejumlah 4 laporan yang didukung oleh sub kegiatan pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (HPM) dengan indicator kinerja jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM sebanyak 3 laporan.

c. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota sejumlah 1 laporan, dan didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut:
   1. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium dengan indicator kinerja jumlah pelayanan jasa laboratorium sebanyak 1 laporan
   2. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan indicator kinerja jumlah pelayanan jasa medik veteriner 9 laporan

d. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan indicator kinerja Jumlah laporan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner sebanyak 2 laporan yang didukung oleh sub kegiatan pembinaan penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan dengan indicator kinerja jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi sebanyak 2 unit usaha di Rumah Potong Hewan Nganjuk dan Rumah Potong Hewan Kertosono.

Renstra Perangkat Daerah 2025-2029.

1. Sasaran meningkatkan produksi pertanian komoditas unggulan diukur dengan indikator kinerja Persentase peningkatan Produksi Pertanian komoditas unggulan didukung oleh program sebagai berikut :
   1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Target	Realisasi	Capaian		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	81	80,65	99,57%	Dilaksanakannya koordinasi rutin dengan bidang-bidang	1. Perencanaan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan 2. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Target	Realisasi	Capaian		
						menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaanya

Dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” yang ditargetkan pada Tahun 2025 sebesar 81 Nilai realisasinya adalah 80,65 Nilai dengan kategori A (Memuaskan), penilaian dilakukan pada komponen evaluasi AKIP berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatannya dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30%	24,60
2.	Pengukuran Kinerja	30%	23,70
3.	Pelaporan Kinerja	15%	11,85
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,50
	Jumlah	100%	80,65

Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain:

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, memiliki indikator kinerja sebagai berikut:
    a. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 20 dokumen , terdiri dari:
        1. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025
        2. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026
        3. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027
        4. Dokumen Renstra Tahun 2025-2029
        5. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025
        6. Dokumen Indikator Kinerja Utama
        7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2025

8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2025
9. Dokumen Anggaran Kas Tahun 2025
10. Dokumen Anggaran Kas Perubahan Tahun 2025
11. Rencana Aksi Tahun 2025
12. Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025
13. Dokumen RKA Perubahan Tahun 2025
14. Dokumen RKA Tahun 2026
15. Dokumen RKA Efisiensi Tahun 2026
16. Dokumen Register Risiko Tahun 2025
17. Dokumen SOP Perencanaan
18. Dokumen Rencana Kegiatan DAK Tahun 2026
19. Dokumen Rencana Kegiatan DBHCHT Tahun 2026
20. Dokumen Gender Tahun 2026

b. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 12 laporan, terdiri dari:
   1. Laporan Capaian Kinerja Triwulan I TA 2025
   2. Laporan Capaian Kinerja Triwulan II TA 2025
   3. Laporan Capaian Kinerja Triwulan III TA 2025
   4. Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV TA 2025
   5. Evaluasi Renja Triwulan I TA 2025
   6. Evaluasi Renja Triwulan II TA 2025
   7. Evaluasi Renja Triwulan III TA 2025
   8. Evaluasi Renja Triwulan IV TA 2025
   9. Laporan Triwulan I Pengelola Risiko Dinas Pertanian
   10. Laporan Triwulan II Pengelola Risiko Dinas Pertanian
   11. Laporan Triwulan III Pengelola Risiko Dinas Pertanian
   12. Laporan Triwulan IV Pengelola Risiko Dinas Pertanian

c. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ada 9 Laporan, terdiri dari :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2024
3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2024
4. Laporan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim 2025
5. Laporan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2025
6. Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025
7. Laporan Capaian Kinerja Pejabat Bupati Nganjuk Tahun 2025
8. Laporan Pemanfaatan DAK Fisik dan Non Fisik Tahun 2025
9. Laporan Aksi Bangda (Penurunan Stunting)

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indicator kinerja, yaitu:
   a. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sejumlah 205 orang/bulan
   b. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen
   c. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indicator kinerja yang meliputi :
   a. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket alat listrik
   b. Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 24 paket yang terdiri dari:
      - 3 unit AC Split
      - 1 unit Smart TV
      - 5 unit wireless microphone sytem
      - 3 Unit UPS
      - 3 unit wireless speaker
      - 1 unit mixer

- 1 unit computer PC
- 3 unit desktop PC
- 3 Unit printer
- 1 unit printer ink tank

c. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sejumlah target 8 paket terealisasi 7 paket, yang terdiri dari alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan computer, perabot kantor, perlengkapan dinas, bahan natura, makanan dan minuman rapat. Untuk alat angkutan barang tidak jadi dianggarkan karena efisiensi.

d. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan sebanyak 2 paket yang terdiri dari belanja foto copy dan cetak amplop dinas.

e. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan sebanyak 2 paket terdiri dari belanja jasa iklan/reklame dan pemotretan, belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan.

f. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dari 12 target terealisasi 11 laporan

g. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari target sebayak 80 laporan terealisasi 78 laporan.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan keluaran Jumlah Paket Mebel yang Disediakan sejumlah 201 unit yang terdiri dari:
   - 100 unit kursi rapat
   - 1 kursi tamu sofa
   - 10 unit meja staf
   - 90 unit kursi rapat susun
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indicator sebagai berikut :

a. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 1 laporan
b. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 laporan
c. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 laporan

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indicator kinerja:
   a. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya sebanyak 1 unit
   b. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dari target 98 unit terealisasi 78 unit karena ada kesalahan dalam perhitungan target.
   c. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 83 unit terealisasi 63 unit karena menyesuaikan peralatan yang rusak.
   d. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi sebanyak 13 unit terealisasi 13 unit yang meliputi pemeliharaan
      - Gedung kantor Dinas Pertanian
      - Kantor BPP Bagor
      - Kantor BPP Tanjunganom
      - Kantor BPP Loceret
      - Kantor BPP Baron
      - Kantor BPP Gondang
      - Ruang Laboratorium
      - Bidang SDM Dinas Pertanian
      - Bidang Prozin Dinas Pertanian
      - Kantor BPP Patianrowo

- Kantor BPP Ngluyu
- Kantor BPP Lengkong
- Kantor BPPKertosono

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Target	Realisasi	Capaian		
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Persentase ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan pupuk	100%	100%	100%	1. Adanya subsidi pupuk dari pemerintah 2. Adanya regulasi tepat sasaran tempat,jumlah, harga, waktu, jenis, mutu 3. Kebijakan pemerintah dan pengawasan HET 4. Pendataan e-RDKK	1. Penurunan alokasi anggaran dan kuota 2. Alokasi yang disetujui terbatas 3. Keterlambatan distribusi 4. Perbedaan harga yang signifikan antara pupuk bersubsidi dan non subsidi
	2. Persentase alsintan dalam kondisi baik	90%	98%	108,89%	Adanya manajemen pengelolaan dan operator yang terampil	1. Kesesuaian alsintan dengan kondisi lahan 2. Pengelolaan UPJA yang belum optimal
	3. Persentase Petani yang menggunakan bibit unggul	62%	62,7%	101,13%	1. Adanya Kemitraan petani dengan perusahaan benih 2. Intensitas penyuluhan lapangan oleh PPL	1. Bibit unggul bersertifikat umumnya memiliki harga yang lebih mahal 2. Kebiasaan Menggunakan Benih Turun-Temurun

Indikator kinerja program persentase ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan pupuk terealisasi 100%. Dari kekurangan kebutuhan pupuk subsidi, petani menggunakan pupuk non subsidi untuk memenuhi kebutuhan pupuk. Kebutuhan pupuk petani terinput dalam e-RDKK.

Perhitungan persentase ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan pupuk sebagaimana table berikut.

No.	Uraian	Jenis Pupuk					Jumlah
		Urea	NPK	Za	NPK Formula	Organik	
1	Kebutuhan Pupuk	36,936.16	44,509.30	73.68	3.15	4,072.98	85,595.27
2	Realisasi Pupuk Subsidi	35,699.45	32,857.81	69.86	-	2,854.60	71,481.72
3	Realisasi pupuk non subsidi	1,236.72	11,651.49	3.82	3.15	1,218.38	14,113.56

$$\text{Persentase ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan pupuk} = \frac{\text{Realisasi pupuk subsidi + non subsidi}}{\text{Kebutuhan pupuk}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{85{,}595.27}{85{,}595.27} \times 100\ \%$$

$$= 100\%$$

Karena alokasi pupuk subsidi tidak 100% difasilitasi oleh pemerintah, petani menggunakan pupuk non subsidi Urea 3,35%, NPK 0,19%, ZA 5,18%, organik 29,9% untuk pemenuhan RDKK 100%

Indikator kinerja program persentase alsintan dalam kondisi baik dari target 90% terealisasi 98,16%. Hal ini menunjukan kalau kondisi alsintan yang ada dipetani relative masih dalam kondisi baik, ada kerusakan ringan yang masih bisa diperbaiki. Capaian kinerja sebagaimana pada table berikut:

No.	Alat/Mesin Pertanian	Kondisi Baik dan Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat	Total
1	Traktor Roda Dua	3.120	183	3.303
2	Traktor Roda Tiga	58	1	59
3	Alat tanam padi	108	47	155
4	Alat tanam biji-bijian	33	5	38
5	Penyemprot	28.385	1.248	29.633
6	Pengabut pestisida	7	0	7
7	Bahan asap	172	5	177
8	Pembersih gulma	78	16	94
9	Pompa air (< 4 inchi)	7.373	154	7,527
10	Pompa air (4 inchi)	695	82	777
11	Pompa air (> 4 inchi)	13.004	27	13.031

No.	Alat/Mesin Pertanian	Kondisi Baik dan Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat	Total
12	Sabit bergerigi/sabit	53.479	30	53.509
13	Pemotong padi tipe gunting	0	0	0
14	Pemotong padi tipe gendong	0	0	0
15	Pemotong padi tipe sisir	0	0	0
16	Rice combine harvester kecil	0	0	0
17	Rice combine harvester menengah	49	38	87
18	Rice combine harvester besar	33	30	63
19	Corn combine harvester	32	2	34
20	Pengungkit ubi kayu/ubi jalar	5	0	5
21	Perontok padi	0	0	0
22	Pemipil jagung	778	66	844
23	Perontok multiguna (padi, jagung, kedelai)	92	9	101
24	Perajangan umbi mekanis	206	51	257
25	Pembersih gabah	0	0	0
26	Pengering tipe datar	6	0	6
27	Pengering tipe vertikal	46	0	46
28	Pengering rak	3	3	6
29	Penggilingan padi kecil	1	1	2
30	Penggilingan padi menengah	305	30	335
31	Penggilingan padi besar	88	2	90
32	Penyimpanan hasil tanaman pangan	79	2	81
33	Alat pembuat pupuk organik (APPO)/kompos	1	0	1
	Jumlah	108.236	2.032	110.268

$$\text{Persentase alsintan dalam kondisi baik} = \frac{\text{Jumlah alsintan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah alsintan seluruhnya}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{108.236}{110.268} \times 100\ \%$$

$$= 98{,}16\%$$

Indikator kinerja program persentase petani yang menggunakan bibit unggul dengan realisasi 62,70% sebagaimana table berikut:

No.	Kecamatan	Subsektor	Jumlah Petani	Jumlah Petani Menggunakan Benih Unggul Th. 2025
1	Sawahan	Tanaman Pangan	7.709	4.780
2	Ngetos	Tanaman Pangan	10.900	6.758
3	Berbek	Tanaman Pangan	5.383	3.343
4	Loceret	Tanaman Pangan	8.820	5.557
5	Pace	Tanaman Pangan	6.973	4.323
6	Prambon	Tanaman Pangan	6.483	4.149
7	Ngronggot	Tanaman Pangan	7.894	4.973

No.	Kecamatan	Subsektor	Jumlah Petani	Jumlah Petani Menggunakan Benih Unggul Th. 2025
8	Kertosono	Tanaman Pangan	2.293	1.422
9	Patianrowo	Tanaman Pangan	4.626	2.868
10	Baron	Tanaman Pangan	5.988	3.713
11	Tanjunganom	Tanaman Pangan	9.726	6.225
12	Sukomoro	Tanaman Pangan	4.970	3.081
13	Nganjuk	Tanaman Pangan	2.546	1.579
14	Bagor	Tanaman Pangan	6.327	3.986
15	Wilangan	Tanaman Pangan	3.725	2.347
16	Rejoso	Tanaman Pangan	8.656	5.540
17	Gondang	Tanaman Pangan	10.980	6.917
18	Ngluyu	Tanaman Pangan	3.551	2.202
19	Lengkong	Tanaman Pangan	4.625	2.868
20	Jatikalen	Tanaman Pangan	2.925	1.814
	Jumlah		125.100	78.442
	Persentase Yang Menggunkan Benih Unggul Bersertifikat = $\frac{Jumlah\ Petani\ Menggunakan\ Benih\ Unggul}{Jumlah\ Petani}\ x\ 100\%$			62.70

Dari 125.100 petani di Kabupaten Nganjuk, ada 78.442 petani atau 62,70% yang menggunakan benih unggul bersertifikat. Dari target 62% terealisasi 62,70%, atau dengan capaian 101,13%. Capaian ini terjadi karena adanya bantuan benih unggul dari pemerintah, diseminasi informasi dari penyuluh tentang pentingnya benih unggul dan demplot penggunaan benih unggul

Capaian Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian ini didukung oleh kegiatan antara lain:

1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan indikator kinerja:
   a. Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi sebanyak 17 laporan dan terealisasi 16 laporan yang merupakan laporan realisasi pemberian bantuan hibah pengadaan kendaraan roda 3 untuk 10 kelompoktani dan pengadaan handtraktor untuk 7 kelompok tani, dengan penerima manfaat yaitu :

1. Kendaraan roda 3 untuk 10 kelompok tani
    - Poktan Bulu makmur Desa Pulowetan Kec. Jatikalen
    - Poktan Sumber tani Desa Perning Kec. Jatikalen
    - Poktan Mekar Sari Desa Jatikalen Kec. Jatikalen
    - Poktan Karya Widodo Kel Warujayeng Kec. Tanjunganom
    - Poktan Rukun Makmur I Ds. Balonggebang Kec. Gondang
    - Poktan Sumber Rejeki Ds. Balonggebang Kec. Gondang
    - Poktan Rukun Makmur Ds. Ngluyu Kec. Nguluyu
    - Poktan Upadi Tani Ds. Bajang Kec. Ngluyu
    - Poktan Rukun Abadi Ds. Ngluyu Kec. Ngluyu
    - Poktan Tulus Bakti Ds. Kedungombo Kec. Tanjunganom
2. Handtraktor untuk 7 kelompoktani yaitu :
    - Poktan Sidodadi Desa Pulowetan Kec. Jatikalen
    - Poktan Batur Desa Sumberkepuh Kec. Tanjunganom
    - Poktan Sinto Ds. Juwet Kec. Ngronggot
    - Poktan Rukun Tani Ds. Banjardowo Kec. Lengkong
    - Poktan Margo Mulyo II Ds. Banjardowo Kec. Lengkong
    - Poktan Margo Makmur Ds. Bangle Kec. Lengkong.

    Bantuan handtraktor untuk Poktan Harapan Bahagia Desa Betet Kec. Ngronggot tidak terealisasi karena belum memiliki badan hukum (Surat Keterangan dari KEMENKUMHAM terlambat terbit)

b. Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sebanyak 12 laporan pupuk dari distributor dan laporan verval.

3. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan keluaran:

b. Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman sebanyak 3 dokumen,

c. Jumlah pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman sudah dilaksanakan 1 dokumen laporan kegiatan sosialisasi manajemen budidaya tanaman sehat bawang merah di Poktan Desa Mojorembun, desa mojorembun Rejoso dengan output pengenalan manajemen budidaya tanaman sehat bawang merah,

d. Jumlah SDG Tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian sebanyak 3 VUB dengan melaksanakan proses pendaftaran varietas unggul durian, dan diterbitkannya sertifikat, pelaksanaan bimtek sambung pucuk varietas unggul baru buah local, pengembangan benih di UPT Pembenihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Target	Realisasi	Capaian		
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian dalam kondisi baik	100%	100%	100%	• Program perbaikan, rehabilitasi dan pembangunan prasarana pertanian oleh pemerintah • Program Optimalisasi Lahan • Pengelolaan prasarana pertanian oleh P3A	• Usia infrastruktur yang sudah tua • Keterbatasan anggaran pemeliharaan • Adanya bencana banjir
	Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	8 Unit	7 Unit	87,50%	Mempermudah mobilitas , pengangkutan sarana produksi	Keterbatasan dana untuk rehabilitasi dan pemeliharaan
	Jumlah jaringan irigasi usaha tani	1 unit	1 unit	100%	meningkatkan produktivitas pertanian, ketahanan pangan	Keterbatasan anggaran dari pemerintah

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Target	Realisasi	Capaian		
	yang direhabilitasi					

Indikator kinerja program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian adalah Presentase Prasarana Pertanian dalam kondisi baik adalah 100% dari 307 prasarana pertanian dalam kondisi baik, sebagaimana pada table berikut:

No.	Jenis Prasarana Pertanian	Tahun Pembangunan		Kondisi Baik
		2024	2025	
1	Jalan Usaha Tani	6	7	13
2	Sumur Dalam	5	1	6
3	Sumur Dangkal	4	0	4
4	Irigasi Tanah Dangkal	46	0	46
5	Sumur Gali/Pantek	7	0	7
6	Dam Parit	2	0	2
7	Irigasi Perpompaan	71	20	91
8	Oplah		49	49
9	Perpipaan	70	0	70
10	Itd Apbd	4	0	4
11	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	9		9
12	Irpom Aspirasi	6		6
	Jumlah	230	77	307

$$\text{Presentase Prasarana Pertanian dalam kondisi baik} = \frac{\text{Jumlah prasarana pertanian dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah prasarana pertanian}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{307}{307} \times 100\ \%$$

$$= 100\%$$

Capaian Program ini didukung oleh kegiatan antara lain:

1. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan indikator sebagai berikut :
   a. Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi sejumlah 1 Unit, dengan penerima manfaat kelompok tani Yoso Mulyo Desa Kedungsoko Kec. Sukomoro.

b. Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dari target 8 unit terealisasi 7 unit, dengan penerima maanfaat sebagai berikut:

- Poktan Mentari Desa Banjardowo Kec. Lengkong
- Poktan Mekar Tani Desa Sumber Kepuh Kec.Lengkong
- Poktan Maju Rukun Desa Jatipunggur Kec. Lengkong
- Poktan Ngudi Rahayu Desa Bajang Kec. Ngluyu
- Poktan Tani Makmur Desa Gampeng Kec.Ngluyu
- Poktan Tani Lestari Ds. Nglawak Kec. Prambon
- Poktan Kedung Mulyo Ds. Kedungmlaten Kec. Lengkong

Poktan Harapan Jaya Ds. Sugihwaras Kec. Prambon tidak bisa terealisasi karena sudah menerima bantuan yang lain.

3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Target	Realisasi	Capaian		
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Serangan Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) yang tertangani	100%	100%	100%	Adanya koordinasi yang baik dengan kelompok sasaran kegiatan	1. Kurangnya SDM Penanggulangan Hama 2. Antusiasme petani mengikuti kegiatan asuransi usaha tani masih kurang 3. Motivasi petani untuk melakukan gerdal mulai berkurang

Dalam pelaksanaan Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan indikator Persentase Serangan Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) yang tertangani dari target 100% dan sudah terealisasi sebagaimana perhitungan ada pada table berikut

No	OPT Tanaman Padi	Aktual Luas Serangan				Jumlah
		Ringan	Sedang	Berat	Puro	
	Wereng Batang Coklat	450,6	72	-	-	522,6
	Tikus	281,95	-	-	-	281,95
	Penggerek Batang	94,25	-	-	-	94,25
	Xanthomonas	336	-	-	-	336
	Blast	37,2	-	-	-	37,2
	Ulat Spodoptera	33	-	-	-	33
	Hindola/BPKC	-	20	-	-	20
	Area yang tidak dapat ditanggulangi					0
	Area yang dapat ditanggulangi					1.325
	Luas are terkena bencana					1.325

$$\text{Persentase fasilitasi penanggulangan bencana} = \frac{\text{Area yang ditanggulangi}}{\text{Area terkena bencana}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.325}{1.325} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Capaian program ini didukung oleh kegiatan:

a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja:
   1. Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan dengan target 1.325 ha.
   2. Jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang ditangani dengan target 100 ha dan sudah terealisasi.
   3. Jumlah luasan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dengan target 50 ha dan sudah terealisasi.

4. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Target	Realisasi	Capaian		
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase izin usaha pertanian yang terfasilitasi penerbitan NIB	100%	100%	100%	Adanya koordinasi yang baik dengan kelompok sasaran kegiatan	Bermunculan pelaku usaha perikanan baru di wilayah yang belum terjangkau dikarenakan keterbatasan SDM

Perhitungan capaian indikator Program Perizinan Usaha Pertanian adalah dari 10 pelaku usaha yang mengajukan permohonan rekomendasi izin usaha terealisasi 10 unit usaha yang terbit Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sebagaimana pada lampiran.

Program ini didukung oleh kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan indikator:

a. Standart Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian sejumlah 3 dokumen, yaitu:
   - Standar Pelayanan Publik izin Pelayanan Fasilitasi /Pembinaan/Pemberian Rekomendasi Teknis Perizinan dan Non Perizinan Usaha Pertanian
   - Standar Pelayanan Publik Rekomendasi Teknis Perizinan Non Perizinan Usaha Peternakan Untuk OSS
   - Standar Pelayanan Publik pemberian rekom izin usaha peternakan si Pentol untuk pertanian sector peternakan
b. Jumlah penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian sejumlah 2 dokumen, yaitu:
   - Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis Izin Usaha Peternakan
   - Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis Izin Usaha Pertanian

c. Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi sebanyak 1 laporan kegiatan sosialisasi penerbitan izin usaha pertanian.

5. Program Penyuluhan Pertanian

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Target	Realisasi	Capaian		
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	1,54 %	1,46%	94,81%	Adanya koordinasi yang baik dengan kelompok sasaran kegiatan	Petani cenderung kurang antusias untuk berkelompok dalam berusaha tani

Dalam pelaksanaan Program Penyuluhan Pertanian dengan indikator Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya yang ditargetkan sebesar 1,54 % terealisasi 1,46%. Dari 1302 kelompok tani ada 19 kelompok tani yang naik kelas kelompoknya. Sebagian besar kelompok tani naik skornya tapi masih di range kelas kelompok yg sama dg tahun sebelumnya. Penyebab utama kelas kelompok tani tidak naik adalah:

- lemahnya administrasi dan organisasi: Pengurus (sekretaris/bendahara) tidak berfungsi maksimal, tidak ada administrasi buku kelompok, dan rendahnya kesadaran anggota mematuhi kesepakatan bersama.
- Minimnya Kemandirian Modal: Kelompok tidak memiliki kas mandiri (tidak ada iuran) sehingga sulit mengembangkan usaha tani atau membiayai kegiatan kelompok.
- Keaktifan Rendah: Tingkat kehadiran anggota dalam pertemuan rutin sangat kurang.
- Faktor Teknis & Usaha: Ketergantungan pada pupuk kimia, kurangnya inovasi, modal usaha terbatas, dan belum adanya kemitraan usaha.

Hasil perhitungan capaian indicator program pada lampiran. Program ini didukung oleh kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian dengan keluaran:

1. Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 20 unit yang meliputi :
   - Pertemuan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian di 20 BPP dengan tema dan materi sesuai dengan kebutuhan di masing-masing BPP.
   - Pertemuan sinkronisasi program Dinas Pertanian dengan BPP
   - Penyelenggaraan Gelar Potensi Produk Pertanian
   - Pertemuan peningkatan kelas kelompok tani di 20 BPP
2. Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 27 unit, yang terdiri dari :
   a. Pelatihan budidaya tembakau sebanyak 2 kelompok, yaitu :
      1. Poktan Sumber Makmur Desa Ngepung Kec. Lengkong,
      2. Poktan Marsudi Tani Desa Sumbergung Kec. Gondang
   b. Gerakan penerapan PHT Tanaman Tembakau di 5 kelompok tani, yaitu :
      1. Poktan Tani Makmur Desa Pinggir Kec. Lengkong
      2. Poktan Sehati Desa Ngringin Kec.Lengkong
      3. Poktan Gemah Ripah Desa Pulowetan Kec. Jatikalen
      4. Poktan Tani Makmur Desa Gampeng Kec. Ngluyu
      5. Poktan Sido Makmur Desa Lengkong Lor Kec. Ngluyu
   c. Temu Wicara 20 Kecamatan se-Kabupaten Nganjuk
      1. Poktan Rukun Tani I Desa Balongrejo Kec. Bagor
      2. Poktan Jabon Tani Desa Talun Kec. Rejoso
      3. Poktan Tani Maju Desa Mancon Kec. Wilangan
      4. Poktan Mulyo Agung Desa Patihan Kec. Loceret
      5. Poktan Tani Makmur Desa Kweden Kec. Ngetos
      6. Poktan Karang Tani Mulyo Desa Plosoharjo Kec. Pace
      7. Poktan Bangkit Karya Tani Desa Salamrojo Kec. Berbek

8. Poktan Tani Makmur Desa Kebonagung Kec. Sawahan
9. Poktan Marganing Rahayu Desa Bukur Kec. Patianrowo
10. Poktan Manunggal Tani Desa Mabung Kecamatan Baron
11. Poktan Bogo Mulyo Desa Nglawak Kec Kertosono
12. Poktan Ngudi Makmur Kel. Begadung Kec Nganjuk
13. Poktan Tani Jaya Desa Jatikalen Kec Jatikalen
14. Poktan Mentari Desa Banjardowo Kec Lengkong
15. Poktan Sri Rejeki Ds Balonggebang Kec Gondang
16. Poktan Rukun Karya Desa Ngluyu Kec. Ngluyu
17. Poktan Tani Barokah Ds Demangan Kec Tanjunganom
18. Poktan Tani Makmur II Desa Watudandang Kec. Prambon
19. Poktan Karya Bersama Desa Kelutan Kec. Ngronggot
20. Poktan Arum Desa Bagor Wetan Kec. Sukomoro

3. Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan sejumlah 54 unit yang meliputi pemenuhan sarana BPP seperti kertas, tinta printer, dan prasarana penyuluhan seperti :
   - 20 unit soil tester,
   - 20 unit PUTS,
   - 10 unit Printer
   - 4 Dekstop PC.
4. Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi 20 unit di 20 BPP yang dengan tahapan sosialisasi, rembug tani, kursus tani, dan temu lapang budidaya padi sehat.
5. Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya dengan target 150 orang terealisasi 149 orang penyuluh, karena 1 orang penyuluh pensiun.
6. Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian ditingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya sejumlah 3 unit yakni pelaksanaan magang agribisnis di 3 P4S yaitu :
   - Magang agribisnis bawang merah bagi petani muda Kecamatan Rejoso di P4S Pangrukti Tani,

- Magang agribisnis bawang merah bagi petani muda Kecamatan Gondang di P4S Santosa Jaya Desa Pandean Kecamatan Gondang,
- Magang Agribisnis Melon bagi petani Muda Kecamatan Baron di P4S Sedulur Tani Desa Jaan Kecamatan Gondang

2. Sasaran Meningkatkan Produksi Peternakan diukur dengan indikator kinerja persentase peningkatan produksi peternakan didukung oleh program sebagai berikut :
   1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Target	Realisasi	Capaian		
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Persentase Peningkatan Pupulasi ternak Ruminansia	1%	0,81%	81,82%	1. Penggunaan teknologi kawin suntik (IB) yang masif, seperti program Upsus Siwab, mempercepat peningkatan populasi dengan menghasilkan keturunan yang lebih baik 2. Pengendalian penyakit, terutama penyakit mulut dan kuku (PMK), sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup ternak 3. Peningkatan permintaan daging, memicu peternak untuk menambah populasi 4. Adanya aturan untuk mencegah pemotongan	1. Masih banyak peternak yang mengelola ternak secara sambilan atau tradisional, bukan sebagai usaha bisnis intensif, sehingga pertumbuhan populasi lambat 2. Ketergantungan pada rumput liar tanpa nutrisi yang cukup, serta kurangnya akses pakan komersial atau teknologi pengolahan pakan (fermentasi) 3. Peternak skala kecil sering kesulitan modal untuk mengembangkan kandang yang memadai

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Target	Realisasi	Capaian		
					betina yang masih produktif, yang secara langsung melindungi populasi indukan	
	2. Persentase Peningkatan Populasi Unggas	2.02%	1.89%	93.56%	1. Sistem Kemitraan dapat meningkatkan jumlah peternak dan populasi unggas, karena perusahaan inti menyediakan bibit, pakan, dan bimbingan, sementara peternak fokus pada budidaya 2. Kebijakan pemerintah yang mendukung swasembada pangan, 3. Program Makan Bergizi Gratis/MBG, meningkatkan permintaan daging dan telur ungags 4. Adanya intervensi untuk menstabilkan harga pakan dan bibit (DOC) meningkatkan minat dan ketahanan usaha peternak.	1. Manajemen Kandang Tradisional menyebabkan Sirkulasi udara (ventilasi) yang buruk dan kurangnya sanitasi menyebabkan ternak rentan penyakit dan pertumbuhan terhambat 2. Harga pakan sangat fluktuatif dan seringkali mahal

Dimana kegiatan dari program ini yang mendukung sasaran meningkatnya produksi peternakan adalah kegiatan Pengendalian dan

Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Jumlah pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT bahan pakan/pakan sejumlah 4 laporan
b. Jumlah benih/bibit ternak yang beredar sejumlah 12 laporan.

2. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Target	Realisasi	Capaian		
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase terbitnya rekomendasi usaha peternakan	100%	100%	100%	Adanya koordinasi yang baik dengan kelompok sasaran kegiatan dan kelengkapan dokumen pengajuan rekomendasi	Banyak peternak skala kecil-menengah, belum memahami prosedur perizinan berusaha berbasis risiko (OSS), terutama dalam menyiapkan "Komitmen" yang dipersyaratkan.

Indikator program perizinan usaha pertanian yang mendukung persentase peningkatan produksi hasil peternakan adalah persentase terbitnya rekomendasi usaha peternakan terealisasi 100%. Ini artinya dari 30 pelaku usaha peternakan yang mengajukan izin usaha semua terfasilitasi dokumen rekomendasi yang meliputi :

1. Rekomendasi pemasukan hewan sebanyak 15 pelaku usaha
2. Rekomendasi Praktek Dokter Hewan sebanyak 8 pelaku usaha
3. Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner sebanyak 2 pelaku usaha
4. Rekomendasi pemasukan bahan pakan asal hewan sebanyak 1 pelaku usaha
5. Rekomendasi teknis budidaya ternak dan hatchery sebanyak 1 pelaku usaha
6. Rekomendasi pelatihan inseminasi buatan sebanyak 3 pelaku usaha

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Target	Realisasi	Capaian		
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan	10%	12,77%	127,70%	1. Koordinasi yang baik antar kelompok sasaran 2. Ada pendekatan proaktif terhadap masyarakat dan komunitas 3. Kooordinasi antar OPD terkait dalam penanganan kasus dugaan zoonosis. 4. Masyarakat kooperatif bersama-sama menangani penyakit hewan menular dan zoonosis.	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk vaksinasi dan memeriksakan hewanya (karena ini lebih pada tindakan preventif/ pencegahan

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. dengan indikator kinerja persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan yang ditargetkan 10% terealisasi 12,77% atau dengan capaian 127,70%. Pencapaian ini terjadi karena banyak ternak yang sudah divaksin dan masyarakat sudah semakin sadar untuk menjaga kesehatan hewannya. Bukti dukung penghitungan indikator kinerja ini sebagaimana pada lampiran. Program ini didukung oleh kegiatan:

a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja:

1. Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali sebanyak 4 laporan
2. Jumlah Wilayah atau /Kawasan yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 4 laporan.

b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM sebanyak 4 laporan.

c. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja:
   1. Jumlah pelayanan jasa laboratorium sebanyak 1 laporan
   2. Jumlah pelayanan jasa medik veteriner sebanyak 12 laporan

d. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi sebanyak 2 unit usaha yaitu Rumah Potong Hewan Nganjuk dan Rumah Potong Hewan Kertosono.

Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Analisis Keberhasilan	Analisis Kegagalan
Renstra Perangkat Daerah 2024-2026			
1.	Tujuan: Meningkatnya kesejahteraan petani		
2.	Sasaran 1: Meningkatkan produksi pertanian		
	Indikator Sasaran:	1. Adanya dukungan yang kuat terhadap Dinas Pertanian	1. Lahan Pertanian semakin berkurang karena meningkatnya alih fungsi

No.	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Analisis Keberhasilan	Analisis Kegagalan
	Persentase peningkatan produksi pertanian	2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi tentang pembangunan pertanian berkelanjutan 3. Peran stake holder mendukung koordinasi lintas sector yang berjalan dengan optimal 4. Berkembangnya kegiatan investasi pertanian 5. Tingginya permintaan hasil-hasil pertanian Kabupaten Nganjuk di pasar lokal, nasional dan global 6. Terbentuk dan berkembangnya lembaga keuangan mikro di tengah masyarakat/kawasan pengembangan agribisnis 7. Adanya kerjasama antara pemerintah, swasta dengan petani 8. Adanya perhatian dari pemerintah tentang pemberian bantuan sarana pertanian dan Pembangunan dan rehabilitasi prasarana pertanian 9. Adanya modernisasi pertanian (pengendalian hama penyakit tanaman dengan menggunakan drown) 10. Adanya permintaan kerjasama pengiriman benih pertanian dari provinsi lain	lahan pertanian ke penggunaan non pertanian 2. Regenerasi tenaga kerja pertanian kurang berjalan karena menurunnya minat generasi muda yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan (Kelangkaan SDM) 3. Menurunnya daya dukung sumber daya alam akibat anomali iklim dan degradasi lahan 4. Fluktuasi harga komoditi pertanian perkebunan dan peternakan 5. Kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi komoditi unggulan belum maksimal 6. Sumberdaya alam pertanian sulit diperbaharui 7. Peranan institusi dan Lembaga pemasaran perlu ditingkatkan 8. Teknologi pertanian belum sepenuhnya diterapkan 9. Belum terbitnya perda tentang LP2B 10. Harga jual produk hasil pertanian yang cenderung lebih rendah, tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk produksi pertanian 11. Perubahan iklim global yang tidak menentu menyebabkan perubahan pola tanam dan jadwal tanam serta menurunkan produktivitas pertanian

No.	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Analisis Keberhasilan	Analisis Kegagalan
2.	Sasaran 2: Meningkatkan produksi peternakan		
	Indikator Sasaran: Persentase Peningkatan Produksi peternakan	1. Tata kelola penanganan wabah penyakit hewan yang maksimal 2. Respon cepat dan baiknya pelayanan dari fasilitas Kesehatan 3. Satgas penanganan wabah PMK yang siaga 4. Ketersediaan bibit unggul hewan ternak	1. Minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksin 2. Keterbatasan sumber daya tenaga Kesehatan 3. Kurangnya fasilitas alat kesehatan ternak 4. Rendahnya daya beli akan produk asal hewan menyebabkan produksi hasil peternakan menurun
Renstra Perangkat Daerah 2025-2029			
1.	Tujuan: Meningkatnya pendapatan petani		
2.	Sasaran 1: Meningkatnya produksi pertanian komoditas unggulan		
	Indikator Sasaran: Persentase peningkatan produksi pertanian komoditas unggulan	1. Adanya dukungan yang kuat terhadap Dinas Pertanian 2. Adanya program Optimalisasi Lahan (OPLA) dan Pompanisasi serta perbaikan irigasi memungkinkan peningkatan indeks pertanaman (IP), di mana lahan yang sebelumnya hanya bisa tanam 1 kali menjadi 2 atau 3 kali dalam setahun 3. Penggunaan drone untuk penyemprotan pupuk dan pestisida, serta teknologi pertanian presisi, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya operasional petani	1. Berkurangnya lahan pertanian produktif akibat konversi menjadi pemukiman atau industri menjadi ancaman utama produksi pangan 2. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan dan terus-menerus menyebabkan penurunan kesuburan tanah, yang berakibat pada penurunan hasil panen 3. Perubahan cuaca menyebabkan ketidakpastian pola tanam dan risiko gagal panen tinggi 4. Rata-rata petani menguasai lahan sempit (0,2 hektare), yang membatasi adopsi teknologi modern.

No.	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Analisis Keberhasilan	Analisis Kegagalan
		4. Adanya permintaan kerjasama pengiriman benih pertanian dari provinsi lain 5. Pemberdayaan Kelembagaan Petani melalui Penguatan kelompok tani dan pembentukan korporasi petani membantu dalam manajemen risiko dan akses modal 6. Keberhasilan program swasembada pangan mengurangi ketergantungan impor 7. Adanya perhatian pemerintah dengan pemberian bantuan benih dan menurunkan harga pupuk	5. Kelalaian manusia seperti keterlambatan pemupukan, penyemprotan pestisida yang tidak tepat, dan lemahnya pengelolaan pasca panen 6. Kelompok tani seringkali tidak aktif, menyulitkan koordinasi, perencanaan tanam, dan pemasaran bersama. 7. Petani komoditas unggulan (khususnya organik) sering menghadapi ketidakpastian harga dan pasar. 8. Produksi seringkali tidak didasarkan pada dinamika permintaan pasar, mengakibatkan harga anjlok saat panen raya
2.	Sasaran 2: Meningkatkan produksi hasil peternakan		
	Indikator Sasaran: Persentase Peningkatan Produksi hasil peternakan	1. Tata kelola penanganan wabah penyakit hewan yang maksimal 2. Respon cepat dan baiknya pelayanan dari fasilitas Kesehatan 3. Satgas penanganan wabah penyakit hewan yang siaga 4. Ketersediaan bibit unggul hewan ternak dan penerapan teknologi seperti Inseminasi Buatan 5. Adanya kebijakan pemerintah Sikomandan (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) untuk meningkatkan populasi, pemotongan dan produksi daging sapi	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk vaksinasi dan memeriksakan hewannya (karena ini lebih pada tindakan preventif/pencegahan) 2. Ketergantungan pada bahan baku pakan impor (jagung, bungkil kedelai) membuat harga pakan tidak stabil 3. Masih tingginya ketergantungan pada impor daging sapi dan susu, yang melemahkan daya saing produk lokal. 4. Sebagian besar peternakan masih berskala kecil (peternak rakyat) dengan pola tradisional,

No.	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Analisis Keberhasilan	Analisis Kegagalan
		6. Manajemen Kesehatan Ternak seperti tindakan pencegahan penyakit melalui vaksinasi dan vitamin sangat mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup ternak 7. Adanya kebutuhan kenaikan konsumsi protein hewani dari program Makan Bergizi Gratis	belum intensif, sehingga produktivitas rendah 5. Kurangnya minat generasi muda untuk meneruskan usaha peternakan (peternak didominasi usia tua).

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk pada Tahun Anggaran 2025 di dukung oleh anggaran APBD sebesar Rp. 43.990.115.530. Anggaran tersebut terserap 91,43% atau senilai Rp. 40.221.135.129,88 dengan realisasi kinerja rata-rata 100%.

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
1	2		3	4	5	6
	Urusan Pilihan Pertanian		**43.990.115.530**	**40.221.135.129,88**	**3.768.980.400,12**	**91,43%**
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**		**34.248.246.186**	**31.737.006.213,88**	**2.511.239.972,12**	**92,67%**
	1	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**19.292.200**	**17.855.025,00**	**1.437.175,00**	**92,55%**
		a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.890.200	14.742.425,00	1,147.775,00	92,78%
		b. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.394.000	2.108.200,00	285.800,00	88,06%
		c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.008.000	1.004.400,00	3.600,00	99,64%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
1	2			3	4	5	6
	2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**30.838.117.000**	**28.492.608.236,00**	**2.345.508.764,00**	**92,39%**
		a.	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	30.786.785.000	28.442.386.936,00	2.344.398.064,00	92,39%
		b.	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.291.000	48.703.500,00	587.500,00	98,81%
		c.	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.041.000	1.517.800,00	523.200,00	74,37%
	5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**835.461.930**	**802.927.135,00**	**32.534.795,00**	**96,11%**
		a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	14.997.685	14.995.500,00	2.185,00	99,99%
		b	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	350.874.745	341.382.600,00	9.492,.45,00	97,29%
		c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	185.363.400	177.421.400,00	7.942.000,00	95.72%
		d.	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	28.322.100	28.237.500,00	84.600,00	99,70%
		e.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	11.950.000	10.920.000,00	1.030.000,00	91,38%
		f.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.400.000	6.347.435,00	52.565,00	99,18%
		g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	237.554.000	223.622.700,00	13.931.300,00	94,14%
	6.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerah**		**148.500.000**	**135.830.933,00**	**12.669.067,00**	**91,47%**
		a.	Pengadaan Mebel	148.500.000	135.830.933,00	12.669.067,00	91,47%
	7.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**958.662.000**	**857.051.969,00**	**101.610.031,00**	**89,40%**
		a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000,00	0,00	100,00%
		b.	Penyediaan Jasa Komunikasi,	205.262.000	160.230.207,00	45.031.793,00	78,06%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
1	2			3	4	5	6
			Sumber Daya Air Dan Listrik				
		c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	752.900.000	696.321.762,00	56.578.238,00	92,49%
	8.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.448.213.056**	**1.430.732.915,88**	**17.480.140,12**	**98,79%**
		a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.987.400	38.900.000,00	87.400,00	99,78%
		b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	142.427.950	138.047.500,00	4.380.450,00	96,92%
		c.	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	83.747.706	76.562.206,00	7.185.500,00	91,42%
		d.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	1.183.050.000	1.177.223.209,88	5.826.790,12	99,51%
2	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**			**1.413.977.500**	**1.320.699.840,00**	**93.277.660,00**	**93,40%**
	1	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**		**843.170.950**	**775.105.296,00**	**68.065.654,00**	**91,93%**
		a.	Pengawasan Penggunaan Saranan Pendukung Pertanian Sesyau Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik Lokasi	737.470.950	677.886.796,00	59.584.154,00	91,92%
		b.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	105.700.000	97.218.500,00	8.481.500,00	91,98%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
1	2			3	4	5	6
	2	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**		**344.556.450**	**328.100.744,00**	**16.455.706,00**	**95,22%**
		a.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	117.289.500	109.340.231,00	7.949.269,00	93,22%
		b.	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	7.492.500	7.001.500,00	491.000,00	93,45%
		c.	Penjaminan Kemurnian Dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	219.774.450	211.759.013,00	8.015.437,00	96,35%
	3	**Pengendalian Dan Pengawasan Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, Dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**226.250.100**	**217.493.800,00**	**8.756.300,00**	**96,13%**
		a	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak Dan HPT, Bahan Pakan Ternak	133.490.800	125.358.800,00	8.132.000,00	93,91%
		b.	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	92.759.300	92.135.000,00	624.300,00	99,33%
3	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**			**1.226.400.000**	**1.094.133.900,00**	**132.266.100,00**	**89,22%**
	2	**Pembangunan Prasarana Pertanian**		**1.226.400.000**	**1.094.133.900,00**	**132.266.100,00**	**89,22%**
		a.	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.024.400.000	892.133.900.00	132.266.100,00	87,09%
		b.	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	202.000.000	202.000.000,00	0.00	100,00%
4	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**			**988.325.844**	**930.852.985,00**	**57.472.859,00**	**94,18%**
	1	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit**		**269.890.800**	**242.522.082,00**	**27.368.718,00**	**89,86%**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
1	2		3	4	5	6
	Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	a.	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	71.789.650	65.466.220,00	6.323.430,00	91,19%
	b	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Dan Zoonosis Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	198.101.150	177.055.862,00	21.045.288,00	89,38%
2	**Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**		**24.624.000**	**24.314.500,00**	**309.500,00**	**98,74%**
	a.	Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis Untuk Pemasukan Dan/Atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	24.624.000	24.314.500,00	309.500,00	98,74%
3.	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium Dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten.Kota**		**686.456.444**	**656.671.403,00**	**29.785.041,00**	**95,66%**
	a.	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	8.921.500	8.874.250,00	47.250,00	99,47%
	b.	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	677.534.944	647.797.153,00	29.737.791,00	95,61%
4.	**Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**		**7.354.600**	**7.345.000,00**	**9.600,00**	**99,87%**
	a.	Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi	7.354.600	7.345.000,00	9.600,00	99,87%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
1	2			3	4	5	6
			Pada Unit Usaha Produk Hewan				
5	**Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**			**420.843.650**	**368.363.659,00**	**52.479.991,00**	**87,53%**
	1	**Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**		**420.843.650**	**368.363.659,00**	**52.479.991,00**	**87,53%**
		a	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	367.973.150	317.089.159,00	50.883.991,00	86,17%
		b	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	13.520.500	12.383.000,00	1.137.500,00	91,59%
		c	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan Dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	39.350.000	38.891.500,00	458.500,00	98,83%
6	**Program Perizinan Usaha Pertanian**			**22.822.000**	**21.213.375,00**	**1.608.625,00**	**92,95%**
	1	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**22.822.000**	**21.213.375,00**	**1.608.625,00**	**92,95%**
		a.	Penyusunan Standart Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	9.756.000	8.695.875,00	1.060.125,00	89,13%
		b.	Penilaian Kelayakan Dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	8.206.000	7.695.000,00	511.000,00	93,77%
		c.	Pembinaan Dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	4.860.000	4.822.500,00	37.500,00	99,23%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
1	2			3	4	5	6
7	**Program Penyuluhan Pertanian**			**5.669.500.350**	**4.748.865,157,00**	**920.635.193,00**	**83,76%**
	1	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**		**5.669.500.350**	**4.748.865.157,00**	**920.635.193,00**	**83,76%**
		a	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa	275.698.000	265.734.500,00	9.963.500,00	96,39%
		b	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan Dan Desa	565.921.850	484.466.025,00	81.395.825,00	85,61%
		c.	Penyediaan Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	241.050.600	203.890.200,00	37.160.400,00	84,58%
		d.	Pembentukan Dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	2.000.000.000	1.858.500.532,00	141.499.468,00	92,93%
		e.	Penyediaan Dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	1.516.684.900	1.078.822.500,00	437.862400,00	71,13%
		f.	Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Tingkat Kabupaten/Kota	1.070.145.000	857.451.400,00	212.693.600,00	80,12%

Analisis mengenai realisasi anggaran Tahun 2025

Penggunaan anggaran belanja sejalan dengan pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang telah ditetapkan. Setiap alokasi dana berkaitan dengan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan. Penggunaan anggaran pada Dinas Pertanian cukup efektif diimbangi dengan output yang terealisasi secara rata-rata mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Selain realisasi anggaran belanja program dan kegiatan di atas, Dinas Pertanian telah memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 243.715.000,- atau 100,10% dari target Rp. 244.000.000,-. Rincian target dan realisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025

No.	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Pelampauan anggaran	Capaian %
1.	Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Kios	7.200.000	7.200.000	0	100,00%
2.	Retribusi Rumah Potong Hewan	26.278.000	26.420.000	-142.000	100,54%
3.	Hasil Penjualan Tanaman-tanaman Penjualan tanaman (calon benih)	119.560.000	119.575.500	15.500	100,01%
	Jumlah	244.000.000	243.715.000	-157.500	100,10%

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Dinas Pertanian dengan capaian kinerja 100,10% disebabkan beberapa faktor, diantaranya penarikan retribusi kios Sentra Pengembangan Agribisnis (SPA) Sukomoro terealisasi 100%, penarikan retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Nganjuk dan Kertosono terealisasi 100,54%, serta penjualan tanaman (calon benih) dari pengelolaan Balai Benih Induk (BBI) Balonggebang Kecamatan Gondang terealisasi 100,01%. Kondisi ini menandakan Dinas Pertanian berhasil memungut pendapatan lebih tinggi dari target.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan urusan pertanian, antara lain :

1. Kurangnya penerapan pupuk berimbang dan masih tingginya ketergantungan pada pupuk kimia
2. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke permukiman dan industri
3. Kurangnya penggunaan benih bermutu dan bersertifikat
4. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana pertanian

5. Belum Optimalisasi pelaksanaan gerakan pengendalian OPT secara terpadu
6. Adanya ancaman bencana pertanian akibat perubahan iklim dan serangan OPT
7. Kurangnya inovasi dan penerapan teknologi pertanian
8. Berkembangnya penyakit hewan menular strategis baik yang bersifat zoonosis maupun tidak
9. Tingginya biaya produksi usaha peternakan terutama harga pakan ternak
10. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk vaksinasi dan memeriksakan hewannya sebagai tindakan preventif
11. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyakit ternak
12. Keterbatasan peralatan dan obat-obatan dalam menanggulangi penyakit ternak

Sedangkan upaya solusi yang dilakukan rangka pencapaian sasaran pembangunan urusan pertanian, antara lain:

1. Fasilitasi pupuk bersubsidi
2. Fasilitasi bantuan benih unggul tanaman pangan
3. Pengadaan hand traktor 6 unit
4. Pengadaan alat angkut roda tiga 10 unit
5. Bantuan pengadaan pestisida
6. Pembangunan jalan usaha tani 7 unit
7. Fasilitasi OPLAH
8. Rehabilitasi Balai Penyuluh Pertanian 6 paket
9. Sosialisasi budidaya bawang merah ramah lingkungan (pemberian sarana budidaya)
10. Pelatihan sambung pucuk tanaman durian dan alpukat
11. Pengelolaan Balai Benih Induk (BBI Balinggebang)
12. Fasilitasi SI KOMANDAN (inseminasi buatan)
13. Pengendalian dan penanganan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

14. Pelayanan kesehatan hewan ternak
15. Pengendalian penanganan bencana pertanian (Penerapan PHT tanaman pertanian, Pengendalian OPT pada tanaman pangan dengan menggunakan drone
16. Pelatihan peningkatan kemampuan petani
17. Sekolah lapang budidaya tembakau
18. Pelaksanaan magang agribisnis petani muda
19. Sosialisasi dan fasilitasi perizinan usaha pertanian dan peternakan
20. Pelaksanaan gelar produk unggulan pertanian

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Renstra Perangkat Daerah 2024-2026

Tahun 2025 sebagai irisan antara Renstra Perangkat Daerah 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029. Berdasarkan indicator kinerja Renstra 2024-2026, capaian kinerja Dinas Pertanian Tahun 2025 rata-rata belum tercapai, karena *cut off* perhitungan realisasi sampai bulan September 2025.

Tujuan Dinas Pertanian adalah meningkatnya kesejahteraan petani dengan indikator kinerja Nilai Tukar Petani (NTP). Target kinerja pada Tahun 2025 adalah 103 terealisasi 111,5 dengan capaian kinerja 108,26%. Realisasi ini merupakan realisasi tahun 2024. Karena penghitungan realisasi berdasarkan Renstra 2024-2026 untuk tahun 2025 adalah sampai bulan September 2025 dan untuk Tahun 2025 Dinas Pertanian tidak melakukan perhitungan NTP karena perubahan penetapan indicator tujuan perangkat daerah, sedangkan BPS Kabupaten Nganjuk juga tidak melakukan perhitungan NTP karena umumnya dihitung oleh BPS propinsi karena kompleksitas data dan kebutuhan sampel yang besar yang sering kali lebih akurat diolah di tingkat pusat atau provinsi. Predikat pencapaian tahun 2024 NTP termasuk kategori Sangat Baik. Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) lebih dari 100 menunjukkan bahwa daya beli petani terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan dalam proses produksi pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran yang mereka terima dari hasil penjualan produk pertanian mereka.

Peningkatan produksi pertanian sampai dengan Bulan September 2025 sebesar –44,9% atau dengan capaian -255,11%. Hal ini terjadi karena produksi dari triwulan 1 sampai triwulan 3 (Bulan September) tahun 2025 dibandingkan dengan produksi 1 tahun 2024. Apabila produksi pertanian sampai bulan September 2025 dibandingkan dengan produksi sampai bulan September 2024 peningkatannya menunjukkan tren yang positif. Produksi

pertanian sampai Bulan September 2025 jika dibandingkan dengan produksi pertanian sampai Bulan September 2024 sebesar 0,148% atau dengan capaian 84,09%. Meskipun capain belum bisa melampaui target (0,176%), produksi tahun 2025 (sampai bulan September) meningkat 0,148% karena sudah adanya perubahan pola cocok tanam yang lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2024.

Peningkatan produksi hasil peternakan sampai bulan September Tahun 2025 mengalami penurunan - 20.99% jika dibandingkan Tahun 2024. Capaian ini berasal dari hasil produksi daging dan telur. Jumlah produksi mengalami penurunan karena pembandingnya adalah hasil produksi selama setahun di tahun 2024. Jika produksi sampai triwulan III tahun 2025 dibandingkan dengan produksi triwulan III 2024, menunjukkan peningkatan yang positif. Jumlah produksi peternakan sampai triwulan III 2025 jika dibandingkan dengan produksi sampai triwulan III 2024 adalah 7,46% atau dengan capaian 392,71%. Capaian ini didukung oleh adanya peningkatan produksi daging karena adanya peningkatan permintaan kebutuhan daging sehingga terjadi peningkatan jumlah pemotongan daging karena banyak kegiatan hajatan dan juga peningkatan pemenuhan kebutuhan protein.

Renstra Perangkat Daerah 2025-2029.

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya Pendapatan Petani” dengan indicator kinerja rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sektor pertanian. Pada tahun 2025 indikator tersebut ditargetkan 1,155 terealisasi 1,39 dengan capaian 120,35%. Capaian ini diperoleh dari rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sector pertanian setiap kecamatan dengan komoditi unggulan masing-masing kecamatan. Pencapaian angka ini menunjukan usaha pertanian di Kabupaten Nganjuk dinilai menguntungkan karena rasio (1,39) lebih besar dari 1 (satu), usahatani tersebut dinilai menguntungkan dan layak untuk dilaksanakan. Dari segi efisiensi usaha angka ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal. Dalam hal ini, usaha tersebut efisien dan memberikan keuntungan bersih

sebesar Rp 0,39 (39% dari biaya investasi) dari setiap Rp 1,00 yang dikeluarkan. Investasi usaha sector pertanian di Kabupaten Nganjuk

Peningkatan produksi pertanian komoditas unggulan sebesar 0,14% Tahun 2025 atau dengan capaian 78,89%. Beberapa komoditi pertanian yang meningkat adalah padi, bawang merah, tembakau dan cengkeh. Produksi padi meningkat 8,68% dari 512.421,85 ton menjadi 556.923,90 ton. Peningkatan ini didukung banyaknya bantuan pemerintah seperti oplah, alat mesin pertanian, benih, pembangunan irigasi perpompaan dan perpipaan serta pembangunan sumur dalam dapat meningkatkan indeks pertanaman padi, pembangunan jalan usaha tani, serta adanya kebijakan pengaturan harga pembelian gabah dari pemerintah (HPP) merangsang petani meningkatkan luas tambah tanam. Produksi bawang merah mengalami peningkatan karena agroklimat saat on season mendukung, artinya adalah musim tanam utama/sesuai mendukung artinya adalah kondisi unsur-unsur iklim seperti curah hujan, suhu, intensitas matahari, dan kelembaban berada pada level optimal dan serasi dengan kebutuhan fisiologis tanaman, sehingga meminimalkan risiko kegagalan dan memaksimalkan potensi hasil panen. Komoditi pertanian yang mengalami penurunan produksi adalah jagung, kedelai, dan cabe rawit. Jumlah produksi komoditi jagung sebesar 225.284,20 ton berasal dari 223.264,20 ton dari lahan sawah dan tegal serta 2.020 ton dari lahan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dalam pengelolaan lahan hutan bersama masyarakat seluas 505 hektar. Produksi kedelai menurun karena adanya musim kemarau basah, tanaman kacang-kacangan sulit tumbuh, serta menurunnya minat petani dalam menanam kedelai karena tidak adanya kepastian harga atau HPP. Produksi cabe dibandingkan tahun 2024 terjadi penurunan produksi, ini terjadi karena intensitas curah hujan yang tinggi di Tahun 2025 mengakibatkan peningkatan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), pertumbuhan terhambat, daun keriting, buah rontok dan membusuk, serta serangan penyakit seperti Patek (Antraknosa) dan busuk batang pada tanaman cabe. Penurunan produksi jagung disebabkan oleh curah hujan tinggi sehingga pada masa generatif banyak mucul ulat sehingga pembentukan tongkol tidak sempurna. Penurunan

produksi kedelai terjadi karena banyak petani beralih menanam komoditi kacang tanah dan kacang hijau. Untuk Komoditi Cengkeh dan Tembakau juga mengalami peningkatan produksi meskipun tidak banyak. Hal ini terjadi karena adanya kegiatan PHT tanaman cengkeh dan Tembakau.

Peningkatan produksi hasil peternakan pada tahun 2025 mengalami peningkatan 1,56% atau dengan capaian 106,64% jika dibandingkan tahun 2024. Capaian ini berasal dari hasil produksi daging dan telur. Produksi daging tahun 2025 meningkat 6,65% jika dibandingkan tahun 2024, karena adanya peningkatan permintaan kebutuhan daging kurban, dampak dari penurunan wabah PMK, masyarakat sudah tidak takut lagi mengkonsumsi daging, serta program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) meningkatkan permintaan kebutuhan daging ternak. Sedangkan produksi telur di Tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2024 karena kebanyakan peternak mengurangi jumlah populasi ternak unggasnya karena peningkatan harga pakan yang tinggi. Selain itu, fluktuasi harga jual telur menjadi masalah lain bagi peternak karena tidak diimbangi dengan biaya produksi yang justru terus meningkat. Realisasi jumlah produksi hasil peternakan adalah sebagaimana ada pada lampiran dokumen laporan ini.

Capaian kinerja ini menunjukan Dinas Pertanian telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan pertanian tahun 2025 di Kabupaten Nganjuk tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan non pemerintah. Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program.

B. SARAN

Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, senantiasa mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah. Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang adalah :

1. Melakukan perbaikan mulai perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan disertai dengan peningkatan kualitas, koordinasi, dan sinergi dengan semua pihak terkait.
2. Pelatihan terhadap petugas pertanian juga petani untuk meningkatkan sumber daya manusia.
3. Peningkatan system peramalan, pengkajian, pengendalian dalam rangka penanggulangan organisme pengganggu tanaman pertanian.
4. Pemberdayaan petani dengan pengembangan corporate farming.
5. Penggunaan benih unggul bermutu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.
6. Penggunaan sarana produksi pertanian yang tepat, penerapan system manajemen usaha tani yang sesuai.
7. Menekan alih fungsi lahan sebagaimana diatur dalam Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
8. Sistem pengendalian internal dengan pemetaan resiko masing-masing kegiatan di semua bidang lingkup Dinas, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan tepat sasaran dan berdampak pada pencapaian out come kinerja Dinas Pertanian dengan baik.

Terkait dengan pencapaian sasaran kinerja Dinas Pertanian pada tahun 2025 maka agar semua target indikator sasaran mendapat kategori yang diharapkan dan sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah disepakati antara Kepala Daerah dengan Kepala Dinas Tahun 2025 maka tindak lanjut hasil evaluasi yang perlu dilakukan :

1. Perlindungan Lahan Pertanian dengan adanya Perda LP2B;
2. Mendorong tumbuhnya petani milineal;
3. Meningkatkan kualitas/mutu hasil pertanian melalui bimtek/pelatihan dan pendampingan;
4. Memberikan fasilitasi sarana dan prasarana pertanian
5. Pendampingan oleh penyuluh petani pada setiap kelompok tani (poktan/gapoktan);
6. Memaksimalkan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

7. Pemberian vaksinasi pada sapi dan ternak lainnya;
8. Pemberian pelayanan kesehatan hewan ternak

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian ini masih jauh dari sempurna, namun setidaknya dari LKjIP ini kita semua jadi mengetahui seberapa besar keberhasilan kinerja Instansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk khususnya Dinas Pertanian dalam melakukan pelayanan dan melaksanakan pembangunan di bidang pertanian dalam rangka mencapai tujuan Dinas Pertanian.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
(RPD 2024-2026)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ITSNA SHOFIANI, S.T., M.T.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pertanian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI HANDOKO TARUNA, S.STP, M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Nganjuk

Selaku atasan Pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 3 Januari 2025

Pihak kedua Pj. Bupati Nganjuk	Pihak Pertama Plt. Kepala Dinas Pertanian
SRI HANDOKO TARUNA, S.STP, M.Si	**ITSNA SHOFIANI, S.T., M.T.** Pembina Tingkat I NIP. 19790404 200312 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	0,176%
2	Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase peningkatan produksi peternakan	1,9%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	34.842.164.698	APBD
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	936.934.350	APBD
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	202.000.000	APBD
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	362.730.450	APBD
5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	436.407.100	APBD
6	Program Perizinan Usaha Pertanian	48.683.000	APBD
7	Penyuluhan Pertanian	675.722.100	APBD
JUMLAH		**37.504.641.698**	

Nganjuk, 3 Januari 2025

Pihak kedua
Pj. Bupati Nganjuk

SRI HANDOKO TARUNA, S.STP, M.Si

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pertanian

ITSNA SHOFIANI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19790404 200312 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
(RENSTRA 2025-2029)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IDA SHOBIHATIN, A.P., M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A

Jabatan : Bupati Nganjuk

Selaku atasan Pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 22 September 2025

Pihak kedua Bupati Nganjuk	Pihak Pertama Kepala Dinas Pertanian
Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A	**IDA SHOBIHATIN, A.P., M.Si.** Pembina Tingkat I NIP. 19750116 199412 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pendapatan Petani	Rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sektor pertanian	1,155
2	Meningkatnya produksi pertanian komoditas unggulan	Persentase peningkatan Produksi Pertanian komoditas unggulan	0,18%
3	Meningkatnya produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan	1,46%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	34.248.246.186	APBD
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.413.977.500	APBD, DBHCHT
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.226.400.000	APBD, DBHCHT
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	988.325.844	APBD, DAKNF
5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	420.843.650	APBD
6	Program Perizinan Usaha Pertanian	22.822.000	APBD
7	Penyuluhan Pertanian	5.669.500.350	APBD, DAKNF, DBHCHT
JUMLAH		**45.118.793.742**	

Nganjuk, 22 September 2025

Pihak kedua
Bupati Nganjuk

Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pertanian

IDA SHOBIHATIN, A.P., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750116 199412 2 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2025
(RPD 2024-2026)

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERTANIAN
Jl. AnjukLadang No. 37 Nganjuk 64417
Telp. (0358) 321728 Fax (0358) 325874 E-Mail : pertanian@nganjukkab.go.id.com

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 0007.5/ 006 /411.317/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUKTAHUN 2024-2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, maka perlu mengesahkan revisi IKU Perangkat Daerah Dinas Pertanian Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 05)
17. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024–2026.**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai tolok ukur pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 3 JANUARI 2025
an. Bupati Nganjuk
Plt. Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Nganjuk

Itsna Shofiani, S.T.,M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790404 200312 2 006

Lampiran KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERTANIAN
TAHUN 2024-2026
NOMOR : 0007.5/ 006 /411.317/2025
TANGGAL : 3 JANUARI 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	Meningkatkan produksi pertanian	Prosentase Peningkatan produksi pertanian	$\frac{Produksi\ pertanian\ tahun\ n - produksi\ pertanian\ tahun\ n-1}{produksi\ pertanian\ tahun\ n-1} x100\%$	Laporan Tribulan dan sinkronisasi dengan BPS	Bidang Produksi dan Perizinan Pertanian
2.	Meningkatkan produksi peternakan	Prosentase Peningkatan Produksi peternakan	$\frac{Produksi\ peternakan\ tahun\ n - produksi\ peternakan\ tahun\ n-1}{produksi\ peternakan\ tahun\ n-1} x100\%$	Laporan Tribulan dan sinkronisasi dengan BPS	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

An. Bupati Nganjuk
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Nganjuk

Itsna Shofiani, S.T.,M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790404 200312 2 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2025
(RENSTRA 2025-2029)

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERTANIAN
Jl. Anjuk Ladang No. 37 Nganjuk 64417
Telp. (0358) 321728 Fax (0358) 325874 E-Mail : diperta.nganjuk2023@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 0007.5/236/411.317/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti terbitnya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
b. bahwa pengukuran dan peningkatan kinerja di Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029.

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian atas sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk yang telah ditetapkan pada

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi komitmen bersama antara bidang atau unit organisasi di Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, yang kemudian diintegrasikan kedalam Dokumen Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Nganjuk
Pada tanggal : 22 September 2025

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Nganjuk

Ida Shobihatin, AP., M.Si
Pembina Tingkat I, (IV/b)
NIP. 19750116 199412 2 001

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : 0007.5/236/411.317/2025
Tanggal : 22 September 2025
Tentang : Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya pendapatan petani	Rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sektor pertanian	Rasio	**Konsep :** Mengukur rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sektor pertanian. Pendapatan petani merupakan hasil bersih yang diperoleh dari kegiatan usaha tani setelah dikurangi seluruh biaya produksi. Biaya investasi sektor pertanian mencakup seluruh pengeluaran yang digunakan untuk mendukung proses produksi pertanian, seperti sewa lahan dan alat, serta pembelian benih, pupuk, dan sarana lainnya **Definisi Operasional :** Rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sektor pertanian diperoleh dari rata-rata hasil rasio pendapatan petani masing-masing komoditas (pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) terhadap biaya investasi. **Frekuensi pengambilan data :** Tahunan **Formulasi Perhitungan :** $\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}\frac{Rk}{Ck}$	Laporan Tahunan Analisa Usaha Tani	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

NO	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				K = Jumlah komoditas (pangan, hortikultura, perkebunan,dan peternakan) Rk = Pendapatan petani masing-masing komoditas Ck = Biaya investasi/produksi masing-masing Komoditas **Cara Pengambilan Data :** Kompromin		
2.	Meningkatnya produksi pertanian komoditas unggulan	Persentase peningkatan Produksi Pertanian komoditas unggulan	Persentase	**Konsep :** Mengukur peningkatan produksi pertanian komoditas unggulan (padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai rawit, tembakau, cengkeh) **Definisi Operasional :** Persentase peningkatan produksi pertanian komoditas unggulan diperoleh dari rata-rata persentase peningkatan produksi masing-masing komoditas unggulan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara selisih produksi tahun n dan produksi tahun n-1 terhadap produksi tahun n-1. **Frekuensi pengambilan data :** Triwulan **Formulasi Perhitungan :** $\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}\frac{Pi;n - Pi;n\text{-}1}{Pi;n\text{-}1}\ x\ 100\%$ k = jumlah komoditas (padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai rawit, tembakau, cengkeh). $Pi;n$ = Produksi pertanian komoditas ke-i tahun ke-n.	Laporan Triwulan dan sinkronisasi dengan BPS	Bidang Produksi dan Perizinan Pertanian

NO	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				$Pi;n-1$ = Produksi pertanian komoditas ke-i tahun ke-n-1. **Cara Pengambilan Data :** Kompromin		
3.	Meningkatnya produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase	**Konsep :** Mengukur peningkatan produksi hasil peternakan (daging dan telur). **Definisi Operasional :** Persentase peningkatan produksi hasil peternakan diperoleh dari rata-rata perbandingan produksi masing-masing hasil peternakan (daging dan telur) tahun n dikurangi tahun n-1 dengan produksi hasil peternakan tahun n-1. **Frekuensi pengambilan data :** Triwulan **Formulasi Perhitungan :** $\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}\frac{Ti;n-Ti;n\text{-}1}{Ti;n\text{-}1}\ x\ 100\%$ k = jumlah jenis hasil peternakan (daging dan telur $Ti;n$ = Produksi hasil peternakan jenis ke-i tahun ke-n. $Ti;n-1$ = Produksi hasil peternakan jenis ke-i tahun ke-n-1 **Cara Pengambilan Data :** Kompromin	Laporan Triwulan dan sinkronisasi dengan BPS	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

DOKUMEN PENGANGGARAN
(IKHTISAR DPA) TAHUN 2025

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. NGANJUK

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN DPPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.4/3.27.0.00.0.00.01.0000/001/2025

SKPD : 3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian									Rp37.045.772.253,00	Rp458.869.445,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.504.641.698,00	Rp42.250.377.152,00	Rp1.739.738.378,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.990.115.530,00	Rp6.485.473.832,00	14.74	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				Rp37.045.772.253,00	Rp458.869.445,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.504.641.698,00	Rp42.250.377.152,00	Rp1.739.738.378,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.990.115.530,00	Rp6.485.473.832,00	14.74	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				Rp37.045.772.253,00	Rp458.869.445,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.504.641.698,00	Rp42.250.377.152,00	Rp1.739.738.378,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.990.115.530,00	Rp6.485.473.832,00	14.74	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp34.552.663.503,00	Rp289.501.195,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.842.164.698,00	Rp32.921.341.441,00	Rp1.326.904.745,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.248.246.186,00	(Rp593.918.512,00)	(1.73)	
3	**27**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp33.305.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.305.000,00	Rp19.292.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.292.200,00	(Rp14.012.800,00)	(72.63)	
3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp28.175.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.175.000,00	Rp15.890.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.890.200,00	(Rp12.284.800,00)	(77.31)	
3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.420.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.420.000,00	Rp2.394.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.394.000,00	(Rp1.026.000,00)	(42.86)	
3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.710.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.710.000,00	Rp1.008.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.008.000,00	(Rp702.000,00)	(69.64)	
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp32.158.675.162,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.158.675.162,00	Rp30.838.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.838.117.000,00	(Rp1.320.558.162,00)	(4.28)	
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp32.103.240.162,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.103.240.162,00	Rp30.786.785.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.786.785.000,00	(Rp1.316.455.162,00)	(4.28)	
3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp52.135.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.135.000,00	Rp49.291.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.291.000,00	(Rp2.844.000,00)	(5.77)	
3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.300.000,00	Rp2.041.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.041.000,00	(Rp1.259.000,00)	(61.69)	
3	**27**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
3	**27**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
3	27	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp781.338.285,00	Rp208.321.195,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp989.659.480,00	Rp484.587.185,00	Rp350.874.745,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp835.461.930,00	(Rp154.197.550,00)	(18.46)	
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp14.997.685,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.997.685,00	Rp14.997.685,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.997.685,00	Rp0,00	0.00	
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp208.321.195,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp208.321.195,00	Rp0,00	Rp350.874.745,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.874.745,00	Rp142.553.550,00	40.63	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp224.265.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp224.265.650,00	Rp185.363.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.363.400,00	(Rp38.902.250,00)	(20.99)	
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp46.819.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.819.950,00	Rp28.322.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.322.100,00	(Rp18.497.850,00)	(65.31)	
3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.700.000,00	Rp11.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.950.000,00	(Rp1.750.000,00)	(14.64)	
3	27	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp6.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.400.000,00	(Rp1.600.000,00)	(25.00)	
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp473.555.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp473.555.000,00	Rp237.554.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp237.554.000,00	(Rp236.001.000,00)	(99.35)	
3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp0,00	Rp76.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.500.000,00	Rp0,00	Rp148.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp148.500.000,00	Rp72.000.000,00	48.48	
3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp76.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.500.000,00	Rp0,00	Rp148.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp148.500.000,00	Rp72.000.000,00	48.48	
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp958.662.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp958.662.000,00	Rp958.662.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp958.662.000,00	Rp0,00	0.00	
3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp0,00	0.00	
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp205.262.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp205.262.000,00	Rp205.262.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp205.262.000,00	Rp0,00	0.00	
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp752.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp752.900.000,00	Rp752.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp752.900.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp620.683.056,00	Rp4.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp625.363.056,00	Rp620.683.056,00	Rp827.530.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.448.213.056,00	Rp822.850.000,00	56.82	
3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp38.987.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.987.400,00	Rp38.987.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.987.400,00	Rp0,00	0.00	
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp142.427.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.427.950,00	Rp142.427.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.427.950,00	Rp0,00	0.00	
3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp79.067.706,00	Rp4.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.747.706,00	Rp79.067.706,00	Rp4.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.747.706,00	Rp0,00	0.00	
3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp360.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp360.200.000,00	Rp360.200.000,00	Rp822.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.183.050.000,00	Rp822.850.000,00	69.55	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**				Rp873.775.050,00	Rp63.159.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp936.934.350,00	Rp1.294.250.150,00	Rp119.727.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.413.977.500,00	Rp477.043.150,00	33.74	
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**				Rp137.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp137.900.000,00	Rp843.170.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp843.170.950,00	Rp705.270.950,00	83.65	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun										T+1
									Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Kab. Nganjuk, Gondang, Balonggebang; Kab. Nganjuk, Jatikalen, Jatikalen; Kab. Nganjuk, Jatikalen, Perning; Kab. Nganjuk, Jatikalen, Pulowetan; Kab. Nganjuk, Lengkong, Bangle; Kab. Nganjuk, Lengkong, Banjardowo; Kab. Nganjuk, Ngluyu, Bajang; Kab. Nganjuk, Ngluyu, Ngluyu; Kab. Nganjuk, Ngronggot, Betet; Kab. Nganjuk, Ngronggot, Juwet; Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Kedungombo; Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Sumberkepuh; Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Warujayeng		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp737.470.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp737.470.950,00	Rp737.470.950,00	100.00	
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp137.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp137.900.000,00	Rp105.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.700.000,00	(Rp32.200.000,00)	(30.46)	
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**				Rp543.709.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp543.709.250,00	Rp287.988.400,00	Rp56.568.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp344.556.450,00	(Rp199.152.800,00)	(57.80)	
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp133.824.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.824.250,00	Rp97.163.900,00	Rp20.125.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.289.500,00	(Rp16.534.750,00)	(14.10)	
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp48.392.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.392.000,00	Rp7.492.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.492.500,00	(Rp40.899.500,00)	(545.87)	
3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp361.493.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp361.493.000,00	Rp183.332.000,00	Rp36.442.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp219.774.450,00	(Rp141.718.550,00)	(64.48)	
3	**27**	**02**	**2.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**				Rp192.165.800,00	Rp63.159.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp255.325.100,00	Rp163.090.800,00	Rp63.159.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp226.250.100,00	(Rp29.075.000,00)	(12.85)	
3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp156.940.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp156.940.800,00	Rp133.490.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.490.800,00	(Rp23.450.000,00)	(17.57)	
3	27	02	2.05	0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp35.225.000,00	Rp63.159.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.384.300,00	Rp29.600.000,00	Rp63.159.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.759.300,00	(Rp5.625.000,00)	(6.06)	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**				Rp202.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.000.000,00	Rp1.226.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.226.400.000,00	Rp1.024.400.000,00	83.53	
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**				Rp202.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.000.000,00	Rp1.226.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.226.400.000,00	Rp1.024.400.000,00	83.53	
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Kab. Nganjuk, Lengkong, Banjardowo; Kab. Nganjuk, Lengkong, Jatipunggur; Kab. Nganjuk, Lengkong, Kedungmlaten; Kab. Nganjuk, Lengkong, Sumberkepuh; Kab. Nganjuk, Ngluyu, Bajang; Kab. Nganjuk, Prambon, Nglawak; Kab. Nganjuk, Prambon, Sugihwaras		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.024.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.024.400.000,00	Rp1.024.400.000,00	100.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Kedungsoko		Rp202.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.000.000,00	Rp202.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**				Rp360.121.500,00	Rp2.608.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp362.730.450,00	Rp911.639.561,00	Rp76.686.283,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp988.325.844,00	Rp625.595.394,00	63.30	
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**				Rp319.221.400,00	Rp2.608.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp321.830.350,00	Rp267.281.850,00	Rp2.608.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp269.890.800,00	(Rp51.939.550,00)	(19.24)	
3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp73.989.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.989.650,00	Rp71.789.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.789.650,00	(Rp2.200.000,00)	(3.06)	
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp245.231.750,00	Rp2.608.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp247.840.700,00	Rp195.492.200,00	Rp2.608.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp198.101.150,00	(Rp49.739.550,00)	(25.11)	
3	**27**	**04**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**				Rp24.624.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.624.000,00	Rp24.624.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.624.000,00	Rp0,00	0.00	
3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp24.624.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.624.000,00	Rp24.624.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.624.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**				Rp8.921.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.921.500,00	Rp612.379.111,00	Rp74.077.333,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp686.456.444,00	Rp677.534.944,00	98.70	
3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.921.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.921.500,00	Rp8.921.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.921.500,00	Rp0,00	0.00	
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian; Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp603.457.611,00	Rp74.077.333,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp677.534.944,00	Rp677.534.944,00	100.00	
3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**				Rp7.354.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.354.600,00	Rp7.354.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.354.600,00	Rp0,00	0.00	
3	27	04	2.04	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.354.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.354.600,00	Rp7.354.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.354.600,00	Rp0,00	0.00	
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**				Rp436.407.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp436.407.100,00	Rp420.843.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp420.843.650,00	(Rp15.563.450,00)	(3.70)	
3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**				Rp436.407.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp436.407.100,00	Rp420.843.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp420.843.650,00	(Rp15.563.450,00)	(3.70)	
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp357.484.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp357.484.600,00	Rp367.973.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp367.973.150,00	Rp10.488.550,00	2.85	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp28.922.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.922.500,00	Rp13.520.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.520.500,00	(Rp15.402.000,00)	(113.92)	
3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp39.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.350.000,00	(Rp10.650.000,00)	(27.06)	
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**				Rp48.683.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.683.000,00	Rp22.822.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.822.000,00	(Rp25.861.000,00)	(113.32)	
3	**27**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**				Rp48.683.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.683.000,00	Rp22.822.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.822.000,00	(Rp25.861.000,00)	(113.32)	
3	27	06	2.01	0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp22.401.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.401.000,00	Rp9.756.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.756.000,00	(Rp12.645.000,00)	(129.61)	
3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.412.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.412.000,00	Rp8.206.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.206.000,00	(Rp8.206.000,00)	(100.00)	
3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.870.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.870.000,00	Rp4.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.860.000,00	(Rp5.010.000,00)	(103.09)	
3	**27**	**06**	**2.02**		**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
3	27	06	2.02	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
3	27	06	2.02	0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**				Rp572.122.100,00	Rp103.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp675.722.100,00	Rp5.453.080.350,00	Rp216.420.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.669.500.350,00	Rp4.993.778.250,00	88.08	
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**				Rp572.122.100,00	Rp103.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp675.722.100,00	Rp5.453.080.350,00	Rp216.420.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.669.500.350,00	Rp4.993.778.250,00	88.08	
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp389.502.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp389.502.000,00	Rp275.698.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp275.698.000,00	(Rp113.804.000,00)	(41.28)	
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU); DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp93.455.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.455.000,00	Rp565.921.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp565.921.850,00	Rp472.466.850,00	83.49	
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp32.840.100,00	Rp103.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp136.440.100,00	Rp24.630.600,00	Rp216.420.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp241.050.600,00	Rp104.610.500,00	43.40	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000.000,00	Rp2.000.000.000,00	100.00	
3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian; Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp56.325.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.325.000,00	Rp1.516.684.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.516.684.900,00	Rp1.460.359.900,00	96.29	
3	27	07	2.01	0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kab. Nganjuk, Gondang, Ja"an; Kab. Nganjuk, Gondang, Pandean; Kab. Nganjuk, Rejoso, Sukorejo		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.070.145.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.070.145.000,00	Rp1.070.145.000,00	100.00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp9.554.323.841,00
Februari	Rp9.734.896.982,00
Maret	Rp8.429.989.499,00
April	Rp2.988.751.912,00
Mei	Rp3.152.859.237,00
Juni	Rp2.335.614.915,00
Juli	Rp1.664.125.555,00
Agustus	Rp447.400.264,00
September	Rp1.725.420.194,00
Oktober	Rp2.481.048.916,00
November	Rp896.509.612,00
Desember	Rp579.174.603,00
Jumlah	**Rp43.990.115.530,00**

Nganjuk, Tanggal 20 Oktober 2025
KEPALA DINAS PERTANIAN

IDA SHOBIHATIN, AP, M.Si
NIP. 197501161994122001

Mengesahkan,
PPKD

Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si
NIP. 196805111992022001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Drs. ADAM MUHARTO, A.P., M.Si	197305111993111002	Wakil Ketua	
3.	Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si	196805111992022001	Sekretaris	

*) Sesuai periodisasi SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. NGANJUK

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN DPPA-PENDAPATAN
SKPD

Nomor : DPPA/A.4/3.27.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
3.27.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pertanian**				**Rp262.086.000,00**	**Dinas Pertanian**				**Rp153.038.000,00**	**(Rp109.048.000,00)**	**(71.26)**
4	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp262.086.000,00**	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp153.038.000,00**	**(Rp109.048.000,00)**	**(71.26)**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp262.086.000,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp153.038.000,00**	**(Rp109.048.000,00)**	**(71.26)**
4.1.02	**Retribusi Daerah**				**Rp32.038.000,00**	**Retribusi Daerah**				**Rp33.478.000,00**	**Rp1.440.000,00**	**4.30**
4.1.02.01	**Retribusi Jasa Umum**				**Rp5.760.000,00**	**Retribusi Jasa Umum**				**Rp7.200.000,00**	**Rp1.440.000,00**	**20.00**
4.1.02.01.05	**Retribusi Pelayanan Pasar**				**Rp5.760.000,00**	**Retribusi Pelayanan Pasar**				**Rp7.200.000,00**	**Rp1.440.000,00**	**20.00**
4.1.02.01.05.0003	**Retribusi Kios**				**Rp5.760.000,00**	**Retribusi Kios**				**Rp7.200.000,00**	**Rp1.440.000,00**	**20.00**
	:: Retribusi Kios				**Rp5.760.000,00**	**:: Retribusi Kios**				**Rp7.200.000,00**	**Rp1.440.000,00**	**20.00**
	::: Sewa Kios SPA Sukomoro (15 unit x 12 bulan x Rp. 40.000)				**Rp5.760.000,00**	**::: Sewa Kios SPA Sukomoro (15 unit x 12 bulan x Rp. 40.000)**				**Rp7.200.000,00**	**Rp1.440.000,00**	**20.00**
	Retribusi Kios	1	Tahun	1 Tahun	Rp5.760.000,00	Retribusi Kios	1	Tahun	1 Tahun	Rp7.200.000,00	**Rp1.440.000,00**	**20.00**
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**				**Rp26.278.000,00**	**Retribusi Jasa Usaha**				**Rp26.278.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
4.1.02.02.07	**Retribusi Rumah Potong Hewan**				**Rp26.278.000,00**	**Retribusi Rumah Potong Hewan**				**Rp26.278.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
4.1.02.02.07.0001	**Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan**				**Rp26.278.000,00**	**Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan**				**Rp26.278.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
	:: Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan				**Rp26.278.000,00**	**:: Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan**				**Rp26.278.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
	::: Rumah Potong Hewan Kertosono - Sapi Jantan 250 ekor x Rp.20.000 = Rp.5.000.000 - Sapi betina 30 ekor x Rp.30.000 = Rp.900.000				**Rp5.900.000,00**	**::: Rumah Potong Hewan Kertosono - Sapi Jantan 250 ekor x Rp.20.000 = Rp.5.000.000 - Sapi betina 30 ekor x Rp.30.000 = Rp.900.000**				**Rp5.900.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	1	Tahun	1 Tahun	Rp5.900.000,00	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	1	Tahun	1 Tahun	Rp5.900.000,00	**Rp0,00**	**0.00**
	::: Rumah Potong Hewan Nganjuk - Sapi jantan 550 ekor x Rp.20.000 = Rp.11.000.000 - Sapi betina 50 ekor x Rp.30.000 = Rp.1.500.000 - Unggas 19.695 ekor x Rp. 400 =Rp.7.878.000				**Rp20.378.000,00**	**::: Rumah Potong Hewan Nganjuk - Sapi jantan 550 ekor x Rp.20.000 = Rp.11.000.000 - Sapi betina 50 ekor x Rp.30.000 = Rp.1.500.000 - Unggas 19.695 ekor x Rp. 400 =Rp.7.878.000**				**Rp20.378.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	1	Tahun	1 Tahun	Rp20.378.000,00	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	1	Tahun	1 Tahun	Rp20.378.000,00	**Rp0,00**	**0.00**
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**				**Rp230.048.000,00**	**Lain-lain PAD yang Sah**				**Rp119.560.000,00**	**(Rp110.488.000,00)**	**(92.41)**
4.1.04.01	**Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**				**Rp230.048.000,00**	**Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**				**Rp119.560.000,00**	**(Rp110.488.000,00)**	**(92.41)**

Kode Rekening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
4.1.04.01.05	**Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya**				**Rp230.048.000,00**	**Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya**				**Rp119.560.000,00**	**(Rp110.488.000,00)**	**(92.41)**
4.1.04.01.05.0064	**Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman**				**Rp230.048.000,00**	**Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman**				**Rp119.560.000,00**	**(Rp110.488.000,00)**	**(92.41)**
	:: Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman				**Rp230.048.000,00**	**:: Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman**				**Rp119.560.000,00**	**(Rp110.488.000,00)**	**(92.41)**
	::: Hasil penjualan tanaman (calon benih) dari BBI Balonggebang (2,054 kg x 7 ha x Rp. 8.000 x 2 musim)				**Rp230.048.000,00**	**::: Hasil penjualan tanaman (calon benih) dari BBI Balonggebang (2,054 kg x 7 ha x Rp. 8.000 x 2 musim)**				**Rp119.560.000,00**	**(Rp110.488.000,00)**	**(92.41)**
	Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman	1	Tahun	1 Tahun	Rp230.048.000,00	Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman	1	Tahun	1 Tahun	Rp119.560.000,00	**(Rp110.488.000,00)**	**(92.41)**
				Jumlah	**Rp262.086.000,00**				**Jumlah**	**Rp153.038.000,00**		

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.080.000,00
Februari	Rp2.080.000,00
Maret	Rp3.460.000,00
April	Rp3.040.000,00
Mei	Rp2.080.000,00
Juni	Rp3.040.000,00
Juli	Rp2.500.000,00
Agustus	Rp3.520.000,00
September	Rp3.520.000,00
Oktober	Rp123.080.000,00
November	Rp2.100.000,00
Desember	Rp2.538.000,00
Jumlah	**Rp153.038.000,00**

Nganjuk, Tanggal 20 Oktober 2025
KEPALA DINAS PERTANIAN

IDA SHOBIHATIN, AP, M.Si
NIP. 197501161994122001

Mengesahkan,
PPKD

Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si
NIP. 196805111992022001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Drs. ADAM MUHARTO, A.P., M.Si	197305111993111002	Wakil Ketua	
3.	Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si	196805111992022001	Sekretaris	

*) Sesuai periodisasi SPD

BUKTI DUKUNG KINERJA
PENCAPAIAN IKU TAHUN 2025
(RPD 2024-2026)



LAPORAN AKHIR

NILAI TUKAR PETANI (NTP)

KABUPATEN NGANJUK

TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 2
1.2. Dasar Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sasaran 5
1.5. Ruang Lingkup 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6
2.1 Konsep dan Definisi 7
2.2 Nilai Tukar Petani Sebagai Indikator Kesejahteraan Petani 10
2.2.1 Indeks Harga yang Diterima Petani (It) 16
2.2.2 Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) 16
2.2.3 Klasifikasi Indeks 17
2.3 Konsep Nilai Tukar Petani (NTP) 19
2.4 Pendapatan 20
2.5 Harga yang Diterima Petani (HT) 20
2.6 Harga yang Dibayar Petani (HB) 21
2.7 Kebijakan Pembangunan dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani 22
BAB III METODE PENELITIAN 25
3.1 Sumber Data 26
3.2 Langkah-Langkah Kegiatan 26
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN NGANJUK 28
4.1 Gambaran Wilayah 29
4.1.1 Luas dan Batas Wilayah Kabupaten Nganjuk 29
4.1.2 Letak dan Kondisi Geografis 31

4.1.3 Geologi 32
4.1.4 Topografi 33
4.1.5 Hidrologi 34
4.1.6 Klimatologi 34
4.1.7 Aspek Demografi 35
4.2 Gambaran Rumah Tangga Pertanian di Kabupaten Nganjuk 37
4.3 Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan 39
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 44
5.1 Nilai Tukar Petani Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 (2018=100) 45
5.2 Nilai Tukar Petani Kabupaten Nganjuk Subsektor Tanaman Pangan Tahun 2024 (2018=100) 50
5.3 Nilai Tukar Petani Kabupaten Nganjuk Subsektor Hortikultura Tahun 2024 (2018=100) 53
5.4 Nilai Tukar Petani Kabupaten Nganjuk Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2024 (2018=100) 57
5.5 Nilai Tukar Petani Kabupaten Nganjuk Subsektor Peternakan Tahun 2024 (2018=100) 61
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 65
6.1 Kesimpulan 66
6.2 Rekomendasi 67
DAFTAR PUSTAKA 69
LAMPIRAN 71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Nganjuk 29
Gambar 4.2 Proporsi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (%) 37
Gambar 5.1 Perkembangan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Nganjuk Selama Tahun 2024 46
Gambar 5.2 Perkembangan NTP, It, dan Ib di Kabupaten Nganjuk Selama Tahun 2024 47
Gambar 5.3 Perkembangan NTP, It, dan Ib Subsektor Tanaman Pangan di Kabupaten Nganjuk Selama Tahun 2024 50
Gambar 5.4 Perkembangan NTP, It, dan Ib Subsektor Hortikultura di Kabupaten Nganjuk Selama Tahun 2024 54
Gambar 5.5 Perkembangan NTP, It, dan Ib Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat di Kabupaten Nganjuk Selama Tahun 2024 58
Gambar 5.6 Perkembangan NTP, It, dan Ib Subsektor Peternakan di Kabupaten Nganjuk Selama Tahun 2024 61

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 30
Tabel 4.2 Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 31
Tabel 4.3 Suhu Menurut Bulan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 33
Tabel 4.4 Curah Hujan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 35
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Nganjuk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024 35
Tabel 4.6 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan, Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum, dan Usaha Pertanian Lainnya Menurut Kecamatan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 38
Tabel 4.7 Karakteristik Rumah Tangga Pertanian Menurut Subsektor dan Jenis Usaha di Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2023 39
Tabel 4.8 Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dan 2024 39
Tabel 4.9 Produksi Hortikultura Kabupaten Nganjuk (kuintal) Tahun 2023 dan 2024 40
Tabel 4.10 Produksi Perkebunan Kabupaten Nganjuk (Ton) Tahun 2023 dan 2024 41
Tabel 4.11 Produksi Peternakan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dan 2024 42
Tabel 5.1 Rata-Rata Tahunan NTP, Indeks Harga yang Diterima (It) dan Indeks Harga yang Dibayar (Ib) Petani Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 48
Tabel 5.2 Nilai Tukar Petani Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Nganjuk 49
Tabel 5.3 Rata-Rata Tahunan NTP, Indeks Harga yang Diterima (It) dan Indeks Harga yang Dibayar (Ib) Subsektor Tanaman Pangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 52
Tabel 5.4 Rata-Rata Tahunan NTP, Indeks Harga yang Diterima (It) dan Indeks Harga yang Dibayar (Ib) Subsektor Hortikultura Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 56

Tabel 5.5 Rata-Rata Tahunan NTP, Indeks Harga yang Diterima (It) dan Indeks Harga yang Dibayar (Ib) Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 59
Tabel 5.6 Rata-Rata Tahunan NTP, Indeks Harga yang Diterima (It) dan Indeks Harga yang Dibayar (Ib) Subsektor Peternakan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 63

BAB I
PENDAHULUAN

Pengertian Petani

Orang yang mengusahakan/mengelola usaha pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perburuan dan perikanan, atas risiko sendiri dengan tujuan untuk dijual.



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pelaksanaaan pembangunan, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan masyarakat dalam menetapkan arah dan tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana pembangunan diperlukan supaya kegiatan pembangunan lebih terarah, efisien dan efektif. Rencana pembangunan daerah memuat visi, misi dan strategi pembangunan sehingga tujuan dan sasaran pembangunan yang diinginkan dapat tercapai. Disamping itu, dalam rangka mewujudkan program dan implementasi perencanaan yang sesuai dengan visi dan misi maka sangat diperlukan dukungan data statistik yang akurat dan valid. Program pembangunan berdasarkan data sudah menjadi kebutuhan bagi pemerintahan saat ini, karena dengan berbasis data maka kegiatan pembangunan menjadi lebih efisien, efektif dan hasilnya dapat lebih optimal serta bisa terukur.

Salah satu tujuan strategis pembangunan adalah terwujudnya percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan produktivitas melalui pengembangan ekonomi kerakyatan serta penguatan unit-unit usaha dan lembaga-lembaga ekonomi. Program yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan ekonomi kerakyatan, sehingga terwujud suatu sistem ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada mekanisme pasar saja, namun juga mengacu kepada Pasal 33 UUD Republik Indonesia 1945 yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perluasan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, peningkatan output, serta pengoptimalan hubungan antara sektor primer, sekunder, dan tersier sesuai potensi daerah. Keberhasilan pembangunan dievaluasi melalui data pendukung,

khususnya di sektor pertanian. Data yang lengkap dan aktual mempermudah pemerintah dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan merencanakan kebijakan ke depan. Salah satu indikator penting untuk mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian adalah Nilai Tukar Petani (NTP).

NTP adalah indikator strategis untuk menilai kesejahteraan petani melalui perbandingan antara harga produk yang diterima petani dengan harga kebutuhan konsumsi, biaya produksi, dan investasi yang harus dibayar. Pengukuran NTP penting karena memberikan gambaran nyata tentang daya beli petani, efisiensi usaha tani, dan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mengembangkan usaha.

Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk berencana melakukan perhitungan NTP untuk memahami secara mendalam kondisi kesejahteraan petani di wilayahnya. Data ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pertanian yang telah berjalan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi petani, seperti fluktuasi harga atau tingginya biaya produksi, serta merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Perhitungan NTP juga diperlukan untuk memastikan bahwa program pembangunan sektor pertanian berjalan secara efektif, berorientasi pada peningkatan produktivitas, dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dari kegiatan pengukuran Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
7. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria; dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan pengukuran Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Nganjuk adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani Kabupaten Nganjuk yang diukur melalui indikator Nilai Tukar Petani (NTP).

Adapun tujuan kegiatan pengukuran Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

1. Menghitung Indeks Harga Yang Diterima Petani (It)

   Indeks harga yang diterima petani (It) untuk mengidentifikasi fluktuasi harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani dan mendukung analisis pendapatan sektor pertanian.
2. Menghitung Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib)

   Indeks harga yang dibayar petani (Ib) untuk menganalisis fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi petani, termasuk kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian.
3. Menghitung Nilai Tukar Petani (NTP)

   Nilai Tukar Petani (NTP) Sebagai indikator kesejahteraan petani yang mencerminkan kemampuan menukarkan hasil produksi dengan kebutuhan

konsumsi dan produksi. NTP juga menjadi data dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan sektor pertanian.

1.4. Sasaran

Sasaran kegiatan pengukuran Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Nganjuk adalah tersusunnya Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Nganjuk baik nilai gabungan ataupun nilai NTP pada masing-masing subsektor yang dapat dijadikan alat ukur kemampuan tukar komoditas produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani dan keperluan petani dalam menghasilkan produk pertanian.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari kegiatan Penghitungan dan Analisis Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

1. Menghitung Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024
2. Menganalisa hasil penghitungan NTP meliputi:
    1) Faktor yang mempengaruhi dinamika NTP Kabupaten Nganjuk.
    2) Memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk khususnya dalam bidang pertanian.
3. Sektor pertanian yang dicakup dalam pengolahan NTP meliputi 4 subsektor yaitu:
    1) Subsektor Tanaman Pangan;
    2) Subsektor Tanaman Hortikultura;
    3) Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat; dan
    4) Subsektor Peternakan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Arti Angka NTP

>100

Kenaikan harga barang produksi relatif lebih besar dari kenaikan harga barang konsumsi & biaya produksi.

=100

Kenaikan/penurunan harga produksi sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi & biaya produksi

<100

Kenaikan harga barang produksi relatif lebih kecil di bandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsi & biaya produksi

Subsektor yang Dicakup









BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep dan Definisi

Berikut merupakan konsep dan definisi yang digunakan dalam Penghitungan dan Analisis Nilai Tukar Petani Kabupaten Nganjuk:

1. Petani adalah orang yang mengusahakan usaha pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan) atas resiko sendiri dengan tujuan untuk dijual, baik sebagai petani pemilik maupun petani penggarap (sewa/kontrak/bagi hasil). Orang yang bekerja di sawah/ladang orang lain dengan mengharapkan upah (buruh tani) bukan termasuk petani.
2. Harga yang diterima petani adalah rata-rata harga produsen dari hasil produksi petani sebelum ditambahkan biaya transportasi/pengangkutan dan biaya pengepakan ke dalam harga penjualannya atau disebut *farm gate* (harga di sawah/ladang setelah pemetikan). Pengertian rata-rata harga adalah harga yang bila dikalikan dengan volume penjualan petani akan mencerminkan total uang yang diterima petani.
3. Harga yang dibayar petani adalah rata-rata harga eceran barang/jasa yang dikonsumsi atau dibeli petani, baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri maupun untuk keperluan biaya produksi pertanian. Data ini mencakup harga barang/jasa untuk keperluan produksi pertanian dan untuk keperluan konsumsi rumah tangga.
4. Nilai Konsumsi adalah jumlah nilai yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memperoleh suatu komoditas untuk dikonsumsi. Nilai konsumsi suatu komoditas merupakan perkalian harga komoditas dengan kuantitas (banyaknya) yang dikonsumsi pada periode dasar. Dalam penghitungan indeks ada 2 jenis nilai konsumsi, yang pertama adalah nilai konsumsi dasar (PoQo) yang diperoleh dari hasil Survei Penyempurnaan Diagram Timbang

Nilai Tukar Petani (SPDT NTP), yaitu rata-rata nilai pengeluaran rumah tangga sebulan untuk setiap jenis barang/jasa yang dikonsumsi, yang kedua adalah nilai konsumsi pada bulan berjalan (PnQo) yang diperoleh dengan cara mengalikan harga bulan berjalan dengan kuantitas konsumsi pada tahun dasar. Di dalam penghitungannya dilakukan secara bertahap dengan menggunakan relatif harga (RH).

5. Relatif Harga (RH) merupakan rasio perbandingan harga suatu komoditas pada suatu periode waktu tertentu terhadap harga pada periode waktu sebelumnya. Data harga per komoditas diperoleh dari pemantauan harga konsumen pedesaan dan harga produsen melalui Survei Harga Pedesaan (SHPed) di kecamatan dan digunakan untuk menghitung RH komoditas kecamatan dengan rumus :

$$RH_{(t)ji} = \frac{P_{(t)ji}}{P_{(t-1)ji}} \times 100$$

Dimana,

$RH_{(t)ji}$: RH pada bulan ke *t* komoditas *j* di kecamatan ke *i*

$P_{(t)ji}$: Harga pada bulan ke *t* komoditas *j* di kecamatan ke *i*

$P_{(t-1)ji}$: Harga pada bulan ke *t-1* komoditas *j* di kecamatan ke *i*

Dari hasil penghitungan RH kecamatan, kemudian dihitung RH komoditas kabupaten dengan cara merata-ratakan RH kecamatan sebagai berikut :

$$\overline{RH}_{(t)j} = \frac{\sum_{i=1}^{k} RH_{(t)ji}}{k} \times 100$$

Dimana,

$\overline{RH}_{(t)j}$: Rata – rata RH kabupaten pada bulan ke *t* untuk komoditas *j*

$RH_{(t)ji}$: RH pada bulan ke *t* untuk komoditas *j* di kecamatan *i*

k : jumlah kecamatan

6. Paket Komoditas adalah jenis barang/jasa yang dipantau harganya untuk penghitungan NTP. Paket komoditas yang digunakan untuk penghitungan NTP Jawa Timur 2023 merupakan hasil Survei Penyempurnaan Diagram

Timbang Nilai Tukar Petani (SPDT NTP) di Jawa Timur pada tahun 2017, yang dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok komoditas, yaitu:

a) Kelompok komoditas yang digunakan untuk menghitung indeks harga yang dibayar petani (Ib), terdiri dari 2 (dua) sub kelompok, yaitu :
   - Konsumsi Rumah tangga
   - Biaya produksi dan penambahan barang modal

b) Kelompok komoditas yang digunakan untuk menghitung indeks harga yang diterima petani (It), terdiri dari 5 (lima) sub kelompok, yaitu :
   - Tanaman Pangan
   - Tanaman Hortikultura
   - Tanaman Perkebunan Rakyat
   - Peternakan
   - Perikanan

7. Diagram Timbang adalah diagram yang menunjukkan *share* nilai konsumsi/produksi komoditas terhadap total pengeluaran/produksi rumah tangga petani. Diagram timbang tersebut juga mencerminkan pola konsumsi rumah tangga petani dan pola produksi (potensi usaha tani) di suatu daerah.
8. Nilai Tukar Petani (NTP) adalah angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Indeks harga yang diterima petani adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Indeks harga yang dibayar petani adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk proses produksi pertanian.
9. Indeks Harga yang diterima petani (It) dapat digunakan untuk melihat fluktuasi harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani. Indeks ini juga digunakan sebagai data penunjang dalam penghitungan nilai produksi

sektor pertanian.

10. Indeks Harga yang dibayar petani (Ib), dapat digunakan untuk melihat fluktuasi harga komoditas/jasa yang dikonsumsi oleh petani serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.

2.2 Nilai Tukar Petani Sebagai Indikator Kesejahteraan Petani

Unsur penting untuk dijadikan sebagai indikator kesejahteraan petani dilihat dari besarnya pendapatan dan perimbangannya dengan pengeluaran. Dalam hal tersebut salah satu alat ukur yang sering digunakan adalah nilai tukar petani (NTP). Perhitungan NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Nilai tukar petani menggambarkan tingkat daya tukar atau daya beli petani terhadap produk yang dibeli atau dibayar petani yang mencakup konsumsi dan input produksi yang dibeli. Semakin tinggi nilai tukar petani, semakin baik daya beli petani terhadap produk konsumsi dan input produksi tersebut, dan berarti secara relatif lebih sejahtera, dan sebaliknya. Batasan Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan atau rasio antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani. Hubungan NTP dengan tingkat kesejahteraan petani sebagai produsen secara nyata terlihat dari posisi (It) yang berada pada pembilang (enumerator) NTP. Apabila harga barang atau produk pertanian naik, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka penerimaan atau pendapatan petani dari hasil panennya juga akan bertambah. Perkembangan harga yang ditunjukkan (It) merupakan sebuah indikator tingkat kesejahteraan petani produsen dari sisi pendapatan (Ali Rosidi, 2007).

Pengetahuan tentang perilaku nilai tukar petani, dampak pembangunan dan identifikasi faktor-faktor penentu nilai tukar akan sangat berguna bagi perencanaan kebijakan pembangunan, perbaikan program-program pembangunan, serta alokasi anggaran yang lebih berpihak pada usaha-usaha peningkatan kesejahteraan petani. Secara ilmiah NTP mempunyai karakteristik

yang cenderung menurun. Hal ini berkaitan dengan karakteristik yang melekat dari komoditi pertanian dan non pertanian, yaitu: (1) Elastisitas pendapatan produk pertanian bersifat inelastik, sementara produk non pertanian cenderung lebih elastik, (2) Perubahan teknologi dengan laju yang berbeda menguntungkan produk manufaktur, dan (3) Perbedaan dalam struktur pasar, dimana struktur pasar dari produk pertanian cenderung kompetitif, sementara struktur pasar produk manufaktur cenderung kurang kompetitif dan mengarah ke pasar monopoli atau oligopoli (Rachmat M. , 2000). Konsep NTP yang dikembangkan BPS, identik dengan konsep nisbah paritas (*parity ratio*) yang dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1930an (Tomek, 1981). Konsep tersebut sampai sekarang masih digunakan dan secara dinamis dilakukan beberapa modifikasi sesuai dengan perubahan relatif komoditas penyusunnya. Konsep nisbah paritas dirumuskan sebagai berikut:

$$Nisbah\ Paritae = \frac{(indeks\ harga\ yang\ diterima\ sekarang)(tahun\ dasar)}{(indeks\ harga\ yang\ dibayar\ sekarang)(tahun\ dasar)} \times 100$$

Teori keseimbangan umum menurut (Rachmat M. , 2000) menunjukkan bahwa NTP dapat dijadikan sebagai alat ukur tingkat kesejahteraan petani. Secara konsep, arah dari NTP (meningkat atau menurun) merupakan resultan dari arah setiap komponen penyusunnya, yaitu komponen penerimaan yang mempunyai arah positif terhadap kesejahteraan petani dan komponen pembayaran yang mempunyai arah negatif terhadap kesejahteraan. Apabila laju komponen penerimaan lebih tinggi dari laju pembayaran maka nilai tukar petani akan meningkat, demikian sebaliknya. Pergerakan naik atau turun NTP menggambarkan naik turunnya tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan BPS, arti angka Nilai Tukar Petani ada 3 macam, yaitu:

- NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga

produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.

- NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

  Secara umum komponen NTP antara lain adalah :

  1) Komponen pertama adalah indeks harga yang diterima petani (It), menggambarkan fluktuasi harga barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.
  2) Komponen kedua indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang terdiri dari indeks harga yang dibayar petani untuk konsumsi rumah tangga atau Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) dan indeks harga yang dibayar petani untuk kelompok biaya produksi atau Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (IBPPBM). IKRT digunakan untuk melihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani dan dikenal dengan Inflasi Pedesaan.

Secara konsepsi NTP mengukur daya tukar dari komoditas pertanian yang dihasilkan petani terhadap produk yang dibeli petani untuk keperluan konsumsi dan keperluan dalam memproduksi usaha tani. Nilai tukar petani (NTP) didefinisikan sebagai rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Pengukuran NTP dinyatakan dalam bentuk indeks sebagai berikut:

$$NTP = \frac{lt}{lb} x100$$

Dimana,

NTP : Nilai Tukar Petani

It : Indeks harga yang diterima petani

Ib : Indeks harga yang dibayar petani

Pertimbangan dan asumsi yang mendasari penggunaan formula di atas

adalah :

1. Trend harga tidak dipengaruhi perbedaan kualitas atau spesifikasi komoditas.
2. Perbedaan harga komoditas antar kabupaten tidak berpengaruh.
3. Dapat dilakukan penggantian spesifikasi atau penggantian jenis barang

Formula perhitungan It dan Ib adalah formula Indeks Laspeyres yang dikembangkan (*Modified Laspeyres Indeces*), yaitu:

$$l_n = \frac{\sum_{i=1}^{k} \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} Q_{0i}}{\sum_{i=1}^{k} P_{0i} Q_{0i}}$$

Dimana,

I_n : Indeks harga bulan ke-n baik untuk It maupun Ib

P_{ni} : Harga jenis barang i, bulan ke-n

$P_{(n-1)i}$: Harga jenis barang i, bulan ke-(n-1)

$P_{ni} / P_{(n-1)i}$: Relatif Harga bulan ke-n dibanding n-1 untuk jenis barang i

P_{oi} : Harga tahun dasar jenis barang i

Q_{oi} : Kuantitas tahun dasar jenis barang i

k : Jumlah jenis barang paket komoditas

Indeks Gabungan merupakan gabungan dari seluruh indeks yang dihitung dalam suatu wilayah, baik (It) maupun (Ib). Penggabungan dilakukan berdasarkan jumlah rumah tangga petani masing-masing kecamatan. Indeks gabungan untuk (It) dan (Ib) sebagai berikut :

$$l_{n_Njk} = \frac{\sum_{j=1}^{13} l_{nj} \times W_j}{100}$$

Dimana,

I_{n_Njk} : Indeks Kab. Nganjuk bulan ke n

I_{nj} : Indeks kecamatan j bulan ke n

W_j : Penimbang kecamatan yaitu rasio jumlah rumah tangga masing-masing kecamatan terhadap jumlah rumah tangga keseluruhan.

Penanda kesejahteraan yang unik bagi rumah tangga tani praktis tidak ada,

sehingga NTP menjadi pilihan satu-satunya bagi pengamat pembangunan pertanian dalam menilai tingkat kesejahteraan petani. Dengan demikian, NTP merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani. Semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani (Simatupang & Maulana, 2008).

Dalam penyusunan dan penghitungan indeks harga, terdapat empat komponen yaitu paket komoditas, diagram timbang, tahun dasar dan data harga.

A. Penyusunan paket komoditas

a) Paket komoditas Indeks Harga yang Diterima Petani (It) mencakup barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan dan dijual petani. Kriteria pemilihan jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas adalah:

- Jumlah hasil produksi yang dihasilkan oleh petani.
- Mempunyai nilai *"market surplus"* cukup besar. *Market surplus* adalah perbandingan antara nilai produksi yang dijual dengan nilai produksinya dari setiap jenis tanaman pertanian.
- Tersedia data harganya pada tahun dasar dan juga dapat dipantau kesinambungannya.

b) Paket komoditas Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) mencakup barang dan jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian. Kriteria pemilihan jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas adalah:

- Banyak dikonsumsi rumah tangga dan atau banyak digunakan dalam memproduksi hasil pertanian.
- Mempunyai peran cukup besar terhadap total pengeluaran.
- Tersedia data harganya pada tahun dasar dan juga dapat dipantau kesinambungannya.

c) Jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas, diperoleh dari sumber-sumber berikut:

- Survei Harga Produsen Pedesaan (HPD).
- Survei Harga Konsumen Pedesaan (HKD).
- Survei Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (SDT NTP).
- Sensus Pertanian.
- Survei Struktur Ongkos Usaha Tani.
- Susenas Modul Konsumsi.
- Survei Biaya Hidup.

B. Diagram timbang

a) Nilai diagram timbang/penimbang yang digunakan dalam penyusunan It adalah nilai produksi yang dijual oleh petani dari setiap jenis barang hasil pertanian subsektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan serta perikanan tangkap dan budidaya. Sebagai data penunjang dalam penghitungan diagram timbangan ini diperlukan tiga macam data yaitu:

- Kuantitas produksi.
- Daftar Harga Produsen Pedesaan (HPD).
- Persentase *market surplus*.

b) Nilai diagram timbang/penimbang dalam penyusunan Ib adalah nilai konsumsi/nilai biaya barang-barang atau jasa yang dikeluarkan/dibeli baik untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk memproduksi hasil pertanian. Data penunjang yang digunakan adalah nilai konsumsi yang dibeli baik barang makanan maupun barang/jasa non makanan.

C. Tahun Dasar

Tahun dasar adalah periode waktu yang ditentukan sebagai permulaan dihitungnya angka indeks. Penentuan tahun dasar disebabkan adanya beberapa pertimbangan, antara lain:

- Kondisi perekonomian nasional stabil;
- Tersedianya data yang lengkap,

- Tidak adanya gejolak pada bidang ekonomi, hankam, sosial budaya dan politik.

2.2.1 Indeks Harga yang Diterima Petani (It)

Penimbang yang digunakan untuk It adalah nilai produksi yang dijual petani dari setiap komoditas hasil pertanian. Sebagai data pokok untuk perhitungan diagram timbang diperlukan tiga macam data yaitu kuantitas produksi, harga produsen dan persentase barang yang dijual (*market surplus*).

a) Kuantitas Produksi Tiap Tanaman

Data kuantitas produksi untuk subsektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan diperoleh dari hasil Survei Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani 2017 (SPDT NTP 2017).

b) Harga Produsen

Data harga produsen tahun dasar 2018 diperoleh dari hasil pencacahan Daftar HD-1, HD-2, HD-3, HD-4, HD-5.1 dan HD-5.2.

c) Nilai Produksi Komoditas yang Dijual

Nilai produksi komoditas yang dijual diperoleh dari SPDT NTP 2017.

2.2.2 Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)

Penimbang setiap jenis barang yang tercakup dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga petani, biaya produksi dan penambahan barang modal adalah nilai setiap jenis barang yang dibeli petani, tidak termasuk nilai barang yang diproduksi sendiri.

a) Kelompok Konsumsi Rumah Tangga (KRT)

Sumber data diperoleh dari hasil SPDT mengenai konsumsi/pengeluaran rumah tangga. Karena penimbang yang diinginkan adalah nilai konsumsi total seluruh rumah tangga petani selama setahun, maka nilai konsumsi yang didapat dari hasil SPDT ini harus dikalikan dengan jumlah petani atau

rumah tangga pedesaan dalam periode waktu selama setahun.

Data jumlah petani atau rumah tangga pedesaan diperoleh dari hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018. Jenis barang (komoditas) yang terdapat dalam SPDT digunakan sebagai rincian komoditas pada Daftar HKD-1, Daftar HKD-2.1 dan Daftar HKD-2.2 untuk dipantau perkembangan harganya setiap bulan.

b) Kelompok Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)

- Subkelompok Biaya Produksi, Upah dan Lainnya.

  Penimbang untuk kelompok ini adalah pengeluaran ongkos ongkos/biaya yang dibeli petani (tidak termasuk ongkos produksi yang berasal dari produksi sendiri). Data tersebut didapat dari hasil pengolahan SPDT dan disesuaikan dengan Survei Struktur Ongkos Usaha Pertanian.

- Subkelompok Penambahan Barang Modal

  Jenis barang yang dicakup pada kelompok ini adalah barang yang penggunaannya tahan lama seperti cangkul, bajak dan lainnya. Penimbang untuk kelompok ini diperoleh dari SPDT dan disesuaikan dengan Survei Khusus Pendapatan Nasional dan Tabel Input-Output berupa persentase penambahan barang modal (cangkul, parang, linggis, arit, dan lainnya) dari tiap jenis tanaman.

  Untuk mendapatkan penimbang subkelompok ini adalah dengan mengalikan persentase penambahan barang modal dengan nilai produksi dari setiap jenis barang pertanian yang dihasilkan petani.

2.2.3 Klasifikasi Indeks

1) Indeks Harga Diterima (It) terdiri dari :

   a) Indeks Subsektor Tanaman Pangan

      - Indeks Kelompok Padi
      - Indeks Kelompok Palawija

b) Indeks Subsektor Tanaman Hortikultura
   - Indeks Kelompok Sayur-sayuran
   - Indeks Kelompok Buah-buahan

c) Indeks Tanaman Perkebunan Rakyat

d) Indeks Subsektor Peternakan
   - Indeks Kelompok Ternak Besar
   - Indeks Kelompok Ternak Kecil
   - Indeks Kelompok Unggas
   - Indeks Kelompok Hasil Ternak

2) Indeks Harga Dibayar (Ib) terdiri dari :

a) Indeks Konsumsi Rumah tangga (IKRT)
   - Indeks Subkelompok Makanan, Minuman dan Tembakau
   - Indeks Subkelompok Pakaian dan Alas Kaki
   - Indeks Subkelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Lainnya
   - Indeks Subkelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga
   - Indeks Subkelompok Kesehatan
   - Indeks Subkelompok Transportasi
   - Indeks Subkelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan
   - Indeks Subkelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya
   - Indeks Subkelompok Pendidikan
   - Indeks Subkelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran
   - Indeks Subkelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

b) Indeks Kelompok Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (IBPPBM), terdiri dari:
   - Indeks Subkelompok Bibit
   - Indeks Subkelompok Pupuk, Obat-obatan dan Pakan
   - Indeks Subkelompok Biaya Sewa dan Pengeluaran Lain

- Indeks Subkelompok Transportasi dan Komunikasi
- Indeks Subkelompok Penambahan Barang Modal
- Indeks Subkelompok Upah Buruh Tani.

2.3 Konsep Nilai Tukar Petani (NTP)

Konsep NTP merupakan ukuran indikator kesejahteraan petani telah dikembangkan sejak tahun 1980-an (Rachmat, 2013). Salah satu unsur kesejahteraan petani adalah kemampuan daya beli dari pendapatan petani untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran rumah tangga petani. Peningkatan kesejahteraan dapat diukur dari peningkatan daya beli pendapatan untuk memenuhi pengeluarannya tersebut. Semakin tinggi daya beli pendapatan petani terhadap kebutuhan konsumsi maka semakin tinggi nilai tukar petani dan berarti secara relatif petani lebih sejahtera. Selain sebagai indikator kesejahteraan, menurut Badan Pusat Statistik, NTP juga digunakan untuk:

1) Mengukur kemampuan tukar (*term of trade*) produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam berproduksi dan konsumsi rumah tangga.
2) Memperoleh gambaran tentang perkembangan tingkat pendapatan petani dari waktu ke waktu yang dapat dipakai sebagai dasar kebijakan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan petani.
3) Menunjukkan tingkat daya saing (*competiveness*) produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Petani yang dimaksud dalam konsep NTP oleh BPS adalah petani yang berusaha di subsektor tanaman pangan (padi dan palawija), hortikultura (sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan), tanaman perkebunan rakyat (kelapa, kopi, cengkeh, tembakau dan kapuk), peternak (ternak besar, ternak kecil, unggas) dan hasil peternakan serta subsektor perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

2.4 Pendapatan

Pendapatan yang diterima oleh masyarakat tentu berbeda antara satu dengan yang lainnya, hal ini disebabkan berbedanya jenis pekerjaan yang dilakukannya. Perbedaan pekerjaan tersebut dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan, *skill* dan pengalaman dalam bekerja. Indikator tingkat kesejahteraan dalam masyarakat dapat diukur dengan pendapatan yang diterimanya. Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat digambarkan dari kenaikan hasil *real income* perkapita, sedangkan taraf hidup tercermin dalam tingkat dan pola konsumsi yang meliputi unsur pangan, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan untuk mempertahankan derajat manusia secara wajar. Pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba (Marbun, 2003). Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu (Ridwan, 2021).

Pendapatan diartikan sebagai nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode seperti keadaan semula. Definisi tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain pendapatan merupakan jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Secara garis besar pendapatan didefinisikan sebagai jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang (Zulriski, 2008).

2.5 Harga yang Diterima Petani (HT)

Harga yang diterima petani didefinisikan sebagai harga tertimbang dari harga setiap komoditas pertanian yang diproduksi atau dijual petani. Harga komoditas pertanian merupakan harga rataan yang diterima petani atau "*Farm Gate*". Petani yang dimaksud dalam konsep NTP dari BPS adalah petani yang

berusaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternak, serta petani ikan budidaya dan nelayan. Petani subsektor tanaman pangan mencakup petani yang berusaha pada usaha tani padi dan palawija; petani subsektor hortikultura mencakup petani sayur-sayuran dan buah-buahan; petani perkebunan rakyat terdiri usaha tani komoditas perdagangan rakyat; petani peternak yang bergerak dalam usaha ternak besar, ternak kecil, unggas, dan hasil peternakan; serta petani nelayan yang mencakup petani budidaya ikan dan nelayan penangkapan. Harga yang diterima petani (HT) dirumuskan sebagaiberikut:

$$HT = \sum a_i * P_{Ti}$$

Dimana,

HT : Harga yang diterima petani

$P_{Ti:}$: Harga kelompok komoditas dalam subsektor ke i (i=tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan).

a_i : Pembobot dari masing-masing subsektor ke i.

Harga dari setiap subsektor merupakan harga tertimbang dari harga setiap komoditas penyusunnya.

2.6 Harga yang Dibayar Petani (HB)

Harga yang dibayar petani merupakan harga tertimbang dari harga/biaya konsumsi makanan, konsumsi non makanan dan biaya produksi dan penambahan barang modal dari barang yang dikonsumsi atau dibeli petani. Komoditas yang dihasilkan sendiri tidak masuk dalam perhitungan harga yang dibayar petani. Harga yang dimaksud adalah harga eceran barang dan jasa yang di pasar pedesaan. Harga yang dibayar petani (HB) dirumuskan berikut:

$$HB = \sum b * PB_i$$

Dimana,

HB : Harga yang dibayar petani

$PB_{i:}$: Harga kelompok produk ke i yang dibeli petani,

b : Pembobot dari komoditas ke i.

Konsep NTP dikembangkan BPS sebagai alat ukur untuk melihat perbandingan relatif kesejahteraan petani. Pada awal penyusunannya, cakupan petani hanya yang berusaha dalam kegiatan usaha tani tanaman bahan makanan (tanaman pangan dan hortikultura sayur-sayuran dan buah-buahan) dan perkebunan rakyat, serta hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sesuai dengan berjalannya waktu, pada tahun 2008 dilakukan penyempurnaan pengukuran NTP baik dalam cakupan petani dan cakupan wilayah. Cakupan dalam definisi "petani" diperluas mencakup petani yang berusaha pada kegiatan usahatani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan (petani ternak), dan perikanan (petani ikan dan nelayan). NTP dikembangkan dengan unit analisa nasional dan regional, sehingga diperoleh keunggulan karena merupakan indikator makro nasional dan regional dari tingkat kesejahteraan petani regional. Melalui NTP dan komponennya dapat diketahui perbandingan relatif Nilai Tukar Petani atau Nilai Tukar Komoditas Pertanian antar regional (provinsi). Secara konsepsi arah dari NTP (kesejahteraan petani) merupakan resultan dari arah setiap Nilai Tukar Komponen Pembentuknya, yaitu nilai tukar komponen penerimaan petani yang mempunyai arah positif terhadap kesejahteraan petani dan nilai tukar komponen pembayaran yang mempunyai arah negatif terhadap kesejahteraan petani. Apabila laju nilai tukar komponen penerimaan lebih tinggi dari laju nilai tukar komponen maka Nilai Tukar Petani (NTP) akan meningkat, demikian sebaliknya. Perhitungan NTP merupakan merupakan agregasi dari nilai tukar penyusunnya. NTP merupakan agregasi dari NTP subsektor (yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, dan subsektor perikanan).

2.7 Kebijakan Pembangunan dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani

Peningkatan kesejahteraan petani telah dan diyakini tetap menjadi prioritas pembangunan pertanian mendatang, sejalan dengan arahan yang tertuang dalam

rencana jangka panjang pembangunan nasional. Indikator pencapaian sasaran peningkatan kesejahteraan petani tercermin dari peningkatan pendapatan petani, penurunan tingkat pengangguran di pedesaan, dan perbaikan kualitas hidup petani. Langkah perbaikan kesejahteraan petani dituangkan dalam sejumlah kebijakan dan program bidang pertanian dan di luar sektor pertanian terkait. Kebijakan pertanian pada dasarnya adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian, yaitu memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif dan efisien serta dapat meningkatkan tingkat penghidupan/kesejahteraan petani meningkat.

Banyak faktor yang mempengaruhi pendapatan dan pola konsumsi rumah tangga petani. Dari sisi pendapatan, tingkat pendapatan petani dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: (a) pendapatan dari usaha tani (*on-farm*), (b) pendapatan dari kegiatan bidang pertanian di luar usaha tani (*off-farm*) seperti sebagai buruh tani, buruh di bidang usaha pasca panen pertanian, dan (c) pendapatan dari usaha di luar kegiatan pertanian seperti pegawai negeri, buruh *non farm*, kegiatan dagang, jasa dan lain-lain. Besarnya tingkat pendapatan dari usaha pertanian (*on-farm*) dipengaruhi oleh besarnya aset produksi pertanian (terutama pemilikan lahan usaha), jenis komoditas yang diusahakan, produktivitas, dan harga produksi. Besarnya pendapatan dari *off-farm* dipengaruhi oleh kesempatan/peluang berusaha dan tingkat upah. Tingkat pendapatan *non farm* juga dipengaruhi oleh aset dan kemampuan untuk dapat akses terhadap layanan, iklim usaha, produktivitas usaha dan harga produk yang dihasilkan.

Besarnya tingkat pendapatan ini akan mempengaruhi struktur dan pola konsumsi rumah tangga. Beberapa penelitian menunjukkan pada tingkat pendapatan yang rendah, proporsi pengeluaran untuk pemenuhan makanan relatif lebih besar dan proporsi tersebut semakin menurun dengan meningkatnya pendapatan rumah tangga. Pola konsumsi tersebut juga pada akhirnya dipengaruhi oleh harga-harga produk yang akan dibeli. Dengan demikian, banyak

kebijakan berkaitan dengan pembentukan pendapatan dan konsumsi rumah tangga, seperti kebijakan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian; sistem distribusi dan pemasaran produksi hasil pertanian, pembentukan harga produksi, kebijakan subsidi dan insentif, penyediaan infrastruktur, dan berbagai kebijakan di luar pertanian terkait dengan konsumsi rumah tangga.

BAB III
METODE PENELITIAN

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam kegiatan Penghitungan dan Analisis Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Nganjuk adalah data bulanan sejak Januari 2024 sampai dengan Desember 2024. Data dasar yang digunakan merupakan data harga komoditas dari subsektor yang tercakup dalam analisis ini.

3.2 Langkah-Langkah Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Nganjuk dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan, dan penyajian hasil survei yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan Studi Pustaka

   Pada tahap awal pelaksanaan kegiatan, dilakukan studi pustaka terkait fokus penelitian yang akan dikaji yaitu Nilai Tukar Petani. Sumber pustaka ini berasal dari jurnal, buku, dan kajian-kajian sebelumnya yang terkait dengan Nilai Tukar Petani. Tujuan dilakukannya studi pustaka adalah untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian.
2. Pembuatan Konsep Kegiatan

   Penyusunan konsep kegiatan sangat penting dilakukan agar alur pekerjaan dapat terstruktur dengan baik dan tujuan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.
3. Melaksanakan Pengumpulan Data

   Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang diperlukan untuk melakukan Penghitungan dan Analisis Nilai Tukar Petani Kabupaten Nganjuk.

4. Input Data

   Data yang telah diperoleh kemudian diinput ke dalam sistem pengolahan data untuk mengetahui hasil data yang diperoleh dan memudahkan dalam menganalisa data serta pencarian data.

5. Mengolah Hasil Survei

   Data yang telah diinput ke dalam sistem selanjutnya dilakukan analisis data yakni penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik. Adapun tahapan dalam pengolahan data antara lain, *editing*, *coding*, *tabulating*, dan grafik.

6. Menyusun Laporan Hasil Survei

   Data yang telah disajikan ke dalam bentuk grafik dan tabel kemudian disusun dalam bentuk laporan dengan interpretasi data.

BAB IV
GAMBARAN UMUM WILAYAH KAB. NGANJUK 2024

Jumlah Penduduk Kabupaten Nganjuk



1.148.611 jiwa

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Laki-laki
577.609 jiwa

Perempuan
571.002 jiwa



Sumber Data : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2025 (BPS)

BAB IV
GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN NGANJUK

4.1 Gambaran Wilayah

4.1.1 Luas dan Batas Wilayah Kabupaten Nganjuk



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Nganjuk memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro
Sebelah Timur : Kabupaten Jombang dan Kediri
Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri dan Trenggalek
Sebelah Barat : Kabupaten Ponorogo dan Madiun

Wilayah Kabupaten Nganjuk tersebar ke dalam 3 wilayah dataran yaitu 91.144,5 ha (74,44%) terletak di dataran rendah, 25.267,4 ha (20,64%) di dataran sedang dan 6.021,2 ha (4,92%) merupakan dataran tinggi. Wilayah tersebut tersebar dari selatan yaitu Gunung Wilis bagian utara hingga kaki gunung Kendeng

bagian selatan. Wilayah Kecamatan di kaki Gunung Wilis diantaranya Kecamatan Ngetos, Sawahan, Wilangan, Sebagian Kecamatan Loceret dan Pace Sedangkan di bagian utara yaitu kaki Gunung Kendeng adalah Kecamatan Ngluyu. Luas wilayah kecamatan di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 4.1 Luas Wilayah di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No.	Kecamatan	Luas Wilayah
1	Sawahan	111,45
2	Ngetos	78,45
3	Berbek	57,52
4	Loceret	68,68
5	Pace	51,07
6	Tanjunganom	75,58
7	Prambon	44,96
8	Ngronggot	52,96
9	Kertosono	24,81
10	Patianrowo	35,15
11	Baron	40,06
12	Gondang	114,24
13	Sukomoro	37,56
14	Nganjuk	23,50
15	Bagor	54,38
16	Wilangan	51,47
17	Rejoso	156,91
18	Ngluyu	72,03
19	Lengkong	89,82
20	Jatikalen	48,30
Kabupaten Nganjuk		**1.288,91**

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk (Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2025)

Adapun Kecamatan yang memiliki luas wilayah terluas adalah Kecamatan Rejoso yakni sebesar 156,91 km^2. Kecamatan Gondang memiliki luas wilayah

sebesar 114,24 km^2. Kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang memiliki luas wilayah paling sempit adalah Kecamatan Nganjuk yakni sebesar 23,50 km^2.

4.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Nganjuk berada di wilayah bukan tepi laut. Secara astronomis, Kabupaten Nganjuk terletak antara 07,20' – 07,50' Lintang Selatan dan antara 111,50' – 111,13' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Nganjuk terdiri atas 20 kecamatan dan 284 desa/kelurahan. Berikut merupakan Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Nganjuk secara rinci:

Tabel 4.2 Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No.	Kecamatan	2024
1	Sawahan	9
2	Ngetos	9
3	Berbek	19
4	Loceret	22
5	Pace	18
6	Tanjunganom	16
7	Prambon	14
8	Ngronggot	13
9	Kertosono	14
10	Patianrowo	11
11	Baron	11
12	Gondang	17
13	Sukomoro	12
14	Nganjuk	15
15	Bagor	21
16	Wilangan	6
17	Rejoso	24
18	Ngluyu	6
19	Lengkong	16

No.	Kecamatan	2024
20	Jatikalen	11
Kabupaten Nganjuk		**284**

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk (Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2025)

4.1.3 Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Nganjuk, terdiri dari berbagai struktur seperti lipatan, sesar, kekar, dan patahan. Lipatan yang ditemukan di wilayah ini meliputi sinklin dan antiklin, seperti Sinklin Ngluyu, Antiklin Ngluyu, Sinklin Bajang, dan Antiklin Ngluyu. Lipatan-lipatan ini diperkirakan terbentuk pada akhir Pliosen dengan perlapisan yang berlawanan arah serta lapisan tegak hingga mencapai kemiringan 83°.

Selain lipatan, Kabupaten Nganjuk juga memiliki struktur sesar yang terdiri dari sesar naik dan sesar turun. Selain itu, terdapat kekar yang mencakup kekar gerus dan kekar ekstensi. Patahan di wilayah ini terkonsentrasi di daerah Sawahan, yang berpotensi mempengaruhi stabilitas tanah dan struktur geologi setempat.

Struktur geologi ini berdampak pada potensi bencana di Kabupaten Nganjuk. Wilayah ini terbagi menjadi tiga zona ancaman gempa, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Bendungan Semantok, yang terletak di zona ancaman sedang, berjarak sekitar 17–20 km dari Patahan Aktif Baribis-Kendeng-Cepu. Pondasi bendungan didominasi oleh endapan pasir lepas, yang dapat mempengaruhi kestabilan infrastruktur jika terjadi aktivitas seismik.

Selain ancaman gempa, Kabupaten Nganjuk juga menghadapi potensi negatif lainnya, seperti longsor dan pembakaran hutan atau kebun. Oleh karena itu, pemantauan geologi dan mitigasi bencana menjadi aspek penting dalam pengelolaan risiko di daerah ini.

4.1.4 Topografi

Topografi (bentuk permukaan bumi) wilayah Kabupaten Nganjuk terdiri dari lembah, lereng/puncak dan dataran. Menurut topografi wilayah, ada dua kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang tidak berada di dataran yaitu Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Ngetos. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Nganjuk yaitu antara lain aluvial, regosol, andosol, latosol dan gromosol. Penyebaran tanah jenis aluvial dapat dijumpai di Kecamatan Nganjuk, Loceret, Pace, Sukomoro, Tanjunganom, Prambon, Ngronggot, Kertosono, Baron, Gondang, Patianrowo dan Jatikalen. Tanah jenis latosol sebarannya banyak dijumpai di Kecamatan Sawahan, Ngetos, Loceret, Wilangan, Rejoso, dan Ngluyu. Tanah jenis regosol dapat dapat dijumpai di Kecamatan Patianrowo, Gondang, Sukomoro, Nganjuk, Bagor, Wilangan, Rejoso, Ngluyu, Lengkong, dan Jatikalen. Tanah jenis andosol terdapat di Kecamatan Sawahan bagian selatan, Ngetos bagian selatan, dan Loceret bagian selatan. Sedangkan tanah jenis gromosol terdapat di Kecamatan Berbek, Loceret, Pace, Tanjunganom, Nganjuk, Bagor, dan Wilangan.

Sedangkan apabila ditinjau dari suhu udara, suhu udara di Kabupaten Nganjuk berkisar antara 15° C sampai dengan 31° C. Berikut merupakan data pengamatan unsur iklim per bulan di Stasiun Sawahan.

Tabel 4.3 Suhu Menurut Bulan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No.	Bulan	Suhu (°C)		
		Minimum	Rata-Rata	Maksimum
1	Januari	23,30	26,90	31,80
2	Februari	20,40	24,50	31,20
3	Maret	20,40	24,36	31,20
4	April	19,60	24,71	30,60
5	Mei	20,40	25,06	30,40
6	Juni	20,00	25,31	31,60
7	Juli	15,00	24,52	31,00
8	Agustus	16,00	23,92	30,40

No.	Bulan	Suhu (°C)		
		Minimum	Rata-Rata	Maksimum
9	September	28,40	24,68	31,60
10	Oktober	29,00	25,43	32,40
11	November	20,40	26,27	32,60
12	Desember	18,20	25,15	31,20

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk (Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2025)

4.1.5 Hidrologi

Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari air, termasuk pergerakan, distribusi, dan kualitasnya di Bumi, serta siklus air dan sumber daya air. Dalam konteks Kabupaten Nganjuk, hidrologi berperan penting dalam memahami keberadaan dan pemanfaatan sumber daya air di wilayah ini. Kabupaten Nganjuk memiliki 320 mata air yang tersebar di 11 kecamatan, terutama di lereng Gunung Wilis, dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Sawahan, Ngetos, dan Loceret. Selain itu, Sungai Semantok menjadi sumber air utama bagi Bendungan Semantok, dengan panjang sekitar 18,19 km dan daerah tangkapan air seluas 54.032 km^2. Studi hidrologi terhadap sumber air ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta memastikan ketersediaan air bagi masyarakat dan sektor pertanian di Kabupaten Nganjuk.

4.1.6 Klimatologi

Curah hujan di wilayah Kabupaten Nganjuk diamati dari masing-masing titik stasiun pengamatan yang tersebar pada semua kecamatan. Hujan terjadi hampir di sepanjang tahun 2024. Jumlah curah hujan tertinggi berada pada Bulan Desember yang mencapai 478,16 mm/tahun dengan 19 hari hujan. (BPS, Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2025, 2025).

Tabel 4.4 Curah Hujan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (Hari)
Januari	343,40	18
Februari	319,86	17
Maret	311,95	14
April	220,84	13
Mei	13,64	1
Juni	52,20	3
Juli	10,50	1
Agustus	4,60	1
September	33,73	3
Oktober	9,91	2
November	216,41	12
Desember	478,16	19

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk (Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2025)

Curah hujan dan jumlah hari hujan relatif tinggi selama bulan Januari hingga April, dan November hingga Desember, tercatat sebanyak 104 hari hujan dengan curah hujan tertinggi sebesar 478,16 mm di bulan Desember. Curah hujan turun secara signifikan mulai bulan Mei sampai dengan Oktober, tercatat hanya 11 hari hujan dalam enam bulan.

4.1.7 Aspek Demografi

Aspek kependudukan adalah aspek penting dalam melaksanakan pembangunan, artinya penduduk merupakan faktor utama yang dapat bertindak sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan dan pencapaian sumber daya manusia. Berikut adalah sebaran penduduk di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin.

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Nganjuk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

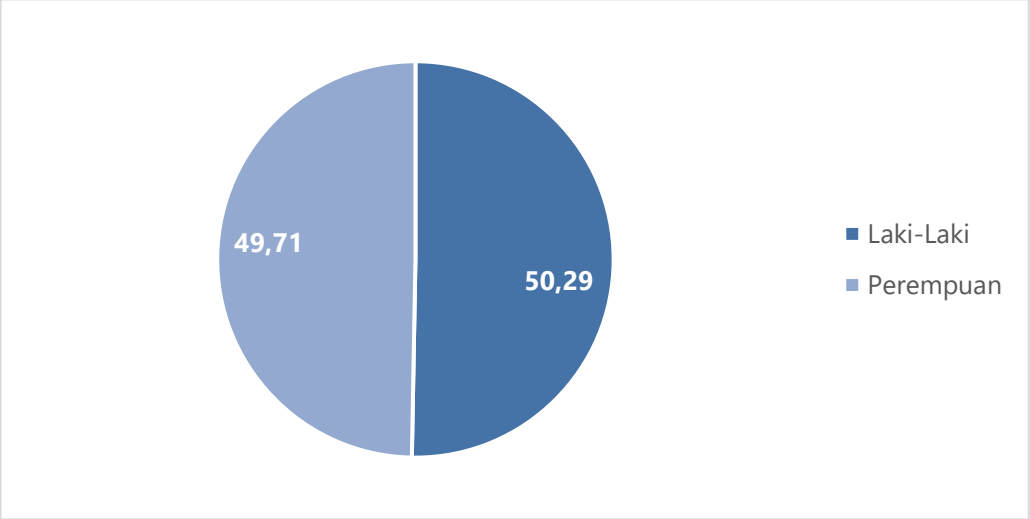
No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Sawahan	40.072

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk
2	Ngetos	39.665
3	Berbek	60.668
4	Loceret	78.396
5	Pace	68.896
6	Tanjunganom	121.513
7	Prambon	75.461
8	Ngronggot	86.810
9	Kertosono	57.176
10	Patianrowo	46.204
11	Baron	56.460
12	Gondang	57.651
13	Sukomoro	48.580
14	Nganjuk	71.067
15	Bagor	63.867
16	Wilangan	31.592
17	Rejoso	74.266
18	Ngluyu	14.518
19	Lengkong	34.507
20	Jatikalen	21.242
Kabupaten Nganjuk		**1.148.611**

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk (Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2025)

Penduduk di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 sebanyak 1.148.611 jiwa. Adapun Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak berada di Kecamatan Tanjunganom yakni sebanyak 121.513 jiwa dan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ngluyu yakni sebanyak 14.518 jiwa.

Apabila ditinjau dari jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Nganjuk sebanyak 577.609 jiwa lebih banyak 6.607 jiwa daripada jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Nganjuk tahun 2024. Berikut proporsi penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Nganjuk.



Gambar 4.2 Proporsi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (%)

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk (Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2025)

4.2 Gambaran Rumah Tangga Pertanian di Kabupaten Nganjuk

Sektor pertanian merupakan sektor utama yang berperan penting pada perekonomian nasional dalam menyerap tenaga kerja, sumber pertumbuhan ekonomi, dan penyumbang devisa. Di samping itu, sektor pertanian juga menggerakkan sektor lain dalam perekonomian nasional. Salah satu penunjang sektor pertanian di suatu wilayah adalah kualitas dan kuantitas rumah tangga usaha pertanian. Rumah tangga usaha pertanian adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar, baik usaha pertanian milik sendiri, secara bagi hasil, atau milik orang lain dengan menerima upah (kuasa usaha), dalam hal ini termasuk usaha jasa penunjang pertanian.

Berikut merupakan jumlah usaha pertanian perorangan, perusahaan pertanian berbadan hukum, dan usaha pertanian lainnya bila ditinjau menurut kecamatan di Kabupaten Nganjuk:

Tabel 4.6 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan, Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum, dan Usaha Pertanian Lainnya Menurut Kecamatan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

Kecamatan	Usaha Pertanian Perorangan	Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum	Usaha Pertanian Lainnya
Sawahan	10.943	1	-
Ngetos	9.402	-	1
Berbek	8.483	-	-
Loceret	9.718	-	-
Pace	10.355	-	-
Tanjunganom	18.445	-	4
Prambon	9.819	-	1
Ngronggot	14.035	-	-
Kertosono	3.796	-	-
Patianrowo	6.573	1	-
Baron	8.052	-	1
Gondang	12.824	1	1
Sukomoro	7.623		-
Nganjuk	3.894	2	-
Bagor	9.875	-	-
Wilangan	7.132	-	-
Rejoso	14.804	-	-
Ngluyu	3.946	-	-
Lengkong	6.307	-	-
Jatikalen	4.259	-	-
TOTAL	**180.285**	**5**	**8**

Sumber : Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Kabupaten Nganjuk

Karakteristik rumah tangga pertanian di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2023 menurut sumber penghasilan utama adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Karakteristik Rumah Tangga Pertanian Menurut Subsektor dan Jenis Usaha di Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2023

Subsektor	Rumah Tangga Usaha Pertanian	Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum	Usaha Pertanian Lainnya
Tanaman Pangan	114.334	-	4
- Padi	99.189	-	4
- Palawija	71.001	-	2
Hortikultura	57.755	2	4
Perkebunan	18.216	2	-
Peternakan	101.238	-	3
Perikanan	1.329	-	2
- Budidaya ikan	1.244	-	2
- Penangkapan ikan	85	-	-
Kehutanan	5.795	-	-
Jasa pertanian	3.630	1	-

Sumber : Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas karakteristik rumah tangga pertanian di kabupaten Nganjuk bergerak di sektor tanaman pangan dan peternakan.

4.3 Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Produksi pertanian adalah suatu kegiatan manusia dalam menghasilkan berbagai produk yang berasal dari sektor pertanian. Produksi pertanian di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.8 Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dan 2024

Komoditas	Produksi (Ton)	
	2023	2024
Padi	418.096,00	405.079,00

Komoditas	Produksi (Ton)	
	2023	2024
Jagung	199.812,53	236.791,11
Kedelai	8.648,11	7.628,68
Ketela Pohon	42.240,23	32.466,52
Ketela Rambat	637,72	440,05
Kacang Tanah	1.767,30	1.861,10
Kacang Hijau	814,66	911,41

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk (Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2024 dan 2025)

Kenaikan terbesar terjadi pada jagung, yang meningkat signifikan dari 199.812,53 ton menjadi 236.791,11 ton. Kacang hijau dan kacang tanah juga mengalami kenaikan jumlah produksi, masing-masing naik dari 814,66 ton menjadi 911,41 ton dan dari 1.767,30 ton menjadi 1.861,10 ton.

Sebaliknya, produksi padi mengalami penurunan dari 418.096 ton menjadi 405.079 ton, sementara ketela pohon dan ketela rambat turun cukup drastis, masing-masing dari 42.240,23 ton menjadi 32.466,52 ton dan dari 637,72 ton menjadi 440,05 ton. Penurunan juga terjadi pada kedelai, yang berkurang dari 8.648,11 ton menjadi 7.628,68 ton.

Tabel 4.9 Produksi Hortikultura Kabupaten Nganjuk (kuintal) Tahun 2023 dan 2024

Komoditas	Produksi (Kuintal)	
	2023	2024
Bawang Daun	3.705	3.928
Bawang Merah	1.837.579	2.055.912
Bawang Putih	-	-
Bayam	1.920	1.790
Buncis	3.461	2.491
Cabai Besar	1.583	2.254
Cabai Keriting	3.333	3.514
Cabai Rawit	43.471	66.008

Komoditas	Produksi (Kuintal)	
	2023	2024
Jamur Tiram	778	6.396
Jamur Merang	-	-
Jamur Lainnya	-	-
Kacang Panjang	2.848	2.718
Kangkung	282	525
Kembang Kol	-	-
Kentang	266	700
Ketimun	-	625
Kubis	-	-
Labu Siam	6.205	5.985
Petsai/Sawi	3.511	5.675
Terung	-	500
Tomat	-	680
Wortel	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk (Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2025)

Pada subsektor hortikultura, produksi terbesar ada pada bawang merah sebesar 2.055.912 kuintal, diikuti oleh cabai rawit dan jamur tiram masing-masing memiliki angka produksi sebesar 66.008 kuintal menjadi 6.396 kuintal. Sebaliknya, produksi terendah ada pada terung dengan angka produksi sebesar 500 kuintal.

Tabel 4.10 Produksi Perkebunan Kabupaten Nganjuk (Ton) Tahun 2023 dan 2024

Komoditas	Produksi (Ton)	
	2023	2024
Karet	-	-
Kelapa	203,89	196,65
Kelapa Sawit	-	-
Kopi	104,14	104,78
Kakao	352,46	334,92
Wijen	310,02	130,14

Komoditas	Produksi (Ton)	
	2023	2024
Teh	-	-
Jambu Mete	64,87	62,13
Cengkeh	567,73	585,73
Tebu	218.568,30	217.158,30
Tembakau	1.332,65	2.170,79
Nilam	140,00	140,00

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk (Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2025)

Pada subsektor perkebunan, produksi terbesar ada pada tebu sebesar 217.158,30 ton, diikuti oleh tembakau sebesar 2.170,79 ton. Sebaliknya, produksi terendah ada pada jambu mete dengan angka produksi sebesar 62,13 ton.

Tabel 4.11 Produksi Peternakan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dan 2024

Komoditas	Produksi (Kg)	
	2023	2024
Daging Sapi (Karkas)	486.542,32	508.798,58
Daging Sapi (Meatyield)	391.214,20	402.809,09
Daging Kerbau (Karkas)	2.305,44	3.022,27
Daging Kerbau (Meatyield)	1.836,93	2.400,54
Daging Kambing (Karkas)	599.626,03	609.797,26
Daging Kambing (Meatyield)	490.886,88	492.420,42
Daging Domba (Karkas)	77.969,52	80.904,55
Daging Domba (Meatyield)	59.751,75	63.981,19
Daging Ayam Petelur	25.644,00	28.108,58
Daging Itik dan Itik Manila	80.926,00	82.544,52
Daging Ayam Buras	589.691,00	601.485,00
Telur Ayam Buras	753.486,00	768.555,72
Telur Itik dan Itik Manila	2.390.958,00	2.438.777,16
Susu Sapi Perah	22.456,00	75.852,30

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2025)

Kenaikan paling signifikan terjadi pada produksi susu sapi perah, yang melonjak dari 22.456,00 kg menjadi 75.852,30 kg. Selain itu, produksi daging kerbau juga mengalami peningkatan yang cukup besar, dengan karkas naik dari 2.305,44 kg menjadi 3.022,27 kg dan meatyield dari 1.836,93 kg menjadi 2.400,54 kg.

Sebagian besar komoditas mengalami kenaikan, termasuk daging sapi, kambing, domba, ayam, serta telur ayam dan itik. Namun, produksi daging kambing meatyield hanya naik tipis dari 490.886,88 kg menjadi 492.420,42 kg, menunjukkan pertumbuhan paling kecil dibandingkan komoditas lain.

BAB V
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

NTP Kabupaten Nganjuk 2024

111,51

Indeks Harga yang Diterima

135,45

Indeks Harga yang Dibayar

121,48

NTP Menurut Subsektor









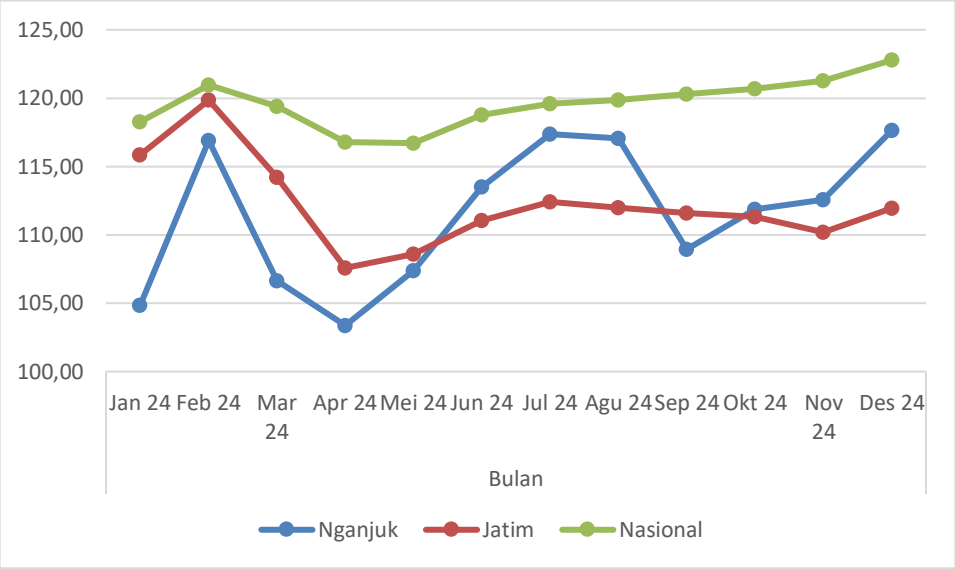
BAB V
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Nilai Tukar Petani Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 (2018=100)

Sektor pertanian memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi di suatu daerah. Sektor ini dapat menyediakan lapangan kerja serta menjadi sumber pendapatan bagi petani khususnya di wilayah pedesaan. Untuk melihat keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan, selain data tentang pertumbuhan ekonomi diperlukan pula data pendukung di sektor pertanian. Dengan tersedianya data yang lengkap dan aktual di sektor pertanian, akan lebih memudahkan pemerintah dalam melaksanakan evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan dan perencanaan pembangunan berikutnya. Salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja agenda pembangunan adalah Nilai Tukar Petani (NTP).

NTP Kabupaten Nganjuk merupakan indikator pendekatan (*proxy indicator*) untuk mengukur tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. Oleh karena itu NTP Kabupaten Nganjuk juga dapat digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan petani di Kabupaten Nganjuk. Semakin tinggi NTP maka semakin tinggi pula kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. Pada dasarnya secara konsepsional NTP diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima (It) petani terhadap indeks harga yang dibayar (Ib) petani. It dan Ib merupakan indeks harga tertimbang yang terdiri atas harga-harga komoditi pembentuknya dengan pembobot besarnya nilai produksi yang dijual atau dibeli. Pada penelitian ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2018 yang berarti NTP pada tahun 2018 sama dengan 100 (2018 = 100). Adanya keragaman di setiap daerah dalam hal sumber daya dan produksi pertanian, komoditas yang dihasilkan dan teknologi, serta keragaman dalam pola konsumsi akan menyebabkan keragaman pembentukan harga-harga dan keragaman NTP.

Berikut merupakan perkembangan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Nganjuk selama tahun 2024:

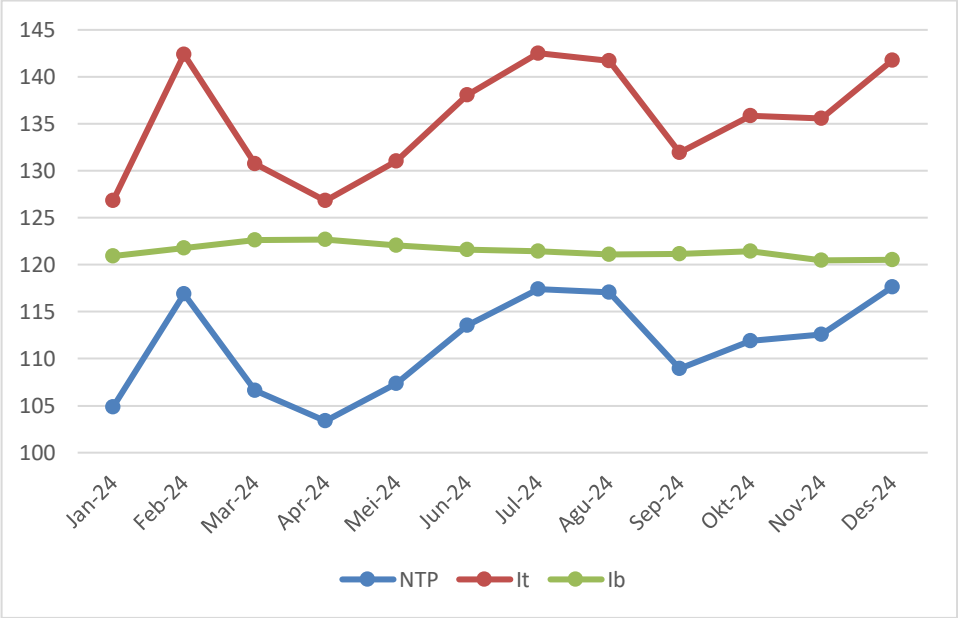


Gambar 5.1 Perkembangan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Nganjuk Selama Tahun 2024
Sumber : 1) Data diolah, 2024; 2) BPS Jatim, 2024; 3) BPS Indonesia, 2024

Grafik di atas, menunjukkan perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Nganjuk sepanjang tahun 2024 dibandingkan dengan rata-rata NTP di tingkat provinsi (Jawa Timur) dan nasional. NTP di Kabupaten Nganjuk mengalami fluktuasi selama tahun 2024. Pada bulan Februari terjadi peningkatan nilai sebelum mengalami penurunan hingga titik terendah pada bulan April. Setelah itu, NTP kembali meningkat dan mencapai puncaknya pada Juli, kemudian mengalami fluktuasi sebelum kembali menunjukkan tren kenaikan pada November dan Desember.

Serupa dengan NTP Nganjuk, NTP di tingkat provinsi (Jawa Timur) juga bersifat fluktuatif, mengalami sedikit penurunan pada Maret dan April, lalu kembali meningkat secara bertahap hingga akhir tahun. Di tingkat nasional, NTP menunjukkan tren yang lebih stabil dengan kenaikan bertahap mulai bulan Mei dan tetap berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Nganjuk dan Jawa Timur.

Dalam pengukuran Nilai Tukar Petani terdapat komponen Indeks Harga yang Diterima (It) dan Indeks Harga yang Dibayarkan (Ib) petani yang digunakan dalam formula perhitungan. Tren NTP, It dan Ib Kabupaten Nganjuk tahun 2024 disajikan pada grafik berikut:



Gambar 5.2 Perkembangan NTP, It, dan Ib di Kabupaten Nganjuk Selama Tahun 2024

Sumber : Data diolah, 2024

Dari grafik di atas terlihat untuk pola NTP sejalan dengan It yang mengindikasikan bahwa perubahan NTP erat kaitannya dengan perubahan It, sedangkan Ib lebih cenderung stabil. Secara umum indeks harga yang diterima petani semua subsektor mempunyai nilai di atas 100. Hal ini merupakan indikasi terjadinya peningkatan harga produk-produk pertanian yang dihasilkan petani pada semua subsektor pertanian dibandingkan tahun dasar yakni tahun 2018. Nilai rata-rata Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayarkan Petani (Ib) Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 berturut-turut sebesar 135,45 dan 121,48. Rincian nilai rata-rata NTP, It dan Ib Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Rata-Rata Tahunan NTP, Indeks Harga yang Diterima (It) dan Indeks Harga yang Dibayar (Ib) Petani Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Keterangan	Nilai
Nilai Tukar Petani	**111,51**
Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	**135,45**
Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	**121,48**
1. Indeks Konsumsi Rumah Tangga:	124,41
a. Makanan, Minuman dan Tembakau	127,42
b. Pakaian dan Alas Kaki	119,81
c. Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah	118,15
d. Perlengkapan Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	119,64
e. Kesehatan	120,07
f. Transportasi	124,30
g. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	115,38
h. Rekreasi, Olahraga dan Budaya	109,62
i. Pendidikan	118,03
j. Penyediaan Makanan dan Minuman Restoran	122,71
k. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	122,70
2. Indeks BPPBM:	118,71
a. Benih/Bibit	109,59
b. Pupuk dan Pestisida	122,44
c. Sewa, Pajak dan Pengeluaran Lainnya	110,38
d. Transportasi dan Komunikasi	118,93
e. Barang Modal	107,84
f. Upah Buruh	123,15

Sumber : Data diolah, 2024

Terdapat empat subsektor pertanian yang tercakup di dalam penghitungan Nilai Tukar Petani yaitu Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, dan Peternakan. Berikut merupakan perbandingan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tahun 2024.

Tabel 5.2 Nilai Tukar Petani Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 (2018=100)

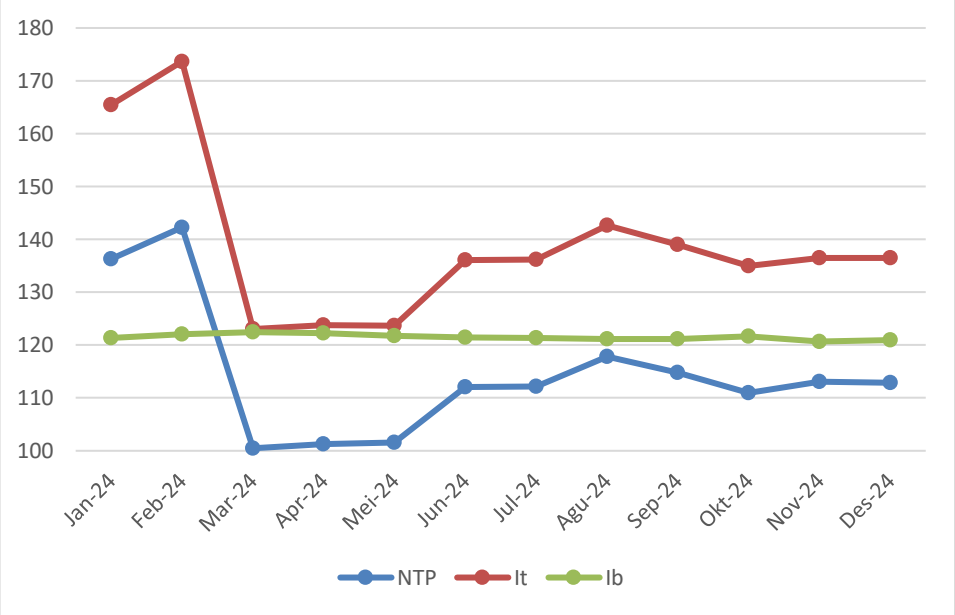
No	Uraian	Nilai
1	NTP Kabupaten Nganjuk	111,51
2	NTP Jawa Timur	112,22
3	NTP Nasional	119,62
NTP Kabupaten Nganjuk berdasarkan Subsektor Pertanian		
1	NTP Tanaman Pangan	114,63
2	NTP Hortikultura	114,57
3	NTP Tanaman Perkebunan Rakyat	111,19
4	NTP Peternakan	108,41

Sumber : 1) Data diolah, 2024; 2) BPS Jatim, 2024; 3) BPS Indonesia, 2024

Pada tahun 2024, Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Nganjuk tercatat sebesar 111,51, dimana nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan NTP di tingkat Provinsi Jawa Timur yang mencapai 112,22. Sementara itu, NTP nasional memiliki nilai yang lebih tinggi, yaitu 119,62. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perkembangan kesejahteraan petani dari tahun dasar (2018) di Kabupaten Nganjuk lebih rendah daripada Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Tentunya arti tersebut dapat berlaku hanya jika membahas kesejahteraan petani khusus dari lingkup NTP. Dimana NTP yang didasarkan kepada indeks *Laspeyres*, perkembangan nilainya hanya bertumpu pada perubahan harga-harga komoditas, tidak mempertimbangkan perubahan kuantitas dalam periode pengukuran sehingga hasil perhitungan NTP tidak mengakomodasikan perkembangan produktivitas sebagai dampak dari kemajuan teknologi dan kegiatan pembangunan. Meskipun demikian, dengan NTP Nganjuk yang berada di atas 100, hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga barang produksi relatif lebih tinggi dari harga barang konsumsi dan biaya produksi pada tahun dasar (2018=100) sehingga petani di Kabupaten Nganjuk mengalami surplus.

5.2 Nilai Tukar Petani Kabupaten Nganjuk Subsektor Tanaman Pangan Tahun 2024 (2018=100)

Pada tahun 2024, Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor tanaman pangan di Kabupaten Nganjuk mencapai 114,63. Angka ini menunjukkan bahwa kenaikan harga barang produksi relatif lebih tinggi dari harga barang konsumsi dan biaya produksi sehingga petani subsektor tanaman pangan di Kabupaten Nganjuk mengalami surplus. Tren NTP, It dan Ib subsektor tanaman pangan Kabupaten Nganjuk tahun 2024 disajikan pada grafik berikut:



Gambar 5.3 Perkembangan NTP, It, dan Ib Subsektor Tanaman Pangan di Kabupaten Nganjuk Selama Tahun 2024

Sumber : Data diolah, 2024

Dari grafik di atas terlihat untuk pola NTP subsektor tanaman pangan sejalan dengan It yang mengindikasikan bahwa perubahan NTP erat kaitannya dengan perubahan It, sedangkan Ib lebih cenderung stabil. Dinamika NTP subsektor tanaman pangan dipengaruhi secara langsung oleh periode panen padi yang penurunan puncaknya terjadi pada panen raya, dimana harga mengalami penurunan karena produksi meningkat. Terlihat bahwa pola perubahan NTP subsektor tanaman pangan Kabupaten Nganjuk pada Maret mengalami

penurunan yang cukup drastis yang disebabkan oleh menurunnya harga gabah karena terjadinya panen raya. Selain gabah, harga jagung juga mengalami penurunan pada bulan Maret. Pada faktanya, penurunan ini adalah kembalinya harga jagung ke kondisi normal setelah di bulan Januari-Februari harga jagung cukup tinggi. Tingginya harga jagung pada Januari-Februari 2024 mencerminkan rendahnya luas panen jagung akibat tertundanya penanaman jagung karena dampak dari El Nino pada akhir tahun 2023. Hal ini mengakibatkan produksi jagung lebih rendah pada periode Januari-Februari dibandingkan tiga tahun terakhir.

NTP subsektor tanaman pangan mengalami peningkatan kembali pada Juni dan Agustus. Peningkatan NTP di bulan Juni disebabkan oleh naiknya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang didasari oleh Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perbadan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Kebijakan ini ditetapkan untuk melindungi kepentingan petani di hulu, sehingga harga gabah tidak jatuh di tingkat produsen pada masa panen dan dapat menjadi dasar bagi Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen. Sementara itu, peningkatan di bulan Agustus disebabkan kenaikan harga jagung yang didasari oleh kebijakan Badan Pangan Nasional untuk menaikkan Harga Acuan Pemerintah (HAP) melalui Peraturan Bapanas Nomor 6 tahun 2024. Kebijakan ini diambil untuk mendorong semangat produksi jagung setelah adanya penurunan harga pada panen raya kuartal kedua. Sedangkan bulan-bulan berikutnya mulai September-Desember, nilai NTP cenderung stabil.

Jika dilihat pola grafiknya, kenaikan NTP tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar 10,46 persen, karena indeks harga yang diterima petani pada bulan tersebut mengalami kenaikan sebesar 12,44 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani mengalami penurunan sebesar 0,26 persen. Penurunan NTP terbesar terjadi pada bulan Maret sebesar 41,80 persen, karena indeks harga yang diterima petani mengalami penurunan sebesar 50,53 persen, sedangkan indeks

harga yang dibayar petani naik sebesar 0,39 persen. Rincian nilai NTP, It dan Ib subsektor tanaman pangan setiap bulan dapat dilihat pada Lampiran.

Nilai rata-rata Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayarkan Petani (Ib) subsektor tanaman pangan Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 berturut-turut sebesar 139,29 dan 121,53. Berikut nilai rata-rata NTP, It, dan Ib subsektor tanaman pangan Kabupaten Nganjuk tahun 2024:

Tabel 5.3 Rata-Rata Tahunan NTP, Indeks Harga yang Diterima (It) dan Indeks Harga yang Dibayar (Ib) Subsektor Tanaman Pangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Keterangan	Nilai
Nilai Tukar Petani	**114,63**
Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	**139,29**
1. Padi	142,96
2. Palawija	130,90
Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	**121,53**
2. Indeks Konsumsi Rumah Tangga:	121,89
l. Makanan, Minuman dan Tembakau	123,81
m. Pakaian dan Alas Kaki	121,20
n. Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah	113,84
o. Perlengkapan Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	120,48
p. Kesehatan	109,95
q. Transportasi	123,95
r. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	116,30
s. Rekreasi, Olahraga dan Budaya	110,02
t. Pendidikan	118,95
u. Penyediaan Makanan dan Minuman Restoran	123,23
v. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	122,58
3. Indeks BPPBM:	120,67
g. Benih/Bibit	116,51
h. Pupuk dan Pestisida	122,54
i. Sewa, Pajak dan Pengeluaran Lainnya	113,24
j. Transportasi dan Komunikasi	118,08
k. Barang Modal	116,53
l. Upah Buruh	123,79

Sumber : Data diolah, 2024

Indeks Harga yang Diterima Petani (It) tercatat sebesar 139,29, dengan rincian harga padi mencapai 142,96 dan palawija sebesar 130,90. Sementara itu,

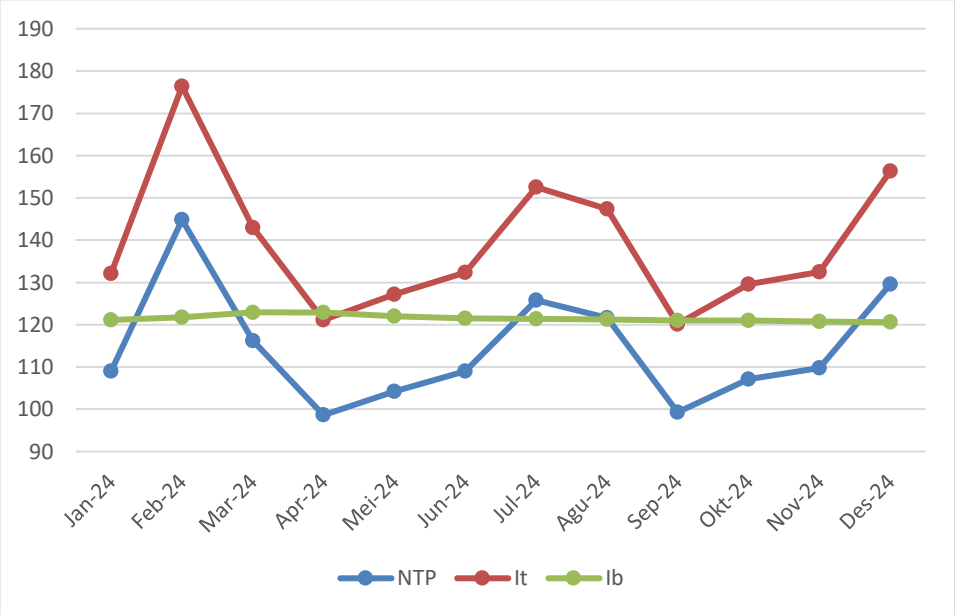
Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) berada pada angka 121,53, yang mencakup pengeluaran konsumsi rumah tangga dan biaya produksi dan penambahan barang modal.

Indeks konsumsi rumah tangga adalah sebesar 121,89, dengan komponen utama seperti transportasi mencapai 123,95, makanan, minuman, dan tembakau mencapai 123,81, serta penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 123,23. Beberapa sektor lain, seperti kesehatan yang mencapai 109,95 dan rekreasi, olahraga, serta budaya sebesar 110,02, menunjukkan angka yang relatif lebih rendah dibanding sektor lainnya.

Di sisi lain, Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) tercatat sebesar 120,67. Komponen biaya produksi utama meliputi upah buruh sebesar 123,79, pupuk dan pestisida sebesar 122,54, serta transportasi dan komunikasi sebesar 118,08. Dengan NTP di atas 100, kondisi ini mengindikasikan bahwa secara umum petani tanaman pangan di Kabupaten Nganjuk mengalami surplus pendapatan dibandingkan dengan biaya yang mereka keluarkan, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka.

5.3 Nilai Tukar Petani Kabupaten Nganjuk Subsektor Hortikultura Tahun 2024 (2018=100)

Pada tahun 2024, Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor hortikultura di Kabupaten Nganjuk tercatat sebesar 114,63. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga barang produksi relatif lebih tinggi dari harga barang konsumsi dan biaya produksi sehingga petani subsektor hortikultura di Kabupaten Nganjuk mengalami surplus. Tren NTP, It dan Ib subsektor hortikultura Kabupaten Nganjuk tahun 2024 disajikan pada grafik berikut:



Gambar 5.4 Perkembangan NTP, It, dan Ib Subsektor Hortikultura di Kabupaten Nganjuk Selama Tahun 2024

Sumber : Data diolah, 2024

Jika dilihat dari pergerakan Indeksnya maka subsektor hortikultura merupakan subsektor yang paling fluktuatif dibandingkan dengan subsektor lainnya. Fluktuasi harga komoditas pada dasarnya terjadi akibat ketidakseimbangan antara kuantitas pasokan dan kuantitas permintaan yang dibutuhkan konsumen. Jika terjadi kelebihan pasokan maka harga komoditas akan turun, sebaliknya jika terjadi kekurangan pasokan maka harga komoditas akan naik. Terlihat bahwa pola perubahan NTP subsektor hortikultura Kabupaten Nganjuk pada Februari mengalami peningkatan cukup drastis yang disebabkan oleh peningkatan harga sayur-sayuran terutama bawang merah, cabai merah dan cabai rawit. Tingginya harga cabai dan bawang merah disebabkan oleh produktivitas cabai dan bawang merah yang menurun karena tingginya curah hujan yang mengakibatkan rontok bunga pada tanaman cabai. Selain cuaca, faktor penyebab naiknya harga cabai, bawang merah dan beberapa komoditas sayur lainnya adalah periode memasuki bulan puasa sehingga permintaan pasar meningkat.

NTP subsektor hortikultura mengalami penurunan di bulan Maret-April. Penyebab turunnya nilai NTP adalah adanya penurunan harga cabai di pasar. Menurunnya harga cabai disebabkan karena ketersediaan barang di pasar semakin banyak. Sampai dengan akhir tahun 2024, tren NTP subsektor hortikultura terus berfluktuasi yang dipengaruhi oleh naik turunnya harga komoditas sayur terutama cabai rawit, cabai merah dan bawang merah yang disebabkan oleh ketersediaan stok di pasar.

Jika dilihat pola grafiknya, kenaikan NTP tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 35,77 persen, karena indeks harga yang diterima petani pada bulan tersebut mengalami kenaikan sebesar 44,28 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani hanya mengalami peningkatan sebesar 0,65 persen. Penurunan NTP terbesar terjadi pada bulan Maret sebesar 28,57 persen, karena indeks harga yang diterima petani mengalami penurunan sebesar 33,50 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani naik sebesar 1,12 persen. Rincian nilai NTP, It dan Ib subsektor hortikultura setiap bulan dapat dilihat pada Lampiran.

Nilai rata-rata Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayarkan Petani (Ib) subsektor hortikultura Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 berturut-turut sebesar 139,22 dan 121,51. Berikut nilai rata-rata NTP, It, dan Ib subsektor hortikultura Kabupaten Nganjuk tahun 2024:

Tabel 5.4 Rata-Rata Tahunan NTP, Indeks Harga yang Diterima (It) dan Indeks Harga yang Dibayar (Ib) Subsektor Hortikultura Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Keterangan	Nilai
Nilai Tukar Petani	**114,57**
Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	**139,22**
1. Sayur-Sayuran	145,82
2. Buah-Buahan	107,13
Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	**121,51**
1. Indeks Konsumsi Rumah Tangga:	124,10
a. Makanan, Minuman dan Tembakau	126,13
b. Pakaian dan Alas Kaki	118,83
c. Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah	126,14
d. Perlengkapan Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	119,28
e. Kesehatan	109,01
f. Transportasi	125,19
g. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	114,98
h. Rekreasi, Olahraga dan Budaya	108,72
i. Pendidikan	119,56
j. Penyediaan Makanan dan Minuman Restoran	122,67
k. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	121,85
2. Indeks BPPBM:	117,77
a. Benih/Bibit	104,12
b. Pupuk dan Pestisida	119,68
c. Sewa, Pajak dan Pengeluaran Lainnya	113,67
d. Transportasi dan Komunikasi	114,17
e. Barang Modal	116,65
f. Upah Buruh	127,36

Indeks Harga yang Diterima Petani (It) berada pada angka 139,22, dengan rincian harga sayur-sayuran mencapai 145,82, buah-buahan sebesar 107,13, dan tanaman obat-obatan sebesar 98,57. Sementara itu, Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) tercatat sebesar 121,51 yang mencakup pengeluaran konsumsi rumah tangga dan biaya produksi dan penambahan barang modal.

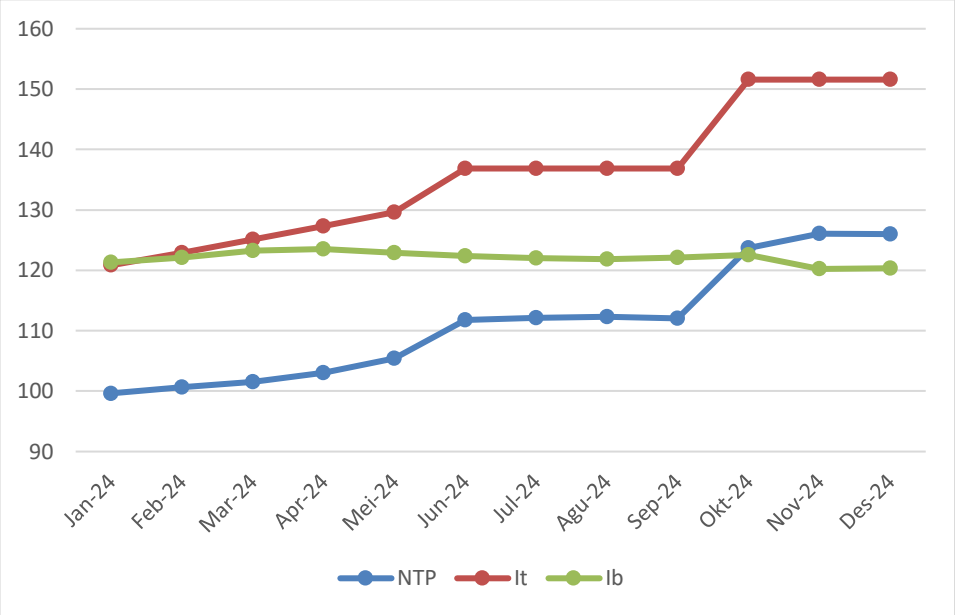
Dalam aspek konsumsi rumah tangga, indeks konsumsi rumah tangga tercatat sebesar 124,10, dengan pengeluaran perumahan (air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya) serta komoditas makanan, minuman, dan tembakau merupakan

komponen utama yang memiliki nilai tertinggi yakni sebesar 126,14 dan 126,13. Di sisi lain, sektor komoditas kesehatan (109,01) serta rekreasi, olahraga, dan budaya (108,72) memiliki indeks yang relatif lebih rendah.

Sementara itu, Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) berada pada angka 117,77. Biaya produksi utama terdiri dari upah buruh yang mencapai 127,36, pupuk dan pestisida sebesar 119,68, serta barang modal dengan indeks 116,65. Dengan NTP yang tetap berada di atas angka 100, kondisi ini mengindikasikan bahwa petani hortikultura masih mendapatkan keuntungan, meskipun terdapat perbedaan tingkat kenaikan harga pada beberapa komponen produksi dan konsumsi.

5.4 Nilai Tukar Petani Kabupaten Nganjuk Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2024 (2018=100)

Pada tahun 2024, Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor perkebunan rakyat di Kabupaten Nganjuk tercatat sebesar 111,19. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga barang produksi relatif lebih tinggi dari harga barang konsumsi dan biaya produksi sehingga petani subsektor tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Nganjuk mengalami surplus. Tren NTP, It dan Ib subsektor tanaman perkebunan rakyat Kabupaten Nganjuk tahun 2024 disajikan pada grafik berikut:



Gambar 5.5 Perkembangan NTP, It, dan Ib Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat di Kabupaten Nganjuk Selama Tahun 2024

Sumber : Data diolah, 2024

Dari grafik di atas terlihat untuk pola NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat sejalan dengan It yang mengindikasikan bahwa perubahan NTP erat kaitannya dengan perubahan It, sedangkan Ib lebih cenderung stabil. Dinamika NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat dipengaruhi secara langsung oleh periode panen tanaman perkebunan rakyat semusim yang mengalami kenaikan signifikan pada bulan Juni dan Oktober. Hal ini disebabkan oleh Surat Edaran (SE) No. B-406/KB 110/E/05/2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan terkait harga tebu petani memperhatikan Biaya Pokok Produksi (BPP) tebu di masing-masing daerah terutama di wilayah Jawa, salah satunya Kabupaten Nganjuk. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tersebut juga memperhatikan rendemen tebu. Apabila rendemen tebu lebih tinggi atau lebih rendah dari 7%, maka harga pembelian tebu juga harus disesuaikan secara proporsional.

Meningkatnya rendemen tebu yang naik signifikan atau lebih tinggi dari 7% pada bulan Juni membuat nilai NTP meningkat secara signifikan, begitu pula pada

bulan Oktober. Hal ini dikarenakan pada bulan Oktober juga masuk dalam varietas masa akhir. Selain karena tingkat rendemen tebu yang tinggi juga karena faktor musim, *Agro Climate* dan situasi harga yang mendukung sehingga pendapatan petani tebu meningkat. Selain itu, kenaikan rendemen tebu pada bulan Juni dan Oktober juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti penggunaan varietas tebu yang unggul, penggunaan teknologi pertanian yang maju, dan pengelolaan tanah yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa petani tebu telah meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam mengelola tanah dan menanam tebu, sehingga dapat meningkatkan produksi dan kualitas tebu.

Jika dilihat pola grafiknya, kenaikan NTP tertinggi terjadi pada bulan Juni dan Oktober dengan nilai masing-masing sebesar 6,35 dan 11,63 persen, karena indeks harga yang diterima petani pada bulan Juni mengalami kenaikan sebesar 6,55 persen dan 14,72 persen pada bulan Oktober, sedangkan indeks harga yang dibayar petani mengalami penurunan pada bulan Juni sebesar 0,15 persen dan naik sebesar 0,17 persen pada bulan Oktober. Rincian nilai NTP, It dan Ib subsektor tanaman perkebunan rakyat setiap bulan dapat dilihat pada Lampiran.

Nilai rata-rata Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayarkan Petani (Ib) subsektor tanaman perkebunan rakyat Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 berturut-turut sebesar 135,67 dan 122,06. Berikut nilai rata-rata NTP, It, dan Ib subsektor tanaman perkebunan rakyat Kabupaten Nganjuk tahun 2024:

Tabel 5.5 Rata-Rata Tahunan NTP, Indeks Harga yang Diterima (It) dan Indeks Harga yang Dibayar (Ib) Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Keterangan	Nilai
Nilai Tukar Petani	**111,19**
Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	**135,67**
Tanaman Perkebunan Rakyat	135,67
Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	**122,06**
1. Indeks Konsumsi Rumah Tangga:	125,86
a. Makanan, Minuman dan Tembakau	130,10
b. Pakaian dan Alas Kaki	119,01

Keterangan	Nilai
c. Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah	113,08
d. Perlengkapan Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	119,04
e. Kesehatan	156,50
f. Transportasi	123,61
g. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	114,31
h. Rekreasi, Olahraga dan Budaya	107,81
i. Pendidikan	115,33
j. Penyediaan Makanan dan Minuman Restoran	122,23
k. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	122,55
2. Indeks BPPBM:	117,41
a. Benih/Bibit	102,72
b. Pupuk dan Pestisida	122,01
c. Sewa, Pajak dan Pengeluaran Lainnya	107,42
d. Transportasi dan Komunikasi	119,67
e. Barang Modal	117,24
f. Upah Buruh	119,07

Sumber : Data diolah, 2024

Indeks Harga yang Diterima Petani (It) berada pada angka 135,67, dengan rincian tanaman perkebunan rakyat semusim mencapai 141,86, sedangkan tanaman perkebunan rakyat tahunan berada di angka 115,74. Sementara itu, Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) tercatat sebesar 122,06, yang mencakup pengeluaran konsumsi rumah tangga serta biaya produksi dan penambahan barang modal.

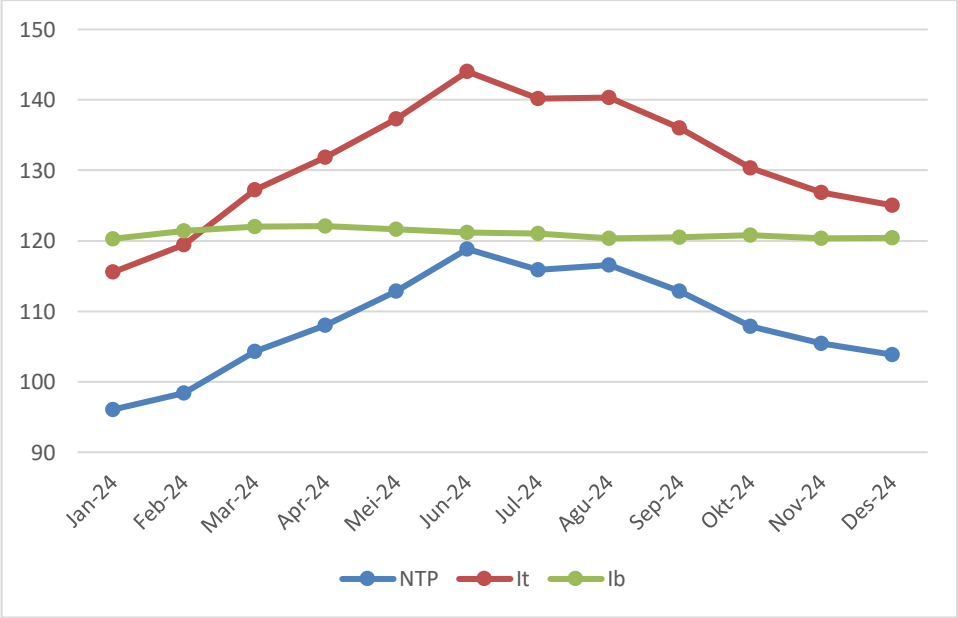
Dalam aspek konsumsi rumah tangga, indeks konsumsi rumah tangga tercatat sebesar 125,86, dengan pengeluaran komoditas kesehatan merupakan komponen utama yang memiliki nilai tertinggi yakni sebesar 156,50. Di sisi lain, sektor komoditas rekreasi, olahraga, dan budaya (107,81) memiliki indeks yang relatif lebih rendah.

Sementara itu, Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) berada pada angka 117,41. Biaya produksi utama terdiri dari pupuk dan pestisida sebesar 122,01, upah buruh yang mencapai 127,36. Dengan NTP yang tetap berada di atas angka 100, kondisi ini mengindikasikan bahwa petani

perkebunan rakyat masih mendapatkan keuntungan, meskipun terdapat perbedaan tingkat kenaikan harga pada beberapa komponen produksi dan konsumsi.

5.5 Nilai Tukar Petani Kabupaten Nganjuk Subsektor Peternakan Tahun 2024 (2018=100)

Pada tahun 2024, Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor peternakan di Kabupaten Nganjuk tercatat sebesar 108,41. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga barang produksi relatif lebih tinggi dari harga barang konsumsi dan biaya produksi sehingga petani subsektor peternakan di Kabupaten Nganjuk mengalami surplus. Tren NTP, It dan Ib subsektor peternakan Kabupaten Nganjuk tahun 2024 disajikan pada grafik berikut:



Gambar 5.6 Perkembangan NTP, It, dan Ib Subsektor Peternakan di Kabupaten Nganjuk Selama Tahun 2024

Sumber : Data diolah, 2024

Dari grafik di atas terlihat untuk pola NTP subsektor peternakan sejalan dengan It yang mengindikasikan bahwa perubahan NTP erat kaitannya dengan perubahan It, sedangkan Ib lebih cenderung stabil. Pola musiman terlihat dengan

jelas pada dinamika NTP subsektor peternakan yang meningkat di bulan-bulan tertentu karena pengaruh hari libur nasional atau hari besar keagamaan. Terlihat bahwa pola perubahan NTP subsektor peternakan Kabupaten Nganjuk pada semester pertama terus mengalami peningkatan, baik di periode memasuki ramadhan bulan Maret hingga puncaknya di bulan Juni yang disebabkan oleh periode hari besar Idul Adha. Harga komoditas ternak dan hasil ternak terus mengalami peningkatan sampai dengan periode tersebut seperti sapi, kambing, daging dan telur.

NTP subsektor peternakan di semester dua terus mengalami penurunan. Penurunan NTP subsektor peternakan di semester dua disebabkan oleh turunnya harga sapi, kambing, domba serta telur ayam ras. Penurunan ini adalah kembalinya harga komoditas ternak ke kondisi normal setelah di bulan Juni harga cukup tinggi karena pengaruh hari besar Idul Adha.

Jika dilihat pola grafiknya, kenaikan NTP tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar 5,95 persen, karena indeks harga yang diterima petani pada bulan tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,74 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani mengalami penurunan sebesar 0,41 persen. Penurunan NTP terbesar terjadi pada bulan Oktober sebesar 4,98 persen, karena indeks harga yang diterima petani mengalami penurunan sebesar 5,67 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani naik sebesar 0,31 persen. Rincian nilai NTP, It dan Ib subsektor peternakan setiap bulan dapat dilihat pada Lampiran.

Nilai rata-rata Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayarkan Petani (Ib) subsektor peternakan Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 berturut-turut sebesar 131,17 dan 120,99. Berikut nilai rata-rata NTP, It, dan Ib subsektor peternakan Kabupaten Nganjuk tahun 2024:

Tabel 5.6 Rata-Rata Tahunan NTP, Indeks Harga yang Diterima (It) dan Indeks Harga yang Dibayar (Ib) Subsektor Peternakan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Keterangan	Nilai
Nilai Tukar Petani	**108,41**
Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	**131,17**
1. Ternak Besar	133,98
2. Ternak Kecil	137,79
3. Unggas	120,21
4. Hasil-Hasil Ternak/Unggas	123,69
Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	**120,99**
1. Indeks Konsumsi Rumah Tangga:	125,64
a. Makanan, Minuman dan Tembakau	129,52
b. Pakaian dan Alas Kaki	120,59
c. Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah	117,77
d. Perlengkapan Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	119,88
e. Kesehatan	110,02
f. Transportasi	124,29
g. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	116,05
h. Rekreasi, Olahraga dan Budaya	113,39
i. Pendidikan	118,99
j. Penyediaan Makanan dan Minuman Restoran	122,75
k. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	124,08
2. Indeks BPPBM:	118,18
a. Benih/Bibit	111,62
b. Pupuk dan Pestisida	123,40
c. Sewa, Pajak dan Pengeluaran Lainnya	109,54
d. Transportasi dan Komunikasi	123,57
e. Barang Modal	105,31
f. Upah Buruh	122,73

Sumber : Data diolah, 2024

Indeks Harga yang Diterima Petani (It) berada pada angka 131,17, dengan rincian ternak besar mencapai 133,98, ternak kecil sebesar 137,79, unggas sebesar 120,21 sedangkan hasil-hasil ternak/unggas berada di angka 123,69. Sementara itu, Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) tercatat sebesar 120,99, yang mencakup pengeluaran konsumsi rumah tangga serta biaya produksi dan penambahan barang modal.

Dalam aspek konsumsi rumah tangga, indeks konsumsi rumah tangga tercatat sebesar 125,64, dengan pengeluaran komoditas makanan, minuman dan tembakau merupakan komponen utama yang memiliki nilai tertinggi yakni sebesar 129,52. Di sisi lain, sektor komoditas kesehatan (110,02) memiliki indeks yang relatif lebih rendah.

Sementara itu, Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) berada pada angka 118,18. Biaya produksi utama terdiri dari transportasi dan komunikasi sebesar 123,57, obat-obatan dan pakan ternak/unggas yang mencapai 123,40. Dengan NTP yang tetap berada di atas angka 100, kondisi ini mengindikasikan bahwa petani peternakan masih mendapatkan keuntungan, meskipun terdapat perbedaan tingkat kenaikan harga pada beberapa komponen produksi dan konsumsi.

BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah salah satu indikator nilai tukar dari produk pertanian terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani ataupun biaya produksi dan penambahan barang modal. Semakin tinggi NTP maka semakin tinggi pula kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. Berdasarkan hasil analisis Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Nganjuk didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 sebesar 111,51 dengan indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 135,45 dan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 121,48. Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 berada di atas 100, ini berarti kenaikan harga barang produksi relatif lebih tinggi dari harga barang konsumsi dan biaya produksi pada tahun dasar (2018=100) sehingga petani di Kabupaten Nganjuk mengalami surplus.
2. Pada tahun 2024, rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Nganjuk lebih rendah dari Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur dan Nasional, dimana rata-rata Nilai Tukar Petani Jawa Timur sebesar 112,22 dan Nasional sebesar 119,62. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perkembangan kesejahteraan petani dari tahun dasar (2018) di Kabupaten Nganjuk lebih rendah daripada Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Tentunya arti tersebut dapat berlaku **hanya jika** membahas kesejahteraan petani khusus dari lingkup NTP. Dimana NTP yang didasarkan kepada indeks *Laspeyres*, perkembangan nilainya hanya bertumpu pada perubahan harga-harga komoditas, tidak mempertimbangkan perubahan kuantitas dalam periode pengukuran sehingga hasil perhitungan NTP tidak mengakomodasikan perkembangan

produktivitas sebagai dampak dari kemajuan teknologi dan kegiatan pembangunan.

3. Pada tahun 2024, rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) berdasarkan subsektor pertanian di Kabupaten Nganjuk yang paling tinggi adalah subsektor tanaman pangan yaitu sebesar 114,63 persen. Diikuti oleh subsektor hortikultura sebesar 114,57 persen, dan subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 111,19 persen. Sedangkan nilai NTP terendah ada pada subsektor peternakan sebesar 108,41 persen.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa nilai NTP Kabupaten Nganjuk berada dibawah nilai rata-rata NTP Jawa Timur dan Nasional. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah untuk kembali meningkatkan tingkat kesejahteraan petani Kabupaten Nganjuk. Beberapa poin yang bisa direkomendasikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

1. Mengingat NTP Kabupaten Nganjuk lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Timur dan Nasional, perlu adanya upaya peningkatan daya saing produk pertanian. Hal ini dapat dilakukan melalui diversifikasi produk, peningkatan kualitas, dan penguatan akses pasar, baik di tingkat lokal maupun nasional.
2. Nilai NTP subsektor peternakan yang paling rendah (108,41 persen) menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi produksi dan pengelolaan peternakan. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa subsidi pakan, peningkatan teknologi peternakan, dan fasilitasi akses permodalan bagi peternak agar lebih kompetitif.
3. Pemerintah perlu melakukan pengembangan, pemberdayaan dan pemantapan kelembagaan petani seperti Gapoktan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan petani.

4. Program edukasi dan pendampingan bagi petani dalam manajemen usaha tani, penggunaan teknologi pertanian modern, serta strategi pemasaran dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi dan pendapatan mereka.
5. Pemerintah dapat mengadakan sosialisasi mengenai cara penanganan produk sayur dan buah pasca panen kepada petani sehingga dapat menambah pengetahuan dan skill petani dalam pengolahan produknya. Penanganan pasca panen terhadap produk sayur dan buah diperlukan karena produk tersebut rentan mengalami pembusukan. Pengolahan pasca panen ini terutama pada pengemasan sayur dan buah yang akan didistribusikan ke tempat yang jauh atau membutuhkan waktu distribusi yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Rosidi, S. (2007). *Nilai Tukar Petani (NTP) Sebagai Indikator Tingkat Kesejahteraan Petani*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Departemen Pertanian.

BPS. (2023). *Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023*. Kabupaten Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk.

BPS. (2025). *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2025* (Vol. 493). Kabupaten Nganjuk: BPS.

BPS. (2025). *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2025 (Vol. 48)*. Kota Surabaya: BPS Jawa Timur.

Marbun, B. (2003). *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Rachmat. (2013). *Nilai Tukar Petani : Konsep, Pengukuran dan Relevensinya Sebagai Indikator Kesejahteraan Petani*. Bogor: Forum Penelitian Agro Ekonomi.

Rachmat, M. (2000). *Analisa Nilai Tukar Petani Indonesia*. Institut Pertanian Bogor.

Rachmat, Supriyati, Hidayat, D., & Situmorang, J. (2000). *Perumusan Kebijaksanaan Nilai Tukar Petani dan Komoditi Pertanian*. Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Departemen Pertanian.

Ridwan. (2021). *Tingkat Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Menjalin Kerukunan Umat Beragama*. Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka.

Simatupang, & Maulana. (2008). Kaji Ulang Konsep dan Pengembangan Nilai Tukar Petani 2003–2006. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*.

Tomek, W. G. (1981). *Agricultural Product Prices*. Ithaca: Cornell University Press.

Zulriski. (2008). *Analisis Pendapatan Pedagang Sayur Keliling di Kelurahan Tegalega Kota Bogor*. Bogor: Institut Pertanian Bogor (IPB).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Nganjuk (2018=100) Tahun 2024

Komoditas	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Rata-rata
Peternakan													
Gabungan													
A. Nilai Tukar Petani (NTP)	**104,86**	**116,88**	**106,63**	**103,37**	**107,37**	**113,52**	**117,38**	**117,05**	**108,92**	**111,89**	**112,56**	**117,63**	**111,51**
B. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	**126,83**	**142,36**	**130,76**	**126,81**	**131,05**	**138,08**	**142,52**	**141,73**	**131,96**	**135,87**	**135,60**	**141,78**	**135,45**
C. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	**120,95**	**121,80**	**122,63**	**122,68**	**122,06**	**121,63**	**121,42**	**121,08**	**121,15**	**121,43**	**120,47**	**120,52**	**121,48**
1. Konsumsi Rumah Tangga	123,23	124,29	126,05	126,14	124,98	124,16	123,77	123,40	123,53	124,06	124,57	124,80	124,41
- Makanan, Minuman dan Tembakau	125,27	127,22	130,42	130,59	128,47	126,97	126,26	125,62	125,85	126,81	127,59	128,00	127,42
- Pakaian dan Alas Kaki	119,81	119,81	119,81	119,81	119,81	119,81	119,81	119,81	119,81	119,81	119,81	119,81	119,81
- Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	118,05	118,05	118,05	118,06	118,06	118,06	118,06	117,87	117,87	117,87	118,94	118,94	118,15
- Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	119,64	119,64	119,64	119,64	119,64	119,64	119,64	119,64	119,64	119,64	119,64	119,64	119,64
- Kesehatan	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07	120,07
- Transportasi	124,30	124,30	124,30	124,30	124,30	124,30	124,30	124,30	124,30	124,30	124,30	124,30	124,30
- Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38
- Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	109,62	109,62	109,62	109,62	109,62	109,62	109,62	109,62	109,62	109,62	109,62	109,62	109,62
- Pendidikan	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03
- Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	122,71	122,71	122,71	122,71	122,71	122,71	122,71	122,71	122,71	122,71	122,71	122,71	122,71
- Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	122,70	122,70	122,70	122,70	122,70	122,70	122,70	122,70	122,70	122,70	122,70	122,70	122,70
2. BPPBM	118,37	118,98	118,76	118,76	118,76	118,76	118,76	118,46	118,46	118,46	115,82	115,69	118,17
- Bibit	109,59	109,59	109,59	109,59	109,59	109,59	109,59	109,59	109,59	109,59	109,59	109,59	109,59
- Pupuk dan Pestisida	122,94	124,42	123,89	123,89	123,89	123,89	123,89	123,16	123,16	123,16	116,67	116,34	122,44
- Biaya Sewa Pajak dan Pengeluaran Lain	110,38	110,38	110,38	110,38	110,38	110,38	110,38	110,38	110,38	110,38	110,38	110,38	110,38
- Transportasi dan Komunikasi	118,93	118,93	118,93	118,93	118,93	118,93	118,93	118,93	118,93	118,93	118,93	118,93	118,93
- Barang Modal	107,84	107,84	107,84	107,84	107,84	107,84	107,84	107,84	107,84	107,84	107,84	107,84	107,84
- Upah Buruh	123,15	123,15	123,15	123,15	123,15	123,15	123,15	123,15	123,15	123,15	123,15	123,15	123,15

Lampiran 2. Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor Tanaman Pangan Kabupaten Nganjuk (2018=100) Tahun 2024

Komoditas	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Rata-rata
Tanaman Pangan													
A. Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPTP)	**136,30**	**142,28**	**100,48**	**101,29**	**101,58**	**112,04**	**112,21**	**117,77**	**114,74**	**110,94**	**113,08**	**112,86**	**114,63**
B. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	**165,43**	**173,67**	**123,04**	**123,80**	**123,68**	**136,11**	**136,22**	**142,67**	**139,02**	**134,96**	**136,47**	**136,47**	**139,29**
1. Padi	161,10	163,28	124,09	124,09	124,09	141,51	145,86	152,39	148,04	143,68	143,68	143,68	142,96
2. Palawija	175,36	197,49	120,63	123,14	122,73	123,76	114,13	120,38	118,37	114,97	119,94	119,94	130,90
C. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	**121,38**	**122,06**	**122,45**	**122,23**	**121,75**	**121,49**	**121,39**	**121,14**	**121,17**	**121,65**	**120,68**	**120,92**	**121,53**
1. Konsumsi Rumah Tangga	121,44	122,42	122,98	122,65	121,98	121,60	121,46	121,08	121,12	121,80	121,87	122,21	121,89
- Makanan, Minuman dan Tembakau	123,03	124,79	125,78	125,20	123,99	123,32	123,07	122,42	122,49	123,71	123,66	124,26	123,81
- Pakaian dan Alas Kaki	121,20	121,20	121,20	121,20	121,20	121,20	121,20	121,20	121,20	121,20	121,20	121,20	121,20
- Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	113,73	113,73	113,74	113,74	113,74	113,74	113,74	113,53	113,53	113,53	114,66	114,66	113,84
- Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	120,48	120,48	120,48	120,48	120,48	120,48	120,48	120,48	120,48	120,48	120,48	120,48	120,48
- Kesehatan	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95
- Transportasi	123,95	123,95	123,95	123,95	123,95	123,95	123,95	123,95	123,95	123,95	123,95	123,95	123,95
- Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	116,30	116,30	116,30	116,30	116,30	116,30	116,30	116,30	116,30	116,30	116,30	116,30	116,30
- Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	110,02	110,02	110,02	110,02	110,02	110,02	110,02	110,02	110,02	110,02	110,02	110,02	110,02
- Pendidikan	118,95	118,95	118,95	118,95	118,95	118,95	118,95	118,95	118,95	118,95	118,95	118,95	118,95
- Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	123,23	123,23	123,23	123,23	123,23	123,23	123,23	123,23	123,23	123,23	123,23	123,23	123,23
- Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	122,58	122,58	122,58	122,58	122,58	122,58	122,58	122,58	122,58	122,58	122,58	122,58	122,58
2. BPPBM	121,22	121,22	121,22	121,22	121,22	121,22	121,22	121,27	121,27	121,27	117,87	117,87	120,67
- Bibit	116,51	116,51	116,51	116,51	116,51	116,51	116,51	116,51	116,51	116,51	116,51	116,51	116,51
- Pupuk dan Pestisida	124,94	124,94	124,94	124,94	124,94	124,94	124,94	125,19	125,19	125,19	110,15	110,15	122,54
- Biaya Sewa Pajak dan Pengeluaran Lain	113,24	113,24	113,24	113,24	113,24	113,24	113,24	113,24	113,24	113,24	113,24	113,24	113,24
- Transportasi dan Komunikasi	118,08	118,08	118,08	118,08	118,08	118,08	118,08	118,08	118,08	118,08	118,08	118,08	118,08
- Barang Modal	116,53	116,53	116,53	116,53	116,53	116,53	116,53	116,53	116,53	116,53	116,53	116,53	116,53
- Upah Buruh	123,79	123,79	123,79	123,79	123,79	123,79	123,79	123,79	123,79	123,79	123,79	123,79	123,79

Lampiran 3. Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor Hortikultura Kabupaten Nganjuk (2018=100) Tahun 2024

Komoditas	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Rata-rata
Hortikultura													
A. Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)	**109,03**	**144,80**	**116,23**	**98,62**	**104,24**	**108,97**	**125,73**	**121,61**	**99,29**	**107,13**	**109,73**	**129,57**	**114,57**
B. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	**132,11**	**176,39**	**142,89**	**121,18**	**127,18**	**132,39**	**152,56**	**147,38**	**120,16**	**129,62**	**132,48**	**156,26**	**139,22**
1. Sayur-Sayuran	137,26	190,58	150,24	124,10	131,34	137,61	161,89	155,66	122,88	134,27	137,71	166,34	145,82
2. Buah-Buahan	107,13	107,13	107,13	107,13	107,13	107,13	107,13	107,13	107,13	107,13	107,13	107,13	107,13
C. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	**121,17**	**121,81**	**122,94**	**122,87**	**122,01**	**121,49**	**121,34**	**121,19**	**121,02**	**121,00**	**120,73**	**120,59**	**121,51**
1. Konsumsi Rumah Tangga	123,33	124,42	126,32	126,20	124,76	123,88	123,63	123,33	123,05	123,02	123,53	123,70	124,10
- Makanan, Minuman dan Tembakau	124,69	126,76	130,36	130,13	127,40	125,73	125,26	124,73	124,19	124,13	124,96	125,28	126,13
- Pakaian dan Alas Kaki	118,83	118,83	118,83	118,83	118,83	118,83	118,83	118,83	118,83	118,83	118,83	118,83	118,83
- Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	126,08	126,08	126,08	126,09	126,09	126,09	126,09	125,88	125,88	125,88	126,73	126,73	126,14
- Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	119,28	119,28	119,28	119,28	119,28	119,28	119,28	119,28	119,28	119,28	119,28	119,28	119,28
- Kesehatan	109,01	109,01	109,01	109,01	109,01	109,01	109,01	109,01	109,01	109,01	109,01	109,01	109,01
- Transportasi	125,19	125,19	125,19	125,19	125,19	125,19	125,19	125,19	125,19	125,19	125,19	125,19	125,19
- Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	114,98	114,98	114,98	114,98	114,98	114,98	114,98	114,98	114,98	114,98	114,98	114,98	114,98
- Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	108,72	108,72	108,72	108,72	108,72	108,72	108,72	108,72	108,72	108,72	108,72	108,72	108,72
- Pendidikan	119,56	119,56	119,56	119,56	119,56	119,56	119,56	119,56	119,56	119,56	119,56	119,56	119,56
- Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	122,67	122,67	122,67	122,67	122,67	122,67	122,67	122,67	122,67	122,67	122,67	122,67	122,67
- Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	121,85	121,85	121,85	121,85	121,85	121,85	121,85	121,85	121,85	121,85	121,85	121,85	121,85
2. BPPBM	118,04	118,04	118,04	118,04	118,04	118,04	118,04	118,08	118,08	118,08	116,69	116,10	117,77
- Bibit	104,12	104,12	104,12	104,12	104,12	104,12	104,12	104,12	104,12	104,12	104,12	104,12	104,12
- Pupuk dan Pestisida	120,52	120,52	120,52	120,52	120,52	120,52	120,52	120,67	120,67	120,67	116,18	114,31	119,68
- Biaya Sewa Pajak dan Pengeluaran Lain	113,67	113,67	113,67	113,67	113,67	113,67	113,67	113,67	113,67	113,67	113,67	113,67	113,67
- Transportasi dan Komunikasi	114,17	114,17	114,17	114,17	114,17	114,17	114,17	114,17	114,17	114,17	114,17	114,17	114,17
- Barang Modal	116,65	116,65	116,65	116,65	116,65	116,65	116,65	116,65	116,65	116,65	116,65	116,65	116,65
- Upah Buruh	127,36	127,36	127,36	127,36	127,36	127,36	127,36	127,36	127,36	127,36	127,36	127,36	127,36

Lampiran 4. Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Nganjuk (2018=100) Tahun 2024

Komoditas	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Rata-rata
Tanaman Perkebunan Rakyat													
A. Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)	**99,64**	**100,67**	**101,50**	**103,07**	**105,45**	**111,80**	**112,14**	**112,28**	**112,05**	**123,68**	**126,07**	**125,96**	**111,19**
B. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	**120,84**	**122,95**	**125,11**	**127,32**	**129,59**	**136,86**	**136,86**	**136,86**	**136,86**	**151,58**	**151,58**	**151,58**	**135,67**
Tanaman Perkebunan Rakyat	120,84	122,95	125,11	127,32	129,59	136,86	136,86	136,86	136,86	151,58	151,58	151,58	135,67
C. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	**121,28**	**122,13**	**123,25**	**123,53**	**122,90**	**122,41**	**122,05**	**121,89**	**122,14**	**122,56**	**120,23**	**120,34**	**122,06**
1. Konsumsi Rumah Tangga	124,19	125,17	127,22	127,72	126,57	125,69	125,03	124,61	125,07	125,83	126,51	126,71	125,86
- Makanan, Minuman dan Tembakau	126,97	128,83	132,69	133,63	131,46	129,80	128,55	127,79	128,65	130,08	131,18	131,55	130,10
- Pakaian dan Alas Kaki	119,01	119,01	119,01	119,01	119,01	119,01	119,01	119,01	119,01	119,01	119,01	119,01	119,01
- Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	112,94	112,94	112,94	112,97	112,97	112,97	112,97	112,81	112,81	112,81	113,91	113,91	113,08
- Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	119,04	119,04	119,04	119,04	119,04	119,04	119,04	119,04	119,04	119,04	119,04	119,04	119,04
- Kesehatan	156,50	156,50	156,50	156,50	156,50	156,50	156,50	156,50	156,50	156,50	156,50	156,50	156,50
- Transportasi	123,61	123,61	123,61	123,61	123,61	123,61	123,61	123,61	123,61	123,61	123,61	123,61	123,61
- Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	114,31	114,31	114,31	114,31	114,31	114,31	114,31	114,31	114,31	114,31	114,31	114,31	114,31
- Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	107,81	107,81	107,81	107,81	107,81	107,81	107,81	107,81	107,81	107,81	107,81	107,81	107,81
- Pendidikan	115,33	115,33	115,33	115,33	115,33	115,33	115,33	115,33	115,33	115,33	115,33	115,33	115,33
- Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	122,23	122,23	122,23	122,23	122,23	122,23	122,23	122,23	122,23	122,23	122,23	122,23	122,23
- Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	122,55	122,55	122,55	122,55	122,55	122,55	122,55	122,55	122,55	122,55	122,55	122,55	122,55
2. BPPBM	117,71	118,40	118,40	118,40	118,40	118,40	118,40	118,56	118,56	118,56	112,56	112,56	117,41
- Bibit	102,72	102,72	102,72	102,72	102,72	102,72	102,72	102,72	102,72	102,72	102,72	102,72	102,72
- Pupuk dan Pestisida	122,96	125,14	125,14	125,14	125,14	125,14	125,14	125,63	125,63	125,63	106,71	106,71	122,01
- Biaya Sewa Pajak dan Pengeluaran Lain	107,42	107,42	107,42	107,42	107,42	107,42	107,42	107,42	107,42	107,42	107,42	107,42	107,42
- Transportasi dan Komunikasi	119,67	119,67	119,67	119,67	119,67	119,67	119,67	119,67	119,67	119,67	119,67	119,67	119,67
- Barang Modal	117,24	117,24	117,24	117,24	117,24	117,24	117,24	117,24	117,24	117,24	117,24	117,24	117,24
- Upah Buruh	119,07	119,07	119,07	119,07	119,07	119,07	119,07	119,07	119,07	119,07	119,07	119,07	119,07

Lampiran 5. Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor Peternakan Kabupaten Nganjuk (2018=100) Tahun 2024

Komoditas	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Rata-rata
Peternakan													
A. Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPP)	**96,06**	**98,41**	**104,28**	**107,98**	**112,89**	**118,84**	**115,87**	**116,59**	**112,87**	**107,89**	**105,43**	**103,83**	**108,41**
B. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	**115,56**	**119,46**	**127,20**	**131,84**	**137,27**	**144,02**	**140,20**	**140,30**	**135,98**	**130,31**	**126,86**	**125,01**	**131,17**
1. Ternak Besar	113,92	117,34	124,49	133,25	140,70	150,61	145,83	147,21	142,59	135,44	130,82	125,58	133,98
2. Ternak Kecil	113,15	113,45	113,77	132,90	145,64	177,47	177,47	166,43	150,31	129,24	116,99	116,72	137,79
3. Unggas	115,79	121,40	130,17	128,41	124,91	117,89	114,42	114,42	114,40	117,89	121,40	121,40	120,21
4. Hasil-Hasil Ternak/Unggas	124,17	130,38	142,80	127,28	127,28	120,29	119,51	117,57	115,63	115,63	115,63	128,05	123,69
C. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	**120,29**	**121,39**	**121,98**	**122,09**	**121,60**	**121,19**	**121,00**	**120,34**	**120,48**	**120,79**	**120,32**	**120,40**	**120,99**
1. Konsumsi Rumah Tangga	123,74	124,96	127,37	127,66	126,37	125,27	124,77	124,38	124,74	125,55	126,32	126,54	125,64
- Makanan, Minuman dan Tembakau	126,28	128,37	132,52	133,02	130,80	128,91	128,05	127,40	128,03	129,42	130,56	130,93	129,52
- Pakaian dan Alas Kaki	120,59	120,59	120,59	120,59	120,59	120,59	120,59	120,59	120,59	120,59	120,59	120,59	120,59
- Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	117,63	117,63	117,63	117,64	117,64	117,64	117,64	117,43	117,43	117,43	118,74	118,74	117,77
- Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	119,88	119,88	119,88	119,88	119,88	119,88	119,88	119,88	119,88	119,88	119,88	119,88	119,88
- Kesehatan	110,02	110,02	110,02	110,02	110,02	110,02	110,02	110,02	110,02	110,02	110,02	110,02	110,02
- Transportasi	124,29	124,29	124,29	124,29	124,29	124,29	124,29	124,29	124,29	124,29	124,29	124,29	124,29
- Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	116,05	116,05	116,05	116,05	116,05	116,05	116,05	116,05	116,05	116,05	116,05	116,05	116,05
- Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	113,39	113,39	113,39	113,39	113,39	113,39	113,39	113,39	113,39	113,39	113,39	113,39	113,39
- Pendidikan	118,99	118,99	118,99	118,99	118,99	118,99	118,99	118,99	118,99	118,99	118,99	118,99	118,99
- Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	122,75	122,75	122,75	122,75	122,75	122,75	122,75	122,75	122,75	122,75	122,75	122,75	122,75
- Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	124,08	124,08	124,08	124,08	124,08	124,08	124,08	124,08	124,08	124,08	124,08	124,08	124,08
2. BPPBM	118,21	119,23	118,72	118,72	118,72	118,72	118,72	117,90	117,90	117,90	116,69	116,69	118,18
- Bibit	111,62	111,62	111,62	111,62	111,62	111,62	111,62	111,62	111,62	111,62	111,62	111,62	111,62
- Pupuk dan Pestisida	123,45	125,30	124,38	124,38	124,38	124,38	124,38	122,90	122,90	122,90	120,71	120,71	123,40
- Biaya Sewa Pajak dan Pengeluaran Lain	109,54	109,54	109,54	109,54	109,54	109,54	109,54	109,54	109,54	109,54	109,54	109,54	109,54
- Transportasi dan Komunikasi	123,57	123,57	123,57	123,57	123,57	123,57	123,57	123,57	123,57	123,57	123,57	123,57	123,57
- Barang Modal	105,31	105,31	105,31	105,31	105,31	105,31	105,31	105,31	105,31	105,31	105,31	105,31	105,31
- Upah Buruh	122,73	122,73	122,73	122,73	122,73	122,73	122,73	122,73	122,73	122,73	122,73	122,73	122,73

Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk

Jl. Anjuk Ladang 37, Nganjuk

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERTANIAN
Jl, AnjukLadang No, 37 Nganjuk 64417
Telp, (0358) 321728 Fax (0358) 325874 E-Mail :diperta,nganjuk2023@gmail,com

PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN TAHUN 2025 (Renstra 2024-2026)

No	Komoditi	Realisasi Produksi (Ton)		Kenaikan/ Penurunan %
		Tahun 2024	2025	
1	Padi	512.421,85	473.871,57	-7,5232
2	Jagung	23.6791,11	111.120,71	-53,0723
3	Kedelai	7.635,22	6.096,80	-20,1489
4	Bawang Merah	205.603,20	164.878,28	-19,8075
5	CB Rawit	4.486,50	2.300,70	-48,7195
6	Cengkeh	585,73	59,00	-89,9271
7	Tembakau	1.626,00	404,97	-75,0942
Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Total				-315,2926
Persentase Peningkatan Produksi Pertanian				-44,8989
Capaian Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (dari target 0,176%)				-255,11%

Persentase Peningkatan Produksi Pertanian = $\frac{Jml,Produksi\ Th\ n - Jml,Produksi\ th\ (n-1)}{Jumlah\ Produksi\ Tahun\ (n-1)}$ x100%

Keterangan :
Realisasi kinerja sampai Bulan September 2025
Realisasi Peningkatan produksi pertanian tahun 2025 sebesar -0,45%
Target peningkatan produksi pertanian tahun 2025 sebesar 0,176%
Capaian kinerja -255,11%

Mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk	Verifikator, Kepala Bidang Produksi dan Perizinan	Nganjuk, 09 Januari 2026 Penyusun Data, JF, Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda
Ida Shobrotin, AP., M.Si	Fadlin Nuryani, S.P., M.P	Yovak Haryanto, S.TP
Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina (IV/a)	Penata Tingkat I (III/d)
NIP, 19750116 199412 2 001	NIP, 19800907 201001 2 009	NIP, 19770625 200903 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERTANIAN
Jl, Anjuk Ladang No, 37 Nganjuk 64417
Telp, (0358) 321728 Fax (0358) 325874 E-Mail :diperta,nganjuk2023@gmail,com

PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN TAHUN 2025
(Renstra 2024-2026)

No	Komoditi	Realisasi Produksi (Ton)		Kenaikan/ Penurunan %
		Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Daging	10.219,36	8.705,420	- 14.81
2	Telur	8.260,26	6.017,123	- 27.16
Persentase Peningkatan Produksi Peternakan Total				- 41,97
Persentase Peningkatan Produksi Peternakan				- 20,99
Capaian Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (dari target 1,9%)				'- 1.104,74

Persentase Peningkatan Produksi Pertanian = $\frac{Jml.\ Produksi\ Th\ n - Jml.\ Produksi\ th\ (n-1)}{Jumlah\ Produksi\ Tahun\ (n-1)}$ x 100%

Keterangan :
Realisasi sampai bulan September 2025 : -20,99%
Target tahun 2025 : 1,9%
Capaian kinerja : -1.104,74%

Nganjuk, 09 Januari 2026

Mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk	Verifikator, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penyusun Data, JF. Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda
Ida Shobihatin, AP,, M,Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19750116 199412 2 001	Drh, Ery Cahyono, M,A,P Pembina (IV/a) NIP. 19790524 200903 1 002	Sumanto, S.Pt Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19760628 200212 1 006

BUKTI DUKUNG KINERJA
PENCAPAIAN IKU TAHUN 2025
(RENSTRA 2025-2029)

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERTANIAN
Jl, Anjuk Ladang No, 37 Nganjuk 64417
Telp, (0358) 321728 Fax (0358) 325874 E-Mail :diperta,nganjuk2023@gmail,com

RASIO PENDAPATAN PETANI TERHADAP BIAYA INVESTASI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

NO.	KOMODITI	PENDAPATAN Rp.	BIAYA Rp.	RASIO
1.	Tanaman Pangan	29,316,366	19,680,592	1.490
2.	Tanaman Hortikultura	120,962,500	79,812,947	1.516
3.	Tanaman Perkebunan	26,871,429	18,746,440	1.433
4.	Hasil Peternakan	156,875,000	139,936,800	1.121
	Rata-Rata Rasio Pendapatan Petani Terhadap Biaya Investasi Sektor Pertanian (R/C)			1.390

Keterangan

Rumus R/C = $\frac{Total\ Penerimaan\ (TR)}{Total\ Biaya\ (TC)}$

Target Tahun 2025 : 1,155
Realisasi Tahun 2025 : 1,39
Capaian Kinerja : 120,35%
Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai)
Tanaman Hortikultura (bawang merah, cabe)
Tanaman Perkebunan (tembakau, cengkeh)
Hasil Peternakan terdiri dari hasil penggemukan sapi

Nganjuk, 9 Januari 2026
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Nganjuk

Dra Shobahatin, jAP,,M,Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750116 199412 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERTANIAN
Jl, Anjuk Ladang No, 37 Nganjuk 64417
Telp, (0358) 321728 Fax (0358) 325874 E-Mail :diperta,nganjuk2023@gmail,com

PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN KOMODITAS UNGGULAN TAHUN 2025 (Renstra 2025-2029)

No	Komoditi	Realisasi Produksi (Ton)		Kenaikan/ Penurunan %
		Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Padi	512.421,85	556.923,41	8,685
2	Jagung	236.791,11	225.284,20	-4,860
3	Kedelai	7.635,22	6.572,54	-13,918
4	Bawang Merah	205.603,20	223.092,37	8,506
5	CB Rawit	4.486,50	3.768,50	-16,004
6	Cengkeh	585,73	586,00	0,046
7	Tembakau	1.626,00	1.927,44	18,538
Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Komoditas Unggulan total				0,995
Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Komoditas Unggulan				0,142
Capaian Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Komoditas Unggulan (dari target 0,18%)				78,89%

Persentase Peningkatan Prod Pertanian Komoditas Unggulan = $\frac{Jml.Produksi\ Th\ n - Jml.Produksi\ th\ (n-1)}{Jumlah\ Produksi\ Tahun\ (n-1)}$ x 100%

Keterangan :
Realisasi Peningkatan produksi pertanian tahun 2025 sebesar 0,142%
Target peningkatan produksi pertanian tahun 2025 sebesar 0,18%
Capaian kinerja 78,89%

Mengetahui
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Nganjuk

Ida Shopikatin, AP,, M,Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP, 19750116 199412 2 001

Verifikator,
Kepala Bidang Produksi dan Perizinan

Fadlin Nuryani, S,P,, M,P
Pembina (IV/a)
NIP, 19800907 201001 2 009

Nganjuk, 09 Januari 2026
Penyusun Data,
JF, Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda

Yoyok Haryanto, S,TP
Penata Tingkat I (III/d)
NIP, 19770625 200903 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERTANIAN
Jl, Anjuk Ladang No, 37 Nganjuk 64417
Telp, (0358) 321728 Fax (0358) 325874 E-Mail :diperta,nganjuk2023@gmail,com

PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN TAHUN 2025 (Renstra 2025-2029)

No	Komoditi	Realisasi Produksi (Ton)		Kenaikan/ Penurunan %
		Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Daging	10,219,36	10,899,055	6,65
2	Telur	8,260,26	7,968,167	-3,54
Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan total				3,11
Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				1,56
Capaian Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (dari target 1,46%)				106,64

Persentase Peningkatan Produksi Pertanian = $\frac{Jml,\ Produksi\ Th\ n - Jml,\ Produksi\ th\ (n-1)}{Jumlah\ Produksi\ Tahun\ (n-1)}$ x 100%

Keterangan :
Realisasi tahun 2025 : 1,56%
Target tahun 2025 : 1,46%
Capaian kinerja : 106,64%

Nganjuk, 09 Januari 2026

Mengetahui	Verifikator,	Penyusun Data,
Kepala Dinas Pertanian	Kepala Bidang Peternakan	JF. Pengawas Bibit Ternak
Kabupaten Nganjuk	dan Kesehatan Hewan	Ahli Muda
Ida Sholihatin, AP,, M,Si	Drh, Ery Cahyono, M,A,P	Sumanto, S.Pt
Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina (IV/a)	Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19750116 199412 2 001	NIP. 19790524 200903 1 002	NIP. 19760628 200212 1 006

BUKTI DUKUNG KINERJA
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2025

LAMPIRAN - LAMPIRAN

NO.	DOKUMEN	LINK BUKTI DUKUNG
1.	Renstra 2024 – 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1imlEs3DT5bPhITJHvNUA4ZcknCTHj0-G
2.	Renstra 2025 - 2029	
3.	Renja 2025	
4.	Dokumen Dalev	
5.	DPA dan DPPA (Ikhtisar)	
6.	Laporan Triwulan 3 Tahun 2025	
7.	Laporan Triwulan 4 Tahun 2024	
8.	SK IKU berdasarkan Renstra 2024-2026	
9.	SK IKU berdasarkan Renstra 2025-2029	
10.	Perjanjian Kinerja (Januari 2025)	
11.	Perjanjian Kinerja (September 2025)	
12.	LHE AKIP 2025	
13.	Dokumen Realisasi IKU Renstra 2024-2026	
14.	Dokumen Realisasi IKU Renstra 2025-2029	

DOKUMEN BUKTI DUKUNG (*EVIDENCE*) UNTUK KINERJA PADA PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PERENCANAAN Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN %	LINK BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Tujuan :** Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Renstra 2024-2026				https://drive.google.com/drive/folders/1imlEs3DT5bPhITJHvNUA4ZcknCTHj0-G
2	**Sasaran :** Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	Renstra 2024-2026	82 Nilai	80,65 Nilai	98,35%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Nilai SAKIP Dinas Pertanian**	**Renstra 2024-2026**				
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Renstra 2024-2026	41 Dokumen	32 Dokumen	78,04%	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Renstra 2024-2026	81 Dokumen	75 Dokumen	92,59%	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Renstra 2024-2026	7 Dokumen	4 Dokumen	57,15%	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	Renstra 2024-2026	201 Unit	100Unit	49,75%	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemeliharaan daerah yang tersedia	Renstra 2024-2026	3 Jenis	3 Jenis	100%	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Renstra 2024-2026	171 Unit	125 Unit	73,10%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PERENCANAAN Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN %	LINK BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Persentase sarana pertanian yang digunakan**	**Renstra 2024-2026**	**100%**	**73,99%**	**73,99%**	
	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang diawasi dan didampingi terkait penggunaan sarana pendukung pertanian	Renstra 2024-2026	1.490 Kelp. Tani	1.490 Kelp. Tani	100%	
	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman Berkualitas	Renstra 2024-2026	3 Kegiatan	2 Kegiatan	66,6%	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Persentase Prasarana Pertanian yang digunakan**	**Renstra 2024-2026**	**100%**	**0**	**0%**	
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian	Renstra 2024-2026	8 Unit	0 Unit	0%	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Persentase Pengendalian dan Penanganan bencana Pertanian**	**Renstra 2024-2026**	**100%**	**68,46%**	**68,46%**	
	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan pertanian yang dilakukan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Renstra 2024-2026	1.475 Ha	1.013,5 Ha	68,71%	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**Persentase perizinan usaha pertanian yang direkomendasikan**	**Renstra 2024-2026**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendai usulan izin usaha yang diterbitkan	Renstra 2024-2026	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya**	**Renstra 2024-2026**	**1.54%**	**1.21%**	**78,57%**	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PERENCANAAN Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN %	LINK BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pelatihan	Renstra 2024-2026	25 Kelp. Tani	23 Kelp. Tani	92%	
	Sasaran 2. Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase peningkatan produksi peternakan	Renstra 2024-2026				
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Persentase sarana pertanian yang digunakan**	**Renstra 2024-2026**	**100%**	**73,99%**	**73,99%**	
	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Renstra 2024-2026	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**Renstra 2024-2026**	**10%**	**-42,8%**	**-428%**	
	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ternak yang ditangani	Renstra 2024-2026	80.000 Ekor	64.323 Ekor	80,40%	
	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan dalam daerah	Renstra 2024-2026	4 Laporan	3 Laporan	75%	
	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Renstra 2024-2026	1 Laporan	1 Laporan	100%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PERENCANAAN Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN %	LINK BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah laporan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Renstra 2024-2026	2 Laporan	2 Laporan	100%	
3	**Tujuan:** Meningkatnya Pendapatan Petani	Rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sector pertanian	Renstra 2025-2029				
4	**Sasaran 1:** Meningkatnya produksi pertanian komoditas unggulan	Persentase peningkatan Produksi Pertanian komoditas unggulan	Renstra 2025-2029				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**Renstra 2025-2029**	**81 Nilai**	**80,65 Nilai**	**99.57%**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra 2025-2029	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Renstra 2025-2029	12 Laporan	12 Laporan	100%	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Renstra 2025-2029	9 Laporan	9 Laporan	100%	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Renstra 2025-2029	217 Orang/ bulan	216 Orang/ bulan	100%	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Renstra 2025-2029	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Renstra 2025-2029	1 Laporan	1 Laporan	100%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PERENCANAAN Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN %	LINK BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Renstra 2025-2029	1 Paket	1 Paket	100%	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Renstra 2025-2029	24 Paket	24 Paket	100%	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Renstra 2025-2029	8 Paket	8 Paket	100%	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Renstra 2025-2029	2 Paket	2 Paket	100%	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Renstra 2025-2029	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Renstra 2025-2029	12 Laporan	11 Laporan	91.67%	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Renstra 2025-2029	95 Laporan	78 Laporan	97.50%	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Renstra 2025-2029	201 Unit	201 Unit	100%	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Renstra 2025-2029	1 Laporan	1 Laporan	100%	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Renstra 2025-2029	12 Laporan	12 Laporan	100%	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Renstra 2025-2029	12 Laporan	12 Laporan	100%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PERENCANAAN Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN %	LINK BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Renstra 2025-2029	1 Unit	1 Unit	100%	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Renstra 2025-2029	98 Unit	78 Unit	79.59%	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Renstra 2025-2029	83 Unit	63 Unit	75.90%	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Renstra 2025-2029	14 Unit	13 Unit	100%	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Persentase ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan pupuk**	**Renstra 2025-2029**	**100%**	**85.48%**	**100%**	
		Persentase alsintan dalam kondisi baik	**Renstra 2025-2029**	**90%**	**98%**	**108.89%**	
		Persentase Petani yang menggunakan bibit unggul	**Renstra 2025-2029**	**62%**	**62.70%**	**101.13%**	
	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Renstra 2025-2029	1 Laporan	1 Laporan	94.12%	
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Renstra 2025-2029	1 Laporan	1 Laporan	100%	
	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Renstra 2025-2029	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	
		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Renstra 2025-2029	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
		Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Renstra 2025-2029	3 VUB	3 VUB	100%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PERENCANAAN Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN %	LINK BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Persentase Prasarana Pertanian dalam kondisi baik**	**Renstra 2025-2029**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Renstra 2025-2029	8 Unit	7 Unit	87.50%	
		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Renstra 2025-2029	1 unit	1 Unit	100%	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Persentase Serangan Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) yang tertangani**	**Renstra 2025-2029**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Renstra 2025-2029	1325 ha	1325 ha	100%	
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Renstra 2025-2029	100 ha	100 Ha	100%	
		Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Renstra 2025-2029	50 ha	50 Ha	100%	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**Persentase izin usaha pertanian yang terfasilitasi penerbitan NIB**	**Renstra 2025-2029**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Standart Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Renstra 2025-2029	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
		jumlah penilaian kelayakan dan pemberian teknis isin usaha pertanian	Renstra 2025-2029	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PERENCANAAN Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN %	LINK BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Renstra 2025-2029	1 Laporan	1 Laporan	100%	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya**	**Renstra 2025-2029**	**1.54%**	**1.54%**	**94.81%**	
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Renstra 2025-2029	20 Unit	20 Unit	100%	
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Renstra 2025-2029	27 Unit	27 Unit	100%	
		jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Renstra 2025-2029	54 Unit	54 Unit	100%	
		jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi	Renstra 2025-2029	20 Unit	20 Unit	100%	
		jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Renstra 2025-2029	151 Orang	149 Orang	98.68%	
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	Renstra 2025-2029	3 Unit	3 Unit	100%	
	Sasaran 2: Meningkatnya produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan	Renstra 2025-2029				
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Persentase Peningkatan Pupulasi ternak Ruminansia**	**Renstra 2025-2029**	**1%**	**0.81%**	**81.82%**	
		Persentase Peningkatan Populasi Unggas	**Renstra 2025-2029**	**2.02%**	**1.89%**	**93.56%**	
	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak,	Jumlah pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan	Renstra 2025-2029	1%	-1.68%	100%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PERENCANAAN Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN %	LINK BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Renstra 2025-2029	2.02%	1.89%	100%	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**Persentase terbitnya rekomendasi usaha peternakan**	**Renstra 2025-2029**	**100%**	**100%**	**100%**	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan**	**Renstra 2025-2029**	**10%**	**12.79%**	**127.70%**	
	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Renstra 2025-2029	4 Laporan	4 Laporan	100%	
		Jumlah Wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Renstra 2025-2029	4 Laporan	4 Laporan	100%	
	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Renstra 2025-2029	4 Laporan	4 Laporan	100%	
	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten.Kota	jumlah pelayanan jasa laboratorium	Renstra 2025-2029	1 Laporan	1 Laporan	100%	
		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Renstra 2025-2029	12 Laporan	12 Laporan	100%	
	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Renstra 2025-2029	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	100%	

2025

DINAS PERTANIAN
KABUPATEN NGANJUK